



Rp75.000,-

MASIH ADA JOKOWI DI PILKADA 2024

**DIGITALISASI
KESEHATAN
LEWAT
TEKNOLOGI AI**

**DARI ISTANA
NEGARA KE
PERCEPATAN
IKN**

**NUSANTARA
AIRPORT
SAMBUT
KEMERDEKAAN
DI IKN**

**HADI
TJAHJANTO
GARDA TERDEPAN
BERANTAS JUDI
ONLINE**

**AGUS FATONI
BANYAK
LAKUKAN
TEROBOSAN
DAN INOVASI**

**DUKUNGAN
MELIMPAH
KHOFIFAH-
EMIL**

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

COMING
SOON

• iNOVASI UNTUK NEGERI •
info indonesia
AWARD 2024



**DARI
SUMSEL
UNTUK
INDONESIA
EMAS**

EDISI
BULAN
JUNI
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Masih sekitar enam bulan menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang pemungutan suaranya terjadwal pada 27 November 2024. Namun, wacana pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menghambat pembangunan malah mengemuka. Apa sebenarnya yang terjadi?



24

INFO SUMSEL

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni tak hentinya melakukan terobosan dan inovasi dalam banyak hal. Hal tersebut membuatnya menerima penghargaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan apresiasi BKKBN atas pencapaian yang telah dilakukan.



34

INFO KALTIM

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, meresmikan bangunan penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga dan mendukung program pengentasan kemiskinan.



56

INFO PROFIL

Konstelasi politik menjelang pemilihan gubernur Sumatera Utara di bulan November mendatang kini terkesan lebih sederhana. Partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, telah sepakat memberikan dukungan pada Bobby Afif Nasution.



70

INFO NASIONAL

Salah satu tantangan Pilkada serentak 2024 adalah penyelenggaraannya yang aman dan damai. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan jajaran Linmas (Perlindungan Masyarakat) akan lebih terasa.



80

INFO MUBA

Ada banyak kegiatan budaya dan kearifan lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk keanekaragaman masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai momen ini dimanfaatkan maksimal Penjabat Bupati Muba, Sandi Fahlepi untuk menyapa warga dari berbagai pelosok wilayah.



91

INFO KHUSUS

Salah satu cara memahami penyelenggaraan negara adalah melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun. Bagaimana dengan APBN 2025 yang dirancang dalam masa peralihan dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran?

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

32 INFO KALTARA

82 INFO EKONOMI

86 INFO ISTANA

90 KAJI

66

INFO PILKADA

Putri Karlina menjadi salah satu bakal calon Bupati Garut, Jawa Barat. Kepastiannya menunggu penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum.

GAMANG

Gamang adalah suasana. Terbentuk oleh ketidakpastian yang menyelimutinya. Maka gamang, nervous, atau gugup, adalah gejala normal dalam masa transisi. Ada ketidakpastian atau katakanlah misteri yang belum diketahui secara konkret, terdeteksi oleh panca indra.

Banyak hal membuat gamang sebuah proses transisi. Termasuk transisi pemerintahan. Boleh jadi karena itulah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober 2024 tak menggunakan istilah Tim Transisi. Yang ada, kata Prabowo, Tim Sinkronisasi dan Tim Asistensi.

Tim Sinkronisasi ini lebih terkait dengan perumusan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Beberapa kali Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan berkoordinasi dengan Tim Sinkronisasi ini dalam penyusunan APBN 2025.

Salah satunya, dalam rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Bu Menkeu menegaskan, penyusunan APBN 2025 melibatkan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Sinkronisasi. Dengan begitu, pemerintah saat ini mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan janji-janji kampanye maupun berbagai program.

Toh Menkeu Ani juga mengemukakan pentingnya APBN yang sehat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bu Menkeu mengakui terus mencari jalan tengah untuk tetap menjaga keseimbangan berbagai program mendatang.

Jalan tengah itu menjadi pilihan dari tarik-menarik antara program yang akan dijalankan dan ketersediaan anggaran untuk membiayainya. Bu Menkeu juga mengemukakan, jika keseimbangan ini terganggu, justru akan memicu krisis ekonomi.

Saat APBN tak berkesinambungan dalam arti lebih besar pasak dari tiang, lebih banyak pengeluaran dari penerimaan, ya sebanyak apapun anggaran, tetap saja terasa kurang. Lantas Menkeu Ani mengulang lagi jangan sampai Indonesia berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap.

Middle income trap menggambarkan situasi negara berpendapatan menengah tidak dapat bertransisi menuju negara berpendapatan tinggi. Penyebabnya, produktivitas tenaga kerja masih rendah, biaya produksi tinggi, dan produksi barang belum memiliki nilai tambah yang tinggi. Ringkasnya tak sanggup bersaing di tingkat global. Alhasil, pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standard hidup masyarakat tidak meningkat.

Indonesia ingin menghindari Middle Income Trap dengan mencapai status negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036-2038 sesuai visi Indonesia Emas 2045. Resepnya, investasi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sehingga mampu menggerakkan perekonomian.

Ini juga menimbulkan kegamangan. Terlebih lagi memang masih sedikit di antara kita yang memahami persoalan rumit ini. Namun, kita masih boleh berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menghapus kegamangan itu. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



SOAL PILKADA LANGSUNG (DAPAT) MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

Masih sekitar enam bulan menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang pemungutan suaranya terjadwal pada 27 November 2024. Namun, wacana pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menghambat pembangunan malah mengemuka. Apa sebenarnya yang terjadi?



Wacana itu bermula di Rapat Kerja antara Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dan Komisi II DPR.

Dalam raker yang berlangsung pada Senin, 10 Juni 2024 itu, konteks pembahasannya adalah perbandingan antara penjabat kepala daerah dan kepala daerah hasil Pilkada langsung.

Toh sebelumnya memang sudah berkembang wacana mengenai dampak positif-negatif pengangkatan penjabat kepala daerah. Baik itu Bupati, Wali Kota maupun Gubernur. Para penjabat (Pj) kepala daerah itu menggantikan pejabat yang dipilih melalui Pilkada namun sudah habis masa jabatannya sebelum berlangsung Pilkada serentak 2024.

Sejak pelantikan sejumlah Pj kepala daerah pada Mei 2022 lalu, memang banyak tanggapan miring tentang pengangkatannya. Antara lain, penurunan Pj kepala daerah dinilai kurang transparan dan tidak partisipatif. Setelah lima Pj gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 12 Mei 2022, tanggapan itu muncul antara lain melalui pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa seorang jenderal polisi yang baru pensiun dan belum berpengalaman dalam pemerintahan sipil bisa menjadi Pj Gubernur Papua Barat?

Pertanyaan lain, mengapa Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang orang sektoral bisa ditunjuk sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung. Selanjutnya, apa alasannya, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga diangkat menjadi Pj Gubernur Gorontalo?

Juga muncul pertanyaan, mengapa Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang pernah dicopot gubernurnya (Wahidin Halim) ditugaskan malah kemudian diangkat menjadi Pj Gubernur Banten. Tambahan pula, bagaimana dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menangani 542 daerah otonom seperti turun pangkat menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat? Yang terakhir ini kemudian beralih tugas menjadi Pj Gubernur Kalimantan Timur.

Masih banyak pertanyaan lain yang bisa dikemukakan. Namun, memilih ra-



tusan Pj kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota memang bukan soal mudah. Pada 2022 saja, tercatat 101 kepala daerah habis masa jabatannya. Selanjutnya pada 2023, meningkat jumlahnya menjadi 170 kepala daerah.

Untuk 2024 ada 187 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Namun, uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020.



Yang semula berakhir pada Desember 2024 menjadi berhenti saat kepala daerah baru hasil pilkada serentak 2024 dilantik. Dengan adanya putusan ini, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di 270 daerah akan menjabat lebih lama hingga beberapa bulan. Namun, ketentuan itu hanya berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak melewati lima tahun.

MK mengambil putusan ini karena memaksimalkan masa jabatan kepala daerah tanpa mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak adalah wujud keseimbangan hak konstitusional para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tak hanya itu, langkah tersebut juga memberikan kepastian hukum atas terselenggaranya pilkada serentak.

"Di samping itu, menjadikan waktu pelantikan sebagai batas masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat mendekatkan dan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) UU 10/2016," kata Hakim Konstitusi Saldi

rah itu. Wacananya ternyata sampai juga di parlemen, lembaga legislatif tempat para wakil rakyat menyuarakan aspirasi konstituennya.

Nah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menyebut 40 persen penjabat (Pj) kepala daerah yang sedang bertugas saat ini tidak layak dalam memimpin daerahnya masing-masing. Junimart menduga Kemendagri mengambil Pj kepala daerah ini dari kementerian lain sehingga kurang memahami bagaimana cara mengelola tata pemerintahan.

"Bukan hanya pengamatan. Yang kami dengar dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak jadi Pj. Kenapa bisa demikian? Mungkin stok di Kemendagri sudah habis, dan akhirnya mengambil dari kementerian lain. Yang Saudara Menteri tidak paham tentang pola pikir, dan mereka tidak paham mengenai tata kelola pemerintahan," ujar Junimart dalam Raker yang berlangsung Senin, 10 Juni 2024.

"Kalau tadi Saudara Menteri mengatakan bahwa untuk dua tingkatan Pj, ada pimpinan tinggi madya dan pimpinan



Isra saat membacakan pertimbangan, Rabu, 20 Maret 2024.

Sedangkan kuasa hukum pemohon, Donal Fariz, mengungkapkan, putusan MK tersebut membuat pemerintah tidak perlu lagi merekrut penjabat daerah di 270 daerah yang melaksanakan pemilihan pada 2020. Toh pengangkatan Pj sebelumnya tetap mendapat kritikan.

Alhasil, terjadi silang pendapat tentang positif-negatif penjabat kepala dae-

tinggi pratama; menurut kami ini bukan jadi patokan utama. Saudara Menteri dan harus lihat juga bagaimana track record dari para Pj. Apakah dia mampu, apakah dia memang paham?" sambungnya.

Junimart mengatakan pula, ada seorang Pj kepala daerah yang sebenarnya paham, tapi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan benar. Contohnya adalah Pj kepala daerah di Papua Barat

Daya. Junimart merasa orang itu sudah tidak bisa dipertahankan.

"Sangat mempermalukan bangsa dan negara ini, sangat mempermalukan Pak Jokowi juga. Bagaimana mungkin mendudukkan peletakan batu pertama itu bersejarah, tapi batunya tidak bersejarah. Pak Presiden meresmikan tentang ibu kota pemerintahan, batunya hilang dan sama sekali tidak ada progres sedikit pun di sana. Ini bagaimana Saudara Menteri dan PJU dan pak sekjen, para dirjen harus bisa menyikapi ini? Ini tidak boleh terulang," kata Junimart.

"Dan memang kami lihat terus terang Komisi II ke sana, pimpinan dan para kapoksi, Pj itu harus punya empati dan harus punya malu. Anggaran sangat besar satu koma sekian triliun APBD-nya, belum lagi bantuan dari pusat. Ini Sau-

sebagai putra asli Fakfak, Papua Barat, yang merupakan akademisi, dan birokrat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Waktu saya Kapolda Papua, dia adalah think tank (pemikir, red.) utama yang menjadi andalan di Provinsi Papua, dan orang yang sangat cerdas," ujamnya.

Oleh sebab itu, ia mengaku kaget ketika mendapatkan laporan kinerja yang kurang baik dari Musa'ad. "Saya langsung tegur keras sekali yang bersangkutan, termasuk juga saat batu (batu pertama peresmian kantor Gubernur Papua Barat Daya, red.) hilang itu saya keras sekali menegur, dan saya segera langsung ingatkan ke (penjabat) Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan," katanya.

Nah, dalam Raker itu berkembang pula

politik (parpol) para kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidakompakan. Dalam pandangan Tito, situasi itu menyebabkan pembangunan tak optimal dan merugikan masyarakat.

"Apalagi kalau partainya berbeda, satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," ungkapnya.

Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa situasi tersebut berbeda dengan para penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Alasannya, para penjabat ditunjuk langsung, bukan merupakan kader parpol, dan tak mengeluarkan biaya politik untuk menjadi pemimpin



dara Menteri ini mesti dicermati, kita tak perlu sebut nama tapi itu Papua Barat Daya," ujar Junimart yang juga menambahkan seorang Pj kepala daerah membutuhkan back up dari sekda yang lebih paham azas pemerintahan.

Menanggapi soal Papua Barat Daya, Mendagri Tito memohon maaf terkait kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad. "Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan," kata Mendagri.

la mengaku mengenal baik Musa'ad

wacana tentang positif-negatif Pilkada langsung. Untuk hal ini Mendagri mengemukakan Pilkada langsung bisa menghambat pembangunan. Menurut dia, Pilkada langsung kerap membuat hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota tak akur karena urusan politik.

"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik, karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota," ujar Tito.

la menyebutkan, perbedaan partai

suatu daerah.

"Karena mereka tidak punya biaya politik seperti teman-teman pilkada yang harus keluar biaya politik tinggi untuk bertarung, dan lain-lain... Ya mereka enggak boleh bermain-main seperti yang perlu biaya politik, mengembalikan biaya politik, ini kesempatan juga untuk mereka bekerja dengan baik," kata Tito.

Mendagri juga mengemukakan telah melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk menyeleksi calon penjabat kepala daerah yang ditunjuk. "Sudah melibatkan KPK (Komisi Pem-

berantasan Korupsi), kemudian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BIN (Badan Intelijen Negara), Kejaksaan Agung, Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri) untuk masalah hukum,” kata Tito.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan yang menyebut Kementerian Dalam Negeri telah kecolongan dengan adanya lima orang pejabat kepala daerah yang tersandung masalah hukum. “Cuma satu saja dari lima itu yang masalahnya terjadi di zaman dia (menjabat sebagai, red) Pj (penjabat kepala daerah), yaitu di Sorong (Yan Piet Mosso) kena OTT (operasi tangkap tangan) berkaitan dengan oknum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tetapi empat lainnya adalah peristiwa lama,” jelasnya.

Tito menduga peristiwa lama untuk

rong, pejabat bupati Bandung Barat, dan pejabat wali kota Tanjungpinang, terdapat mantan pejabat bupati Bombana dan pejabat bupati Kepulauan Tanimbar yang tersandung kasus hukum. Sebagai catatan, belum ada informasi Pj kepala daerah di Kalimantan yang tersandung masalah hukum. Terkait masalah hukum ini, konteksnya masih perbandingan antara kepala daerah hasil Pilkada langsung dan Pj yang menggantikannya.

Tanggapan datang dari Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspard Gaus yang menafsirkan pernyataan Mendagri Tito mengarah ke pandangan lebih baik kepala daerah tanpa Pilkada langsung. Ia menegaskan tidak setuju dengan usul Mendagri Tito Karnavian yang mengindikasikan tidak perlu ada pilkada

memerlukan biaya mahal.

“Ini jadi catatan penting bagi kita, kelemahan-kelemahan itu kita sisipi kepada hal-hal yang positif. Apa piranti-piranti daripada kelemahan-kelemahan itu. Bukan serta merta karena positif lebih banyak ditunjuk, lalu lebih baik kita tunjuk kepala daerah untuk periode berikutnya,” kata dia.

“Kalau ini yang kita lakukan, saya khawatir kita tidak bicara tentang itu saja. Demokratisasi adalah suatu keniscayaan,” ucap Guspard.

Guspardi mengakui bahwa pilkada memang menimbulkan polarisasi, keaduan, dan membutuhkan biaya yang mahal. Namun, ia mengemukakan seharusnya ada perbaikan terhadap pilkada yang selanjutnya akan dilakukan.

“Tolong ada referensi yang akurat



empat pejabat kepala daerah yang tersandung kasus hukum terjadi karena mereka diisukan akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. “Ada kecenderungan peristiwa itu diangkat kembali ketika yang bersangkutan angin-anginnya mau naik, ikut pilkada. Di Bandung Barat, misalnya, yang di Tanjungpinang kan masih camat. Peristiwa yang kita saja belum tentu tahu, catatannya juga mungkin enggak ada, baru munculnya saat ada laporan,” ungkapnya.

Selain mantan pejabat bupati So-

langsung supaya lebih hemat biaya.

“Saya berkehendak bahwa dengan adanya proses penunjukan itu, yang Bapak katakan tanpa biaya, tidak punya beban, dan sebagainya, saya tidak menginginkan ini adalah alat legitimasi bahwa kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi itu akan ditunjuk. Itu tegas saya ungkapkan,” ujar Guspard.

Menurut dia, lebih tepat jika pemerintah melakukan pembenahan terhadap demokratisasi di kontestasi pilkada. Alasannya, belakangan ini Pilkada kerap disebut menimbulkan polarisasi hingga

dalam rangka ke arah perbaikan terhadap pelaksanaan pilkada. Goal-nya ke situ. Bukan ke arah bahwa karena dilakukan studi perbandingan bahwa lebih bagus ditunjuk langsung dibandingkan pemilihan lalu goal-nya yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud pemerintah atau Mendagri,” ujar Guspard.

Wacana ini masih berlanjut. Dalam Raker itu Mendagri Tito mengemukakan akan segera mengkaji dengan metode ilmu pengetahuan. Bukan sekadar pengalaman empirik. •



MENYANGKUT DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH

Perbandingan antara Penjabat (Pj) kepala daerah dan kepala daerah hasil pilkada berkembang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian. Akhirnya akan terkait dengan desain besar penataan daerah (Desartada).

Masih dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR, sebenarnya Mendagri M Tito Karnavian sudah mengemukakan jalan tengah terkait silang pendapat mengenai Pj kepala daerah dan yang hasil Pilkada. Menurut dia, harus ada kajian dengan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data obyektif.

"Kita ingin membuat studi nantinya, semacam penelitian. Ini juga waktu untuk membandingkan, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini dengan kepala daerah yang hasil Pilkada. Kita ingin tahu juga.

Selama ini mungkin kita hanya berdasarkan pengetahuan empirik, pengetahuan yang belum didasarkan dengan metodologi," sambungnya.

Mendagri pun menyampaikan Ke-

menterian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera melakukan penelitian tersebut. Ia mengklaim, hasil temuan itu bakal disampaikan pada masyarakat, DPR, dan partai politik (parpol).

"Setelah itu kita enggak merekomendasi apapun, tapi kita akan memberikan masukan hasilnya kepada publik, kepada DPR, partai politik untuk melihat kajian itu apapun hasilnya," ujarnya.

Dalam pandangannya, publik juga harus mempertimbangkan mana yang lebih baik apakah kinerja penjabat atau kepala daerah hasil Pilkada. "Kalau yang hasil pilkada lebih bagus itu akan memperkuat sistem pemilihan rekrutmen melalui Pilkada. Kalau ternyata yang ini yang lebih bagus kelompok yang hasil rekrutmen penugasan itu juga perlu menjadi pertimbangan," ujarnya.



Tak urung, sebelum jalan tengah yang dikemukakan Mendagri mengenai perlunya kajian ilmiah, tanggapan sudah bermunculan. Tanggapan dari yang berlatar belakang lembaga kajian datang dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.

Ninis, nama ringkas Khoirunnisa, melihat pokok masalah menghambat pembangunan bukan lantaran kepala daerah ditunjuk atau dipilih. Menurut dia, desain keserentakan Pemilu membuat bentuk koalisi tidak sama dan sebangun antara pusat dan daerah. "Pusat dan daerah mencakup provinsi dan kabupaten-kota," ujarnya, Selasa, 11 Juni 2024.

Ia mengemukakan, Pilpres dan Pemilu legislatif 2024 yang mendahului Pilkada serentak justru membuat koalisi tidak sama dan sebangun. Karena itu, koalisi pada Pilpres belum tentu sama dengan koalisi paslon dalam pemilihan gubernur, begitu pula dengan pemilihan bupati dan wali kota.

"Pada Pileg, tak sedikit partai yang sekoalisi di Pilpres bersengketa mengenai penghitungan suara di Mahkamah Kon-

stitusi. Menjelang Pilkada, perkubuan itu cair kembali menyesuaikan dengan konfigurasi kursi DPRD masing-masing hasil Pileg 2024, guna membangun koalisi mendukung pasangan calon kepala daerah jagoannya," kata Ninis.

Ia juga menilai desain keserentakan pemilu dan pilkada perlu dievaluasi. "Sekarang desain keserentakan pemilu kita ada pemilu lima kotak, berlanjut

pilkada serentak di seluruh daerah. Konstruksi koalisinya dapat tidak sebangun antara pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Ninis.

Menurut kajian Perludem, kata Nini, penyelenggaraan pemilu sebaiknya dibagi untuk konteks nasional dan lokal. Pada pemilu nasional, pemilih hanya perlu mencoblos surat suara pilpres, pileg DPR RI, dan pileg DPD RI.



Sedangkan pada pemilu lokal, pemilihan akan memilih pasangan calon kepala daerah, pileg DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. "Jadi yang diserentakkan itu adalah eksekutif dan legislatifnya untuk setiap tingkatan, atau pemilu nasional-pemilu daerah. Jadi ada selang waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Tidak semua ditumpuk di tahun yang sama," ungkap Ninis.

Tanggapan lain datang dari Akbar Faisal yang pernah menjadi anggota parlemen. Menurut dia, yang disampaikan Mendagri Tito adalah pernyataan besar. "Ini pernyataan besar dan berani seorang menteri," ungkapnya melalui akun X (twitter).

Menurut dia, pernyataan Mendagri itu dapat dilihat sebagai seruan agar partai-partai politik mencalonkan pasangan

rakan surat Kemendagri bernomor 100.2.1.3/4444/OTDA per tanggal 13 Juni 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Plh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri Suryawan Hidayat.

Isi surat itu antara lain Pj Bupati Batu Bara saat ini Nizhamul bakal digantikan oleh Heri Wahyudi. Heri diketahui merupakan Sekda Labuhanbatu Selatan. Sedangkan Pj Bupati Palas saat ini Edy Junaedi Harahap bakal digantikan oleh Ardan Noor. Ardan Noor merupakan Kepala Badan Kesbangpol Sumut.

Sementara Pj Wali Kota Padangsidimpuan saat ini Letnan Dalimunthe bakal digantikan oleh Timur Tumanggor. Timur Tumanggor adalah Sekda Deli Serdang yang sedang menjabat.

Kabag Otda Setda Pemprov Sumut Harianto Butarbutar tidak menampik

memiliki wakil.

Di sisi lain, tahapan Pilkada serentak 2024 pun tetap berlanjut dengan dinamika masing-masing daerah. Selain itu, para pemangku kepentingan Pilkada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi pun sibuk dengan programnya.

Dari Surabaya, Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat menolak tegas pemberian uang atau imbalan dalam bentuk apapun di Pilkada serentak pada 27 November 2024. KPK menyelenggarakan upaya pencegahan korupsi terkait Pilkada dengan menggelar "Roadshow Bus KPK 2024".

"Roadshow Bus KPK 2024 adalah upaya kami untuk mencegah korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat peluncuran "Roadshow Bus KPK 2024" di Surabaya, Kamis, 13 Juni 2024.



Seharusnya parpol 'tersinggung' dengan cara memastikan kualitas personal Cakada yang diusungnya kelak orang yang memang layak

Bus itu berisi berbagai informasi yang disampaikan secara digital maupun dapat dibaca dalam bentuk buku yang mengedukasi masyarakat terkait pencegahan korupsi. Johanis mengungkapkan melalui kegiatan ini, momentum yang terdekat adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 yang jujur, bersih dan berintegritas.

"Salah satunya agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah dengan menerima imbalan apapun. Termasuk masyarakat harus tegas menolak 'serangan fajar'," ujarnya.

Johanis menjelaskan bagi Calon Kepala Daerah yang memberikan sesuatu kepada rakyat saat pemilihan adalah awal dari suatu tindak pidana yang akan dilakukan di kemudian hari. "Ketika dia terpilih maka akan mengu-



yang memiliki kompetensi dan berkualitas. "Seharusnya parpol 'tersinggung' dengan cara memastikan kualitas personal Cakada yang diusungnya kelak orang yang memang layak," ujarnya.

Ia mengakui, sejauh ini banyak calon yang maju dalam Pilkada memiliki kualitas rendah. "Dalam banyak catatan Pilkada langsung, mayoritas berkualitas parah. @titokarnavian_ @kemendagri," tambahnya.

Toh apapun tanggapan yang muncul, Pj Kepala Daerah yang ditunjuk akan memudahkan penggantian jika hasil evaluasi mengarah ke sana. Beberapa hari setelah Raker di DPR misalnya, terbetik kabar tiga Pj kepala daerah tingkat kabupaten di Sumatera Utara akan diganti.

Pergantian Pj bupati itu berdas-

soal kabar tersebut. Namun dia menegaskan kepastian soal itu setelah adanya pelantikan. "Ya kabar-kabar lah itu, kalau betulnya dilantik dulu," kata Harianto Butar Butar, Jumat, 14 Juni 2024.

Harianto mengaku masih menunggu SK dari Mendagri. Pihaknya bakal menjadwalkan pelantikan. "SK nya masih di Jakarta, udah disuruh ambil, tapi masih menunggu menjadwalkan pelantikan," ujarnya.

Berbeda dengan pemberhentian kepala daerah hasil Pilkada yang dipilih langsung, tidak bisa serta merta melalui SK pejabat di atasnya tapi mengikuti aturan UU khusus yang mengaturnya. Misalnya berhalangan tetap atau tersangkut pidana sehingga wakil kepala daerah pasangannya yang akan menggantikan. Sedangkan Pj kepala daerah tidak

payakan bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan,” katanya.

Kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi, kepala daerah terpilih seringkali meminta kewajiban setoran kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau mau jadi Kepala OPD, tapi begini, harus bayar berapa dulu, nah...,” ujarnya, mencontohkan.

Peluncuran “Roadshow Bus KPK 2024” di wilayah Jawa Timur yang dipusatkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Daerah di wilayah provinsi setempat. Dalam kesempatan itu, setiap kepala daerah di Jawa Timur diminta untuk turut mengedukasi warganya terkait upaya pencegahan korupsi, salah satunya agar tidak menerima imbalan dari calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi upaya pencegahan korupsi terhadap masyarakat melalui “Roadshow Bus KPK 2024”. “Sulitnya kalau terkait politik uang di Pilkada itu kan Pemerintah Provinsi tidak bisa mengintervensi masing-masing pribadi masyarakat untuk benar-benar menolaknya,” kata Adhy.

Meski begitu, sebagai Pj Gubernur ia menegaskan ranahnya adalah aparatur sipil negara. “Setiap ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bersikap netral di Pilkada 2024,” tandasnya.

Lebih dari sekadar pemberantasan korupsi, wacana perbandingan pejabat kepala daerah ditunjuk atau diangkat dengan yang dipilih melalui Pilkada boleh jadi ada kaitannya dengan banyak keinginan pemekaran daerah. Jika lebih banyak lagi daerah otonomi provinsi, kabupaten maupun kota, sudah akan memerlukan penyesuaian fiskal (anggaran).

Komisi II DPR pun sebenarnya sudah meminta Kemendagri untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan daerah, dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Permintaan tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk meninjau kembali kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Sebagai jawabannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan mengkonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Tentu kami juga akan konsultasi kepada Presiden terpilih. Kira-kira perlu enggak kita membuat desain besar ini? Formatnya kira-kira seperti apa?” kata

hanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Ia mengaku tidak mudah untuk menyusun desartada, yakni menyusun Indonesia untuk dibagi menjadi be-



Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Mendagri Tito mengatakan, konsultasi tersebut akan dilakukan seiring dengan Tim Perumus Desartada yang sudah dibentuk tetap bekerja untuk membuat rancangannya. Ia menjelaskan pula bahwa Kemendagri telah membuat tim perumus tersebut maupun mengadakan rapat membahas desartada sejak 2022.

Menurut Mendagri rapat dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Perta-

rapa provinsi, kabupaten, maupun kota. “Apalagi permintaannya banyak sekali. Kami mungkin menampung lebih dari 300 usulan-usulan provinsi, kabupaten, kota,” ujarnya.

Alhasil, soal desain besar penataan daerah, termasuk bagaimana mengisi posisi kepala daerah apakah melalui Pilkada maupun ditunjuk, akhirnya akan dibawa juga kepada kepala pemerintahan, Presiden terpilih. Pada saatnya pembahasan yang lebih serius akan terjadi. Sesudah Pilkada serentak 2024 tentunya. •

MASIH ADA JOKOWI DI PILKADA 2024

Proses pemilihan kepala daerah berjalan terus. Hingga 27 Agustus 2024, penentuan pasangan calon merupakan arus utama bagi para pemangku kebijakan maupun kepentingan.

Ya, hingga Kamis, 27 Agustus 2024, akan semakin jelas siapa berpasangan dengan siapa dan akan bersaing di mana dalam pemilihan kepala daerah serentak. Pada tanggal itulah Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan pendaftaran pasangan calon untuk bersaing dalam Pilkada serentak 2024.

Sebelum tanggal itu, saling penjajakan, bongkar-pasang, dan perkembangannya masih akan berlangsung. Prosesnya melibatkan para pemangku kebijakan, elite politik pengambil keputusan menetapkan pasangan calon, yakni partai-partai politik di tingkat pusat.

Sedangkan para pemangku kepentingan, para bakal calon kepala daerah maupun wakilnya untuk jabatan gubernur, bupati, dan wali kota, akan beru-

paya untuk menemukan pasangan masing-masing dan mendapat surat penetapan sebagai pasangan calon dari partai-partai pengusungnya.

Memang, ada pasangan calon independen yang tak memerlukan penetapan calon dari partai-partai politik. Namun, jumlahnya tak sampai hitungan jari tangan dibandingkan dengan jumlah wilayah pemilihan yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Penetapan pasangan calon independen dilakukan oleh KPU masing-masing wilayah pemilihan jika memenuhi syarat dukungan minimal berupa jumlah salinan kartu penduduk pendukungnya.

Jadi, penetapan pasangan calon oleh partai-partai politik pengusung yang akan menjadi arus utama dinamika menjelang Pilkada serentak 2024.



Begitulah, maka pasangan calon di wilayah penting secara ekonomi maupun politik, misalnya di Pulau Jawa, menjadi lebih seru dan boleh jadi mengesankan. Di luar Jawa, Sumatera Utara juga penting secara ekonomi politik.

Untuk Sumatera Utara, Gubernur periode 2018-2023 Edy Rahmayadi berniat maju kembali untuk periode kedua. Ia telah mendaftarkan pencalonannya ke delapan partai politik: PDIP, PKS, PKB, Demokrat, Nasdem, Perindo, PAN, dan Hanura.

Ia mengemukakan tiga alasan yang mendorong pencalonannya untuk jabatan Gubernur Sumut periode 2024-2029. "Pertama saya diberikan kesempatan dua periode untuk memimpin Sumut. Kedua banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Ketiga apabila diizinkan rakyat untuk amalan membangun Sumut," ungkap Edy saat mendaftar di Kantor DPD Hanura Sumut, Kamis, 16 Mei 2024.

Edy juga mengungkapkan, pada 2018, Hanura ikut mendukungnya di Pilkada Gubernur Sumut. Ia berharap Hanura mendukungnya lagi pada pemilihan gubernur 2024.

"Partai Hanura ini bukan hanya sekali ini mengusung saya, tapi sudah sejak 2018, saat itu Hanura punya enam kursi sekarang lima kursi. Tetapi bukan soal kursi tapi doanya itu yang penting," ungkap Edy.

Setelah menerima pendaftaran Edy, Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur Sumut dari DPD Hanura, Syaiful Amri mengatakan akan menyerahkan berkas ke DPP Hanura untuk proses penjaringan. "Berkas diajukan ke DPP dan melakukan proses penjaringan dan penyeleksian. Kemudian (diuji) komitmen-komitmen bakal calon yang mana yang bisa memperjuangkan nilai-nilai yang dianut oleh Hanura," tandas Syaiful.

Nah, sementara DPP Hanura memproses, PKB malah sudah memanggil Edy untuk mengikuti uji kelayakan sebagai calon gubernur pada Selasa, 11 Juni 2024. Ia mengaku ditanya soal visi misinya untuk Provinsi Sumut lima tahun ke depan.

Toh Edy belum menyebut bakal pasangan yang akan mendampingi sebagai calon wagubnya. "Kayak mau nikah kan kita pacaran dulu, akhirnya

jatuh hati. Nah, yang paling jatuh hati itu akhirnya ke mana, di situlah kita nikah," ungkapnya.

Edy malah menegaskan siap maju di Pilkada Sumut siapapun pesaingnya. Di acara uji kelayakan PKB itu pula Edy menyatakan siap bersaing dengan Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo.

"Saya sama siapa pun, jangan kan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan," ujarnya.

Edy yang pernah menjabat Ketua Umum PSSI dan juga Pangkostrad ini optimistik sanggup bersaing dengan Bobby. "Kalau tidak optimis, saya tidak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis," ujar dia.

Apa yang dikemukakan Edy memang terkait dengan pengaruh bahkan posisi Presiden Joko Widodo dalam Pilkada serentak 2024. Itu bukan hanya terjadi di Sumatera Utara, melainkan juga di DKI Jakarta. Malah di Jakarta, kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Utara.

Di Jakarta, Kaesang Pangarep, putra



Presiden Joko Widodo, menjadi perhatian karena namanya masuk bursa dalam pemilihan gubernur. Nama adik Gibran, Wakil Presiden terpilih di Pilpres 2024 ini melejit setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang memerintahkan KPU mengubah syarat batas usia calon kepala daerah.

Melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, ketentuan soal syarat usia calon kepala daerah berubah dari semula minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan, menjadi usia 30 tahun terhitung setelah pelantikan pasangan terpilih.

MA pun memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat

tang dari PKB yang secara resmi mengusung Anies.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengungkapkan rapat kerja DPW PKB DKI Jakarta pada 8-9 Juni 2024 memutuskan mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. "Saya sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta mendengar aspirasi dari tingkat ranting, PAC (pengurus anak cabang), DPC (dewan pengurus cabang) sampai DPW. Dan hasil verifikasi dari desk pilkada, maka DPW PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Rasyid Baswedan menjadi calon tunggal Pilkada 2024-

hingga genap minimal 22 kursi untuk mencalonkan Anies.

Jadi, kata Hasbiallah, PKB berkomunikasi dengan sejumlah partai terkait Pilkada DKI Jakarta, salah satunya PSI. Soal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Anies, kata Hasbiallah, pada prinsipnya PKB terbuka kepada siapa pun.

Hasballah mengakui PKB akan berkomunikasi secara khusus dengan PSI karena mengharapkan Kaesang bisa menjadi pendamping Anies. "Insya Allah, kami besok komunikasi dengan PSI. Mudah-mudahan Anies-Kaesang," tandasnya.

Namun, memasang Anies den-



(1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Meski begitu pencalonan Kaesang memang njelimet, rumit. Yang terang-benderang, arah pencalonannya adalah untuk mengisi posisi calon wakil gubernur. Namun, siapa calon gubernurnya yang tak mudah untuk memasangkannya dengan Kaesang yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sudah muncul upaya memasang Kaesang dengan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2023. Setidaknya kemungkinan itu da-

2029," kata Hasbiallah Rabu, 12 Juni 2024.

Keputusan mengusung Anies bukan tanpa alasan. PKB, kata Hasbiallah, telah melakukan survei dan hasilnya popularitas serta elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup signifikan. "Kami harus realistis. Kami sudah melakukan survei dan paham bahwa DKI Jakarta memerlukan Anies Baswedan. Dan ini perlu dipertahankan karena memang supaya pembangunan tidak stack," ujarnya.

Toh, PKB sebenarnya tidak bisa mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dengan 10 dari 106 kursi di DPRD DKI, PKB harus berkoalisi dengan partai lain

gan Kaesang juga bukan hal mudah, betapapun putra Presiden itu tak berkeberatan. "Kalau saya ditanya siap atau enggak (dengan Anies), ya harus siap, siap juga (dengan RK). Saya balik lagi, namanya politik kita ya enggak masalah kok dengan siapa pun," kata Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Sedangkan Anies cenderung resisten jika sulit menyebutnya diplomatis. Menurut Anies, saat ini belum ada pembahasan soal nama bakal calon wakil gubernur.

"Menurut saya tidak penting membahas nama sekarang, karena fase pembahasannya itu hari ini prematur," ujar Anies Jumat, 14 Juni 2024. Yang terpenting,

sambungannya, adalah menyampaikan visi dan misi yang bakal dicapai jika kembali memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Nah, dalam pandangan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan ada dua kunci soal siapa yang bakal dipasangkan dengan Anies. Pertama, sosok tersebut harus bisa menutupi kekurangan Anies di Jakarta.

"Soal pendamping Anies kuncinya dual hal. Pertama punya elektabilitas tinggi dan mampu menutup kekurangan Anies serta bisa mengunci kemenangan," kata Adi Prayitno, Jumat, 14 Juni 2024.

Selanjutnya, sambung Adi, sosok

"Pada level elite yang di belakang Kaesang terlihat menolak duet dengan Anies. Begitupun pada level elektabilitas Kaesang belum kelihatan signifikan. Tapi yang utama tentang Kaesang dan Anies ini terletak pada elite dua kubu yang bertolak belakang," imbuhnya.

Jika menyebut elite kedua kubu, maka kaitannya tentu dengan posisi Presiden Jokowi sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran yang bersaing dengan Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024. Dua kubu yang saling berseberangan. Terlebih lagi, sebelumnya beredar informasi bahwa pada akhir Mei 2024 Presiden Jokowi sudah berupaya mengkonsolidasi partai-partai politik

Meski masih kemungkinan, Eddy mengemukakan Kaesang akan berpasangan dengan Ridwan Kamil. "Kemungkinan besar bisa saja terjadi kombinasi antara pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Mas Kaesang Pangarep," ujarnya.

Di sisi lain, ada pula upaya uji materi putusan MA yang membatalkan aturan batas minimal usia calon yang maju di Pilkada. Dua orang mahasiswa, Fahrul Rozi dari UIN Syarif Hidayatullah dan Antony Lee dari Podomoro University, mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi (MK) memberlakukan tafsir yang jelas terhadap syarat usia calon kepala daerah, yakni terhitung saat pen-



tersebut harus mendapat persetujuan dari partai-partai yang mau mengusung Anies. Sejauh ini, baru DPW PKB DKI Jakarta yang menyatakan dukungan ke Anies. Keputusan akhir soal calon Gubernur berada di tangan pengurus pusat masing-masing partai. "Kedua, disetujui elite partai pengusung. Apapun Anies tak bisa maju hanya dengan PKB, butuh tambahan partai lain," ujarnya.

Dia mengatakan dua hal itu membuat Anies tak akan cocok jika dipasangkan dengan Kaesang. Dia menilai elite di belakang Anies dan Kaesang saling bertolak belakang. "Dari dua alasan itu Kaesang tak cocok dengan Anies," ucapnya.

pendukung Prabowo-Gibran terkait Pilkada serentak 2024.

Nah, boleh jadi awal yang menjauhkan Kaesang dari kemungkinan berpasangan dengan Anies adalah manuver Partai Amanat Nasional yang berada di barisan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menyampaikan, partainya berharap duet Ridwan Kamil-Kaesang bisa segera diumumkan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam waktu dekat.

"Kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan mengusung bersama-sama pasangan calon di Daerah Khusus Jakarta yang akan kita umumkan," kata Eddy Senin, 17 Juni 2024.

etapan calon.

"Sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020," sebagaimana tertuang dalam dokumen permohonan Fahrul dan Antony.

Yang pasti, pengaruh dan posisi Presiden Jokowi masih mewarnai Pilkada 2024. Sedangkan siapa berpasangan dengan siapa dan akan bersaing di mana, tetap harus menunggu saat pendaftaran ke KPU pada 27-29 Agustus 2024. •

LIPUTAN INVESTIGATIF DAN EKSKLUSIVITAS

Draf Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sedang dibahas Badan Legislasi DPR menuai protes dari berbagai kalangan, khususnya komunitas pers di Indonesia.

Dewan Pers dan sejumlah organisasi pers secara tegas menolak draf Revisi UU Penyiaran tersebut, terutama terkait beberapa pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers.

Pasal-pasal yang dimaksud, salah satunya Pasal 50B Ayat (2) Huruf (c) yang menyatakan larangan terhadap penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi.

Dalam jumpa pers di Jakarta, 14 Mei 2024, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengungkapkan, draf Revisi UU Penyiaran tidak memasukkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai salah satu konsiderans. Tentang larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, Ninik mengingatkan bahwa sejak ada UU Pers, kita tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan karya jurnalistik.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Herik Kurniawan, menyatakan, jurnalisme investigasi adalah dasar jurnanisme. Oleh sebab itu, larangan penayangan jurnanisme investigasi akan merugikan publik karena mereka hanya akan memperoleh informasi "ala kadarnya".

Kritik serupa disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Nany Alfrida. "Rencana menegasikan jurnanisme investigasi itu di luar nalar saya, jurnanisme investigasi itu strata tertinggi dari jurnanisme, tidak semua orang bisa," ujarnya (Kompas, 15/5/2024).

Pasal lain dalam draf Revisi UU Penyiaran yang menuai kritik adalah Pasal 8A Ayat (1) Huruf (q) yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Pasal ini dinilai tumpang tindih dengan salah satu tugas Dewan Pers yang dimandatkan oleh UU Pers, yakni menyelesaikan perkara-perkara pers atau menyangkut karya jurnalistik.

Bukan hanya itu, penyelesaian sengketa jurnalistik oleh KPI dianggap sebagai bentuk intervensi negara dalam sengketa pers yang merupakan ranah etik. Hal itu mengingat bahwa KPI merupakan lembaga yang dibentuk dan para anggotanya (komisioner) dipilih melalui proses politik di DPR. Sedangkan, Dewan Pers merupakan lembaga independen yang para anggotanya mewakili unsur pers dan masyarakat yang dipilih oleh komunitas pers sendiri.

Karya Jurnalistik Investigatif

Pelarangan tayangan (eksklusif) karya jurnalistik investigasi memang patut dipertanyakan. Karena, bahkan di masa politik represif Orde Baru pun tidak ada peraturan yang eksplisit melarang penyiaran berita investigatif.

Kalau saat ini, ketika kemerdekaan pers secara tegas dijamin

Oleh: Winarto
Tenaga Ahli Dewan Pers

oleh undang-undang, yaitu UU Pers, justru muncul ide untuk melarang tayangan karya jurnalistik investigasi tentu perlu dipertanyakan motif dan latar belakangnya.

Apa yang salah dengan berita-berita investigatif?

Bagi kebanyakan jurnalis atau wartawan, melakukan peliputan investigatif adalah tugas sangat menantang. Karya jurnalistik investigatif menjadi penanda tingkat kompetensi seorang jurnalis.

Membuat laporan investigatif menuntut jurnalis memiliki kemampuan lebih daripada yang dibutuhkan untuk menulis berita biasa, berita keseharian yang sekadar menyampaikan fakta apa adanya. Membuat berita investigatif bertujuan mengungkap kebenaran di balik sebuah fakta karena tidak semua fakta yang tergelar menggambarkan apa yang sebenarnya berlangsung.

Jurnalis investigasi melihat setiap fakta secara kritis dan skeptis untuk mempertanyakan apakah ada data, informasi, dan fakta lain yang tersembunyi atau disembunyikan. Apakah ada data, informasi, dan fakta lain yang sengaja ditutup-tutupi untuk mengaburkan kenyataan sebenarnya dan menghilangkan jejak kejahatan yang mungkin terjadi.

Untuk itu, jurnalis investigasi dituntut mempunyai kekayaan pengetahuan guna memahami objek peliputan investigasi dengan baik. Jurnalis investigasi juga dituntut memiliki pengalaman liputan yang cukup untuk antara lain menembus narasumber yang biasanya tidak mudah ditemui dan tidak gampang menyampaikan informasi, data atau dokumen yang dimiliki.

Selain itu, sudah tentu dibutuhkan keterampilan teknis bagi jurnalis investigasi untuk mencermati dan mengolah informasi, data, dan dokumen yang diperoleh menjadi laporan yang komprehensif, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti, seluruh temuan yang mendukung fakta yang terjadi sudah melalui proses verifikasi ketat dan memenuhi standar etik kerja jurnalistik yang berlaku.

Karena cukup banyak tuntutan kemampuan yang harus dipenuhi, tidak sembarang jurnalis mampu melakukan peliputan investigasi. Pun, tidak semua wartawan bersedia melakukannya karena peliputan investigasi menggamit berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan wartawan ataupun institusi medianya.

Keberhasilan membuat laporan investigatif merupakan capaian prestasi tersendiri bagi seorang jurnalis dalam perjalanan karirnya. Lebih-lebih ketika hasil liputan investigatif mereka mendapat penghargaan bergengsi seperti Pulitzer.

Bagi institusi media, laporan investigatif akan mengangkat citranya sebagai media yang kredibel, sebagai media rujukan bagi publik dalam mengungkap kebenaran. Dapat dimengerti bahwa media bersedia mendukung wartawannya melakukan peliputan investigatif meskipun membutuhkan biaya yang sering kali tidak kecil dan menghadapi berbagai risiko bagi keselamatan dan keamanan jurnalis ataupun media yang bersangkutan.

Namun, di luar nilai kredit yang akan diperoleh media dan individu jurnalis, penayangan laporan investigatif terutama dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik.

Liputan investigasi biasanya menyasar kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan penguasa, perilaku korup pejabat publik, dan berbagai kejahatan oleh korporasi, organisasi politik, atau kelompok-kelompok kepentingan kuat, sebagai objek peliputan. Selain itu juga kasus-kasus kejahatan terorganisasi, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia (human trafficking), pemalsuan obat, dan sebagainya.

Media merasa perlu mengungkapkan kasus-kasus semacam itu agar menjadi perhatian publik, selanjutnya mendesak pemegang otoritas yang berkompeten untuk segera menangani kasus-kasus tersebut secara transparan dan berkeadilan. Dengan demikian, liputan investigatif diharapkan dapat membawa dampak (impact) yang baik bagi publik.

Di Indonesia, kita mengenal beberapa media yang sering menyiarkan laporan-laporan investigatif berkualitas, seperti majalah Tempo, The Jakarta Post, tirto.id, suara.com, kumparan.com, juga harian Kompas yang belakangan menyebut secara eksplisit berita investigatif di bawah label Liputan Investigasi. Demikian pula beberapa media penyiaran televisi mempunyai program khusus berita investigatif.

Liputan investigatif adalah bentuk kontrol sosial media yang paling nyata dan sangat penting. Penayangan liputan investigatif di media platform apa pun, baik media cetak, penyiaran, maupun media siber selayaknya didukung dan diapresiasi, bukan justru dilarang dan dimatikan.

Tayangan Eksklusif

Dimintai konfirmasi tentang larangan tayangan berita investigasi, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menyatakan tidak ada larangan tentang hal itu. "Tidak ada semangat larangan tayangan investigasi jurnalistik. Yang dilarang (adalah) monopolinya," kata Meutya.

Sayangnya, Meutya tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan monopoli tersebut.

Meutya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "monopoli" adalah tayangan secara "eksklusif" oleh satu media seperti bunyi ketentuan pada Pasal 50 B Ayat (2) Huruf (c) pada draf Revisi UU Penyiaran? Kalau memang demikian, apakah larangan tersebut ditujukan pada aspek "eksklusivitas" penayangan karya jurnalistik investigasi?

Dalam draf Revisi UU Penyiaran tidak ada penjelasan tentang hal itu. Oleh sebab itu, bunyi pasal ini bersifat multitafsir dan berpotensi disalahtafsirkan.

Berbagi hasil liputan investigatif seperti itu kiranya berbeda dari bentuk kolaborasi atau kerja sama antar-media untuk memproduksi liputan investigatif.

Namun, lepas dari makna kata monopoli dan eksklusif, larangan penayangan karya jurnalistik tentu tidak dapat diterima karena bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi dan UU Pers. Juga, apabila larangan itu ditujukan pada aspek "eksklusivitas" penayangannya tentu tidak dapat diterima.

Tidak logis meminta sebuah institusi media membagikan hasil liputan investigatif kepada media lain dengan sukarela, padahal dia telah mengeluarkan tenaga dan biaya besar, waktu tidak sebentar, dan dengan susah payah penuh risiko untuk memproduksi liputan investigatif tersebut. Selain itu, bukankah setiap institusi pers mempunyai agenda setting sendiri? Membuat angle

berita yang tidak sama dengan media lain?

Berbagi hasil liputan investigatif seperti itu kiranya berbeda dari bentuk kolaborasi atau kerja sama antar-media untuk memproduksi liputan investigatif. Kolaborasi antar-media dalam peliputan investigasi dimaksudkan untuk berbagi tugas dan beban kerja, biaya produksi, dan juga risiko. Hal ini dilakukan ketika kasus yang diliput memiliki lingkup liputan yang luas, menjangkau wilayah lintas daerah atau lintas negara,

persoalan yang rumit dan mengandung risiko tinggi.

Majalah Tempo, misalnya, pernah berkolaborasi dengan media Malaysia Kini, membuat laporan investigasi tentang perdagangan orang (human trafficking) dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia, ke Malaysia. Hasil liputan yang dimuat di majalah Tempo edisi 20 Maret 2017 tersebut memperoleh penghargaan Honorable Mention dari The Society of Publisher in Asia (SOPA) yang berbasis di Hong Kong (Mardiyah Chamin, "Jurnalisme Investigasi dan Aliansi Orang Sadik", dalam Purwanto Setiadi dkk, Menjadi Wartawan Investigasi, Jakarta: Tempo Institute, 2019).

Kolaborasi antar-media, antar-daerah, dan antar-negara seperti inilah yang justru perlu dikembangkan, terutama untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan, seperti biaya, tenaga, dan yang lebih penting untuk berbagi risiko dalam hal meliput kasus-kasus yang berisiko tinggi.

Pada era digital seperti sekarang, ketika wacana publik didominasi oleh media sosial, kebenaran semakin susah ditemukan, penyajian liputan liputan investigatif semakin relevan untuk mengawasi perilaku kekuasaan agar senantiasa searah dengan jalan demokrasi dan keadilan. ●





SUKSES TINGKATKAN PRODUK PERTANIAN

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mengucurkan bantuan senilai Rp 1 triliun untuk meningkatkan produksi pertanian di Sumatera Selatan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahkan memuji Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni karena menjadi kepala daerah paling rajin menghubunginya guna kemajuan daerahnya.

"Pj Gubernur Sumsel ini, beliau rajin telpon makanya bantuannya kita kirim Rp 1 triliun ke sana," ucap Mentan dalam Rakor Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Mentan menyebut Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah yang cukup besar yaitu seluas 200.000 ha.

"Daerah Sumatera Selatan, itu areal di sana cukup besar. Ini Sumatera Selatan ada 200.000 hektar di sana ada anggarannya Rp 800 miliar hampir Rp 1 triliun hanya untuk Sumatera Selatan," kata Mentan.

Selain itu, Mentan mengapresiasi Bupati

dan Gubernur yang hadir langsung dalam kesempatan ini. Dirinya memberikan sejumlah bantuan kepada daerah yang Kepala Daerahnya jauh-jauh datang ke Jakarta menghadiri Rakor tersebut, termasuk Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni.

"Kami sudah menganggarkan bantuan pompa sebesar Rp 10 triliun lebih. Gubernur yang hadir langsung, Bupati yang hadir langsung tambahkan itu bantuannya, jangan Bupati dan Gubernur yang hadir langsung sama dengan yang online," ucap Mentan.

Mentan menyebut, Bupati dan Gubernur yang hadir langsung diberikan 200 unit traktor roda dua dan 50 unit traktor roda empat. Sementara itu, khusus untuk Gubernur yang hadir juga diberikan

bibit jagung guna program penanaman jagung seluas 10.000 hektar.

Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menerima secara simbolis nota kesepahaman terkait program cetak sawah dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyerahan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Tak hanya Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah daerah juga termasuk dalam program cetak sawah tersebut. Di antaranya, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan

menyebut saat ini Provinsi Sumatera Selatan tahun ini telah melakukan optimalisasi lahan seluas 98.000 hektar dan akan terus berjalan.

"Untuk penambahan lahan sendiri sesuai arahan Bapak Menteri, kami siap karena lahannya sudah cukup, lahannya ada bahkan datanya sudah lengkap. Jadi Sumatera Selatan sangat siap untuk bisa melaksanakan optimalisasi lahan," kata Faton.

Optimalkan Lahan Rawa

Pemprov Sumsel segera mengoptimalkan lahan rawa seluas 98.400 hektar pada semester I tahun 2024. Angka tersebut merupakan bagian dari target pemerintah pusat seluas 400.000 hektar di Indonesia.

Optimalisasi lahan (opla) rawa seluas 98.400 hektar pada semester I di Sum-

Tentunya angka tersebut diharapkan terus meningkat setiap tahunnya sebagaimana tiga tahun terakhir produksi dan produktivitas padi Sumsel terus meningkat.

Sedangkan untuk tahun 2025 mendatang Pemerintah Pusat kembali melakukan program Cetak Sawah Baru. Sumsel kembali ditargetkan mendapat-

tan olah tanah tahun ini belum optimal.

Hal ini dikarenakan kondisi alam dan curah hujan yang sangat tinggi dimana hampir seluruh lawah rawa lebak masih tergenang banjir.

"Untuk itu Sumsel mendapatkan kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) padi melalui kegiatan Pompanisasi irigasi perpompaan, dimana untuk kegiatan



Pj Gubernur Sumsel ini, beliau rajin telpon ma-kanya bantuannya kita kirim Rp 1 triliun ke sana.

sel akan dialokasikan di lima Kabupaten. Di antaranya Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Muara Enim dan Kabupaten Banyuasin.

Dimana berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumsel menargetkan seluas 101.600 hektar lagi pada semester II. Sehingga total optimalisasi lahan rawa di Sumsel sejumlah 200.00 hektar.

Penambahan luas lahan ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan rawa dengan fokus kegiatan penyiapan lahan dan pembangunan/rehab konstruksi yang dapat menata air. Hal tersebut dibutuhkan untuk kegiatan penanaman sehingga setelah kegiatan ini selesai intensitas pertanian dan produktivitas padi di Sumsel akan meningkat.

Sebagaimana diketahui, produksi padi Sumsel tahun 2023 sebesar 2.832.774 Gabah Kering Giling (GKG) sedangkan untuk tahun 2024 ditargetkan produksi padi akan menjadi 3.103.481 ton GKG.



kan alokasi sebesar 300.000 hektar sehingga produksi 1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) segera tercapai.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan R Bambang Pramono mengakui kegiatan optimasi lahan rawa dan kegia-

pompanisasi di 17 Kabupaten/Kota rencananya akan direalisasikan sebanyak 3.255 unit dan irigasi perpompaan sebanyak 68 Unit. Dimana seluruh kegiatan Optimasi lahan dan PAT akan berdampak pada produksi padi di Sumsel," jelas Bambang. •

BANYAK LAKUKAN TEROBOSAN DAN INOVASI

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni tak hentinya melakukan terobosan dan inovasi dalam banyak hal. Hal tersebut membuatnya menerima penghargaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan apresiasi BKKBN atas pencapaian yang telah dilakukan.

Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari IPDN diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Profesor Hadi Prabowo di Balairung Jenderal Rudini Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.

Menurut Profesor Hadi, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang juga sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan. Terutama dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Inovasi ini dijadikan acuan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan satu sistem untuk perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

secara transparan dan akuntabel," terangnya.

Kemudian, Profesor Hadi menilai Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni telah banyak memberikan perhatian dalam pengembangan karir para alumni IPDN. Selain itu juga melakukan sejumlah terobosan dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumsel sehingga mendapatkan respon positif bagi masyarakat Sumsel.

"Kami ucapkan terima kasih juga karena hari ini Pj Gubernur Sumsel telah menyerahkan hibah kepada IPDN berupa perangkat Sound System," ucap Profesor Hadi.

Sosok Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menurutnya merupakan alumni IPDN angkatan 03 yang telah banyak memberikan perhatian, terutama dalam

pengembangan karir para alumni IPDN. Dalam kesempatan ini, Profesor Hadi mengucapkan selamat dan sukses kepada penerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya.

"Beliau adalah alumni angkatan 03 dan apa yang diberikan kepada lembaga pengembangan kelembagaan IPDN itu sudah banyak sekali, antara lain didalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana IPDN," ucapnya.

Selain Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, penghargaan Kartika Pamong Praja Muda dan Alumni Kehormatan juga diberikan kepada Bupati Bengkalis, Pj Walikota Lubuklinggau, Bupati Musi Rawas dan Bupati Karawang.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni did-



ampingi Pj Ketua TP PKK Tyas Fatoni mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPDN atas penghargaan yang baru saja diberikan.

"Ini tanggung jawab saya sebagai alumni dan sebagai birokrat di pemerintahan untuk terus melakukan yang terbaik, memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, masyarakat dan juga almamater tercinta," kata Fatoni.

Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi dukungan moril bagi dirinya bersama seluruh stakeholder di Sumsel untuk terus melakukan sejumlah terobosan lebih banyak lagi di masa mendatang.

"Tidak hanya itu, untuk kita melakukan inovasi demi mensejahterakan masyarakat Sumsel dan juga kemajuan

bangnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni juga berterima kasih atas apresiasi yang disampaikan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo. Dalam kesempatan ini, Fatoni juga kembali mencanangkan Gerakan Penanganan KB Serentak se-Sumsel.

"Jadi hari ini di Sumsel dicanangkan Gerakan Penanganan KB Serentak se-Sumatera Selatan," ucap Fatoni.

bisa menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang sejahtera dan tentu juga dengan anak-anak yang sehat," kata Fatoni.

"Maka tadi kita tekankan bersama-sama agar pelayanan kesehatan ini dimaksimalkan, pelayanan KB dimaksimalkan, juga imunisasi terus digalakkan termasuk penanganan stunting," lanjutnya.

Terkait penanganan stunting, Pemerintah Provinsi Sumsel juga terus dilaku-



Kami ucapkan terima kasih juga karena hari ini Pj Gubernur Sumsel telah menyerahkan hibah kepada IPDN berupa perangkat Sound System.

bangsa dan negara termasuk posisi sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI," ucap Fatoni.

Jadi Best Practice di Indonesia

Apresiasi juga diberikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada Agus Fatoni atas penurunan stunting tercepat di Indonesia.

"Saya apresiasi Provinsi Sumsel atas penurunan stunting yang tercepat di Indonesia. Bahkan di seluruh Indonesia menjadi best practice yang luar biasa," ucap Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo.

Bahkan dirinya membuktikan langsung ketika tiba di Sumatera Selatan. Hasto juga mengapresiasi pelayanan pencegahan stunting yang sangat luar biasa.

"Gotong royongnya juga luar biasa, saya berkunjung ke kampung KB kader-kadernya juga luar biasa," sam-



Menurutnya, pelayanan KB perlu dilaksanakan secara serentak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rumah Sakit, Puskesmas, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun pelayanan kesehatan lainnya.

"Tentu pelayanan KB ini perlu kita maksimalkan agar keluarga seluruhnya

kan berbagai Gerakan Serentak guna memaksimalkan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Di antaranya melalui Gerakan Penanganan Stunting Serentak Se-Sumsel dan Gerakan Beadah Rumah Serentak se-Sumsel.

"Kita lakukan termasuk juga ada Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, ini juga bisa untuk mencegah stunting," ujar Fatoni. •



PEMBANGUNAN SUMSEL SELARAS PERENCANAAN NASIONAL

Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan di Sumatera Selatan berjalan sesuai perencanaan nasional. Dari sektor kesehatan, ekonomi, pangan dan infrastruktur semua berjalan baik sehingga pembangunan di Sumsel berjalan sesuai arahan nasional.

Mengawali agenda kuncinya, Presiden Jokowi meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Di tempat ini Presiden Jokowi mengecek secara langsung sejumlah fasilitas kesehatan. Di antaranya, peralatan medis rumah sakit termasuk ketersediaan dokter spesialis di RSUD Rupit.

Dari hasil tinjauannya kali ini, Presiden Jokowi memuji Sumber Daya Manusia (SDM) hingga ketersediaan dokter spesialis yang sudah memberikan pelayanan maksimal kepada pasien yang berobat di rumah sakit ini.

"Saya senang masuk ke RSUD Musi Rawas Utara karena apa, SDM, dokter spesialis bagus, lengkap," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan perala-

tan medis seperti peralatan operasi hingga CT scan dari Kementerian Kesehatan juga sudah didistribusikan ke RSUD Rupit. Kemudian, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya pasokan listrik di RSUD Rupit yang menurutnya masih kurang memadai.

"Hanya problemnya di sini urusan listrik yang kurang dari PLN sehingga tadi langsung saya telepon Dirut PLN untuk menyelesaikan secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi.

Sikap Presiden Jokowi yang langsung menghubungi Dirut PLN menunjukkan bahwa pemerintah merespon cepat terhadap kekurangan infrastruktur yang dapat menghambat pelayanan kesehatan.

Menurut Presiden Jokowi, permasalahan listrik bukan hanya dapat mempengaruhi kinerja di rumah sakit melainkan keseluruhan Kabupaten Muratara.

Dia berharap, peningkatan infrastruktur listrik di lokasi ini dapat segera terlaksana mengingat pentingnya energi listrik dalam mendukung operasional fasilitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah yang lebih terpencil.

Harga Bahan Pokok Stabil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni juga melakukan kunjungan ke pasar. Salah satunya Pasar Lawang Agung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi membeli sejumlah cemilan hasil

produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijual ke masyarakat setempat. Selain itu, Presiden Jokowi juga memastikan bahwa harga bahan pokok di pasar ini cenderung stabil.

"Harga-harga baik. Saya lihat kayak cabai rawit di angka Rp 55 ribu, cabai hijau, cabai merah Rp 50 ribu, bawang juga sama, bawang putih Rp 40 ribu, bawang merahnya Rp 45 ribu. Harganya baik," ujar Presiden Jokowi.

Selain mengecek harga, Presiden Jokowi juga menyoroti infrastruktur lokal. Menurutnya, pemeriksaan infrastruktur secara langsung juga bagian dari agenda kunjungan kerjanya.

Dalam peninjauan, Presiden Jokowi sempat membeli keripik ubi yang merupakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oka Evrita, penjual keripik tersebut, menyebut bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi pengemasan produk yang dinilai sudah baik.

"Tadi beliau men-support untuk packagingnya. Packaging-nya sudah bagus," ujarnya.

"(Presiden) beli empat, tadi dikasih Rp500 ribu. Harganya cuma ini Rp 35 ribu, rendangnya Rp100 ribu, kalau pedanya cuma Rp 40 ribu. Terima kasih Pak Jokowi," lanjutnya.

Peninjauan kali ini menegaskan komitmen Presiden untuk memantau langsung kondisi ekonomi dan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia, terutama di pasar tradisional yang menjadi barometer ekonomi kerakyatan.

Pastikan Ketersediaan Stok Beras

Masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Presiden Jokowi didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni meninjau stok beras secara langsung di Gudang Bulog Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Presiden Jokowi juga memastikan kelanjutan distribusi bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Negara memastikan bahwa ban-

tuhan pangan yang telah diterima masyarakat sejak bulan Januari hingga Mei 2024 akan terus berlanjut sampai bulan berikutnya.

"Saya akan meli-

jukkan Pak Kepala Bulog di dalam, 'Pak ini yang dibagi'. Agak pulen ya tapi enak kan? Itu beras yang kita bagi itu premium," ucap Presiden.

Dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat, Presiden menyimpulkan bahwa distribusi bantuan pangan telah



hat fiskal anggaran APBN dan nanti bulan Juni akan saya umumkan tapi kelihatannya bisa dilanjutkan. Bapak ibu berdoa bersama ya," ujar Presiden Jokowi.

Melalui kesempatan ini, Presiden Jokowi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dirinya bahkan menanyakan tentang kualitas beras yang telah dibagikan pemerintah.

"Ada keluhan mengenai berasnya? Menurut saya itu berasnya lebih bagus dari yang saya makan. Saya tadi ditun-

berjalan dengan baik. Keputusan untuk melanjutkan distribusi ini diharapkan akan diumumkan pada pertengahan bulan Juni tergantung pada ketersediaan anggaran APBN.

Kegiatan ini tak hanya dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi juga memastikan transparansi dan responsivitas pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat terkait kualitas bantuan pangan yang diberikan. ●

MAKSIMALKAN PROGRAM PRIORITAS DAN GERAKAN SERENTAK

Sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni fokus pada tugas utamanya yang dirangkum dalam lima program prioritas dan gerakan serentak. Salah satu gerakan serentak adalah program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program Bedah RTLH ini sudah berjalan yang ditandai dengan penyerahan kunci dan rumah bagi masyarakat serta penyerahan alat sanitasi untuk warga Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.

"Pada hari ini sama-sama telah kita saksikan penyerahan rumah dan kunci rumah program Bedah Rumah Serentak se-Sumsel dan Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel. Jadi dua gerakan ini bertujuan untuk membangun rumah tak layak huni dan sanitasi yang tak layak," ucap Fatoni.

Penyerahan kunci rumah dan alat sanitasi dilakukan secara simbolis kepada beberapa warga di Gang Kaleng dan Lorong Sirah, Plaju Ilir yang disambut haru oleh masyarakat setempat. Fatoni mengatakan melalui bedah rumah dan bantuan sanitasi ditargetkan

semakin mempercepat pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Saat ini tercatat sebanyak 8.391 rumah yang mengikuti program Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel, 80 persen diantaranya telah selesai.

Ia optimis dalam waktu dekat ini mampu mencapai 100 persen terlebih semangat kekompakan dan kebersamaan terus digaungkan.

"Angka ini nanti akan terus berkembang di tahun ini dengan bantuan sumber dana dari desa dan kelurahan bisa mencapai 15 ribu lebih," kata Fatoni.

Sementara itu, anggaran untuk merealisasikan program Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR BUMN/BUMD dan swasta. Kemudian terkait Gerakan Serentak yang

telah di launching oleh Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian adalah pembangunan sanitasi sejumlah 6.811. Bantuan ini meliputi pembangunan toilet dan wc milik masyarakat.

Fatoni juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam menyukseskan program Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel dan Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel hingga penyerahan kunci hari ini.

Dalam menjalankan program ini Pemprov bekerjasama dengan Kodam Kedua Sriwijaya untuk pelaksanaan pembangunan.

"Terima kasih Pangdam II/Sriwijaya atas kerjasama ini. Semoga ini berjalan lancar sehingga pembangunan kita lebih efektif, efisien dan maksimal. Masyarakat juga kita harap aktif ber-



sama-sama mendukung program ini,” ucap Fatoni.

Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika juga mendukung kedua program tersebut yang telah menginspirasi banyak daerah lain terutama Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Mereka berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat yang termasuk salah satu tugas pokok TNI AD. Sehingga pihaknya akan membantu pemerintah daerah melalui rehabilitasi RTLH dan pembangunan sanitasi.

“Bantuan rehab dan sanitasi yang akan kami laksanakan nanti totalnya untuk merehab 2.089, dimana 1.000-nya ada di Sumsel. Kita berupaya berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu akan ada juga rehab rumah dinas prajurit,” ucapnya.

Fokuskan Program Prioritas

Sementara di hadapan Tim Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII tahun 2024 Lemhannas RI, Agus Fatoni memaparkan lima program prioritas sekaligus menyampaikan kondisi topografi Provinsi Sumsel dengan luas wilayah 86.771,68 km² yang terdiri dari administrasi wilayah 13 Kabupaten, 4 Kota, 241 Kecamatan, 403 Kelurahan dan 2.855 Desa serta ditinggali penduduk sebanyak 8.813.243 jiwa.

“Sumatera Selatan ini merupakan provinsi terbesar, daerah yang cukup diperhitungkan dan merupakan induk dari provinsi-provinsi yang ada di Sumbagsel. Dari Sumsel inilah kemudian lahir provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung dan di Sumatera Selatan ini menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat ekonomi di Sumatera bagian Selatan,” jelas Fatoni.

Ia menjelaskan secara rinci berbagai capaian indikator makro yang telah berhasil diraih provinsi Sumsel, di antaranya Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (y-on-y) Triwulan I Tahun 2024 sebesar 5,06%, tertinggi di Pulau Sumatera, Inflasi Sumsel Mei 2024 sebesar 2,98% (y-on-y), telah mencapai target di kisaran 2-3%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel tahun 2023 mencapai

73,18 (kategori tinggi), melampaui target 73,09.

Kemudian, Tingkat Pengangguran Sumsel pada Februari 2024 sebesar 3,97%, telah mencapai target sebesar 4,14%, Tingkat Kemiskinan Sumsel Maret 2023 menurun menjadi 11,78%, telah mencapai target kisaran 11,59-12,66%, serta Kemiskinan Ekstrem Sumsel pada Maret 2023

Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel. Kemudian Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel sebanyak 8391 unit, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel sejumlah 6811 unit.

“Kita juga ada Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumsel, Gerakan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan



menurun menjadi 1,29%, dari September 2022 sebesar 3,19%, Prevalensi Balita Stunting Sumsel pada tahun 2022 menurun signifikan menjadi 18,6% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 24,80%.

Fatoni mengungkapkan, berbagai program prioritas Provinsi Sumsel di tahun 2024, antara lain penanganan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, puting beliung dan tanah Longsor.

Selain itu, berbagai Gerakan Serentak guna menyatukan seluruh potensi yang ada di Sumsel meliputi Gerakan

Serentak se-Sumsel, Gerakan Layanan KB Serentak se-Sumsel dan sudah jadi percontohan dengan daerah lain. Baru-baru ini juga telah di launching Kopi Sumsel. Bahkan dalam waktu dekat akan ada rekor MURI minum kopi terbanyak,” jelas Fatoni.

Sementara Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geografi Lemhannas RI Mayjen Tni Ramses Lumban Tobing mengatakan kegiatan SSDN merupakan praktek lapangan berupa kunjungan studi dengan orientasi peningkatan kemampuan analisis, terhadap berbagai permasalahan di daerah. ●

SELAMAT DATANG ELEN SETIADI SELAMAT JALAN AGUS FATONI

Elen Setiadi menjadi Penjabat Gubernur Sumsel sejak pelantikan pada 24 Juni 2024. Pj sebelumnya, Agus Fatoni, beralih menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara. Selamat bertugas untuk keduanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik tiga penjabat (pj) gubernur pada Senin, 24 Juni 2024 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Pertama, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Mayjen (Purn) Hasanuddin, menggantikan Lalu Gita Ariadi yang disebut mengundurkan diri karena berminat maju sebagai calon gubernur NTB 2024-2029. Hasanuddin sebelumnya merupakan Pj Gubernur Sumatera Utara.

Selanjutnya jabatan Pj Gubernur Sumatera Utara beralih ke Agus Fatoni, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan. Sementara itu, kursi Pj Gubernur Sumatera Selatan diisi oleh Elen Setiadi.

Elen merupakan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pelantikan ketiganya berdasarkan Keputusan Presiden

RI Nomor 70/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur. Sementara tugas utama Agus Fatoni adalah Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Elen Setiadi juga masih aktif sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Titik temu keduanya adalah latar belakang bidang ekonomi dan keuangan meskipun berbeda kementerian. Pengaruh latar belakang itu pada akhirnya, sedikit-banyak, akan mewarnai kebijakan dan penugasannya di daerah. Agus Fatoni tampak jelas sangat hirau dengan penerapan kebijakan fiskal (anggaran), baik alokasi maupun penyebarannya ke berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.

Sedangkan Elen, rekam jejaknya menunjukkan beberapa kali duduk sebagai komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara. Ia pun masih aktif sebagai komisaris PT Kereta

Api Indonesia, badan usaha milik

negara yang memiliki wilayah operasi di Sumsel hingga Lampung. Jaringan kereta api di Sumsel-Lampung, selain melayani penumpang, juga mengangkut batu bara milik BUMN PT Bukit Asam yang lokasi tambangnya berada di Kabupaten Muara Enim.

Sebagai Komisaris di PT Kereta Api Indonesia (KAI), Elen diangkat pada 5 Maret 2024 lalu berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN SK-61/MBU/03/2024. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII (2016-2019), Komisaris PT Bio Farna (2019-2021), Komisaris PT Angkasa Pura I (2021-2023), dan Komisaris PT Integrasi Aviast Solusi (IAS).

Elen Setiadi lahir di Cerenti, Kuantan Singingi, Riau pada 1 September 1971. Ia menempuh pendidikan sarjana pada jurusan Hukum di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat (1995). Kemudian menyelesaikan pendidikan Magister pada jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (2006).

Ia juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti Negotiation, Conflict Resolution, and Meeting Management (2012) dan Capacity Building in Governance Economic Policy Coordination (2013).

Sebelum menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak 2020, Elen pernah menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2016-2020).

Selain itu, Elen Setiadi juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2015); Wakil Sekretaris Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (2015).

Rekam jejak tugas birokrasinya antara lain menjabat Kepala Bagian



Pelaksanaan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2006-2007); Kepala Bagian Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2007-2013); dan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013-2016). Ia mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada tahun 2008 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2016 karena kesetiannya terhadap Negara serta kecakapan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nah, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Februari 2024, nama Elen sempat disebut-sebut akan menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur di kampung halamannya, Riau. Namun, ternyata ia malah menjadi komisari PT KAI pada Maret dan ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sumsel pada Juni 2024.

Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Sumsel, Sri Sulastri, mengkonfirmasi pengangkatan Elen menggantikan Agus Fatoni. "Iya, hari Senin dijadwalkan pelantikan Pj Gubernur Sumsel dan Gubernur lainnya," ujarnya, Sabtu, 22 Juni 2024.

Jadi, Pj Gubernur Sumsel akan beralih dari putra Lampung Agus Fatoni ke putra Riau Elen Setiadi. Apakah latar belakang asal daerah akan berpengaruh juga dalam penugasan sebagai Pj Gubernur? Kelak akan diketahui dalam pelaksanaannya.

Sedangkan Mendagri berpesan agar Elen mengembangkan perekonomian Sumsel. "Karena ekonomi menjadi jantung, salah satu titik keberhasilan negara sehingga bisa terjaga (pertumbuhan ekonomi nasional) diangka 5,11 persen. Inflasi kita juga terjaga salah satunya karena usaha dari Kemenko Bidang Perekonomian. Sehingga, kita minta Pj Gubernur Sumsel yang baru bisa menjaga perekonomian Sumsel," ujar Tito dalam pesannya, Senin, 24 Juni 2024.

Menurut dia, dengan Elen sebagai Pj Gubernur Sumsel, koordinasi bisa dilakukan dengan Mendagri juga dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kolaborasi itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel.

"Kebetulan Sumsel kampung saya, kalau kampung saya maju karena dapat dukungan Pak Airlangga saya ucapkan terima kasih," tambahnya.

Toh dari sisi topografi, kondisi muka bumi, bentang alam Riau kampung halaman Elen Setiadi dan Sumsel memiliki banyak kesamaan, antara lain sungai-sungai yang mengalir di kedua provinsi. Sebagai catatan, Sumsel adalah wilayah perairan umum (sungai, danau, rawa) terluas di Asia Tenggara dengan luas

dangkan untuk perkebunan, sawit lebih banyak di Riau, namun untuk kopi Sumsel merupakan produsen terbesar di Indonesia.

Toh bukan soal sumber daya alam yang menjadi soal bagi kedua provinsi, melainkan tata kelolanya. Nah, dengan latar belakang hukum bisnis dan pen-



sekitar 2,5 juta ha, manakala Riau memiliki hampir 2,2 juta ha areal serupa.

Nah, kesamaan topografi itu mengarah ke cara hidup masyarakatnya. Misalnya soal konsumsi dan budidaya ikan air tawar. Juga pusat-pusat pertumbuhan ekonominya. Harap diingat Palembang sebagai pusat pemerintahan Sumsel berada di tepian Musi, sedangkan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau berada di tepian Sungai Siak.

Banyak lagi kesamaan antara Sumsel dan Riau selain sisi topografi. Dari sisi budaya, keduanya sama-sama Melayu yang juga menjadi tuan rumah pendatang dari berbagai suku di Indonesia.

Dari sisi sumber daya alam, Riau dan Sumsel memiliki sumber migas meski dalam skala berbeda. Namun, Sumsel memiliki batu bara lebih banyak. Se-

galaman sebagai komisaris beberapa BUMN, juga sebagai banyak hal yang dapat dilakukan Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumsel. Dalam kaitannya dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, mungkin saja program tata kelola hutan terutama pemutihan perkebunan sawit yang menerobos hutan di Satgas Sawit menjadi tugas tambahan untuk Elen.

Tapi, pengembangan ekonomi daerah memang tak semudah membalik telapak tangan. Pertumbuhan ekonomi Sumsel yang lebih baik dan di atas rata-rata nasional sudah memadai sebagai target Pj Gubernur selama semester II 2024. Pada 2025, giliran Gubernur Sumsel terpilih hasil Pilkada serentak 2024 yang harus menunjukkan kinerja dan prestasinya. ●

MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KALTARA

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi lima isu utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dirumuskan menjadi 11 isu strategis.

"Penyusunan RPJPD pada aspek kewilayahan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan dilakukan secara simultan, terkoordinasi dengan penyusunan perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Utara," terang Gubernur Kaltara,

pengembangan energi baru terbarukan; kesejahteraan dan pemerataan pembangunan wilayah; peningkatan kualitas dan daya saing SDM;

Inklusi sosial dan kesetaraan gender; penguatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim; penguatan tata kelola lingkungan hidup; konektivitas

"Kami telah meminta semua unsur untuk dapat memberikan saran/masukan lebih konkret dan memberikan gambaran kondisi daerah sesungguhnya," jelas Zainal.

Penyusunan RPJPD pada aspek kewilayahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan dilakukan



Zainal A Paliwang, dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Provinsi Kaltara tahun 2025-2045 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, Senin, 10 Juni 2024.

Dalam rancangan RPJPD Kaltara diidentifikasi ada lima permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi 11 isu strategis, yakni akselerasi hilirisasi industri hasil sumber daya alam; transformasi ekonomi hijau dan

tas dan aksesibilitas wilayah; infrastruktur dasar permukiman; tata kelola perbatasan; dan penguatan tata kelola yang kolaboratif berbasis digital.

Zainal mengharapkan rumusan isu strategis tersebut selanjutnya dapat dicermati bersama sampai pada tahap arah pembangunan yang akan ditetapkan. Berkenaan itu, partisipasi telah diminta dari unsur legislatif, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan keterwakilan dari unsur mitra kerja pemerintah.

secara simultan, serta terkoordinasi dengan penyusunan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Dipaparkan, semua pihak perlu memahami bahwa RPJPD yang disusun memiliki arti penting dalam beberapa hal. Mulai dari menjadi pedoman penyusunan RPJMD; menjadi panduan peny-

usulan visi misi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah; dan memuat arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Berkenaan itu, dokumen RPJPD disusun tidak hanya memperhatikan isu secara regional, isu lokal, maupun nasional, tetapi juga memperhatikan isu global (internasional)," terangnya.

Pada periode RPJPD ini, Zainal menekankan ada tanggung jawab besar untuk membawa Kaltara menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam merancang RPJPD untuk dua puluh tahun ke depan, terdapat beberapa isu global yang perlu diperhatikan.

Ia menambahkan, perubahan iklim menjadi tantangan serius yang perlu menjadi fokus perencanaan. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan permasalahan lingkungan lainnya memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat.

"Dalam konteks ini, RPJPD harus mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem alam," ujarnya.

Perkembangan teknologi, termasuk revolusi industri 5.0, disebut akan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, perlu menyusun kebijakan yang mendukung penetrasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi di seluruh sektor, serta memastikan agar masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan ini.

Sementara itu, akselerasi industri hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) menjadi prioritas dalam memajukan sektor ekonomi. Zainal menekankan semua pihak perlu memaksimalkan nilai tambah dari hasil-hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh Kaltara, termasuk memastikan distribusi manfaatnya kepada masyarakat secara adil.

"Dalam hal ini, tentu konektivitas merupakan elemen krusial dalam pengembangan daerah. Perbaikan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil, meningkatkan konek-

tivitas antardaerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata," bebernya.

Pembangunan inklusif akan menjadi fokus utama. Setiap kebijakan harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dirancang.

RPJPD ini disusun didasarkan pada

prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Setiap langkah yang diambil harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga media massa.

"Kolaborasi yang baik antara semua pihak ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran," tuntasnya. ●





REALISASIKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH

Akmal Malik: Ikhtiar Tekan Kemiskinan

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, meresmikan bangunan penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga dan mendukung program pengentasan kemiskinan.

Penyediaan air tersebut akan memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 1.727 warga desa setempat.

"Desember 2023 lalu saya ke sini bersama Pangdam. Waktu itu warga kesulitan air. Saya diancam warga. Sawah-sawah akan mereka tanami sawit. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan bahagia karena air sudah ada," kata Akmal Malik saat memberi sambutan pada peresmian bangunan penyediaan air bersih berkapasitas 5 liter per detik tersebut, Selasa, 11 Juni 2024.

Penyediaan air baku dan air bersih untuk masyarakat ini merupakan ikhtiar pemerintah menekan angka kemiskinan. Sebab, salah satu parameter penilaian kemiskinan adalah akses pemenuhan kebutuhan air. Dengan tersedianya air bersih ini, maka tingkat kemiskinan secara otomatis juga akan menurun.

Tahun ini Pemprov Kaltim membangun sumur dalam untuk penyediaan air bersih di empat desa di

PPU, yakni Desa Sumber Sari, Rawa Mulya, Rintik, dan Babulu Laut.

Tahun depan, Pemprov Kaltim mengalokasikan pembangunan sumur dalam untuk delapan lokasi desa lainnya di PPU.

Namun, Akmal mengingatkan agar Dinas PUPR Kaltim juga segera menyiapkan lokasi pembangunan sumur dalam air bersih di kabupaten dan kota lainnya di Benua Etam.

"Tadi sudah saya minta Pak Nanda (Kadis PUPR Kaltim) un-

tuk dibuat pemerataan, karena kantong kemiskinan juga ada di kabupaten dan kota lainnya. Jangan pula nanti saya dibilang Pj Gubernurnya PPU," ucap Akmal setengah bercanda.

Akmal juga berpesan agar bantuan provinsi ini bisa dimanfaatkan dan dijaga bersama.

"Jangan sampai sudah dikasih, tapi tidak bisa menyiapkan listrik. Jangan sampai alat-alat di sini karatan tidak bermanfaat," pesan Akmal.

"Provinsi punya anggaran, kabupaten punya anggaran, desa juga punya anggaran. Jangan merengek-rengok terus. Jangan semua minta provinsi. Kita harus berkolaborasi," ajak Akmal.

Lebih dari itu, Akmal juga berharap, dengan ketersediaan air bersih ini akan bermunculan UMKM dan usaha-usaha lainnya karena air sudah tersedia.

"Air adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan ekonomi dan peningkatan nilai tambah. Air ini bukan sebatas hanya untuk air minum, tapi harus dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi. Membantu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah," jelas Akmal.

Akmal berterima kasih atas dukungan pemerintah dan masyarakat Desa Sumber Sari hingga bangunan penyediaan air bersih dan air baku ini bisa diselesaikan dan dimanfaatkan. Terima kasih juga disampaikan kepada

jajaran Kodam VI Mulawarman melalui Kodim PPU yang menjadi bagian kerja sama pembangunan ini.

"Saya berharap apa yang sudah dibangun ini kita jaga bersama," kata Akmal.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firmada, menambahkan, bangunan penyediaan air baku dan air bersih ini menggunakan APBD Provinsi sebesar Rp4,5 miliar. Kedalaman sumur dalam ini 185 meter dengan kapasitas 5 liter per detik. Sementara, kapasitas tampung yang disiapkan 12 meter kubik untuk air bersih dan

48 meter kubik untuk air baku.

"Satu jam dari sumur ini bisa memproduksi 18 meter kubik. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan air seluruh warga di sini mesin ini cukup beroperasi enam jam. Sudah cukup," jelas Nanda.

Saat ini, Pemprov Kaltim membantu satu mesin genset untuk operasional sumur dalam dan pengolahannya tersebut.

Selain membangun sumur dalam, tahun ini Pemprov Kaltim juga melakukan rehabilitasi Bendungan Babulu dan normalisasi irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dukung Anak Muda

Selang sehari dari Desa Sumber Sari, Akmal lalu melakukan kunjungan ke tambak masyarakat di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Rabu, 12 Juni 2024.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan ketertarikannya untuk mengunjungi lokasi tambak tersebut, meskipun aksesnya cukup menantang dengan jarak 1,5 kilometer berjalan kaki dalam kondisi jalan becek akibat hujan.

"Saya suka, makanya saya datang. Inisiatif anak muda yang kreatif seperti ini harus kita apresiasi dan kita dukung," ungkapnya saat berada di salah satu gubuk warga di tengah areal tambak Desa Labangka.

Kunjungan Akmal Malik ke areal tambak tersebut memenuhi undangan Hanif, seorang pemuda setempat yang kini menggalakkan penanaman empat komoditi utama di areal pertambakan mereka, yaitu ikan bandeng, udang tiger, kepiting, dan rumput laut. Kawasan per-

tambakan seluas 200 hektare ini memiliki potensi besar untuk pengembangan perikanan.

Menurut Akmal, pemerintah harus hadir untuk mendukung upaya-upaya kreatif masyarakat, terutama dari kalangan anak muda. Salah satu bentuk dukungan yang akan diberikan Pemprov Kaltim adalah bantuan keuangan kepada Pemkab PPU untuk pembangunan jalan agregat sepanjang 2 km di kawasan tambak tersebut.

Akmal mengatakan jalan agregat akan sangat membantu para petambak dalam beraktivitas dan memasarkan hasil panen mereka.

Selain itu, Akmal juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim untuk membantu petambak dalam mencari pasar, sehingga mereka tidak lagi harus menjual hasil panen mereka kepada tengkulak.

Dukungan untuk pengembangan kawasan tambak ini dinilai sangat strat-



"Pak Nanda (Kepala Dinas PUPR Kaltim) tolong dibantu untuk jalan agregat sekitar 2 km. Mungkin lewat bankeu (bantuan keuangan)," perintah Akmal yang langsung disanggupi oleh Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firmada.

egis, mengingat di masa depan PPU harus siap menjadi penyuplai kebutuhan ikan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), bahkan hingga ke luar negeri. Dia berharap lebih banyak lagi anak muda yang mengikuti jejak Hanif menjadi petambak kreatif. ●



Panca Wijaya Akbar BUPATI OGAN ILIR DEKAT DENGAN WARGANYA, BEBAN PIKUL NAMA BESAR ORANG TUA

Terlahir sebagai anak pejabat, tidak membuat Panca Wijaya Akbar bersenang hati. Justru, Bupati Ogan Ilir ini harus menanggung beban dari nama besar orang tuanya.

Putra bungsu mantan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan Fauziah ini memang acapkali disebut mendompleng nama sang ayah. Apalagi ia juga menjadi Bupati Ogan Ilir yang merupakan basis dukungan Mawardi Yahya.

Sang ayah dua periode memimpin kabupaten tersebut. Belum lagi beberapa

Sebelum Panca, sang kakak Ahmad Wazir Noviadi yang terpilih memimpin Ogan Ilir. Namun kemudian lantaran tersandung kasus, dalam prosesnya Panca menggantikan posisi kakaknya sebagai orang nomor satu di Ogan Ilir.

Masuk ke dunia politik bukanlah awal karir yang dialami suami dari Mikhaila Tikha Alamsyah ini. Ia tadinya adalah seorang pebisnis. Panca adalah direktur perusahaan perkebunan, dan Manajer operasional di Perusahaan Sumsel Energi Gemilang. Namun setahun di perusahaan tersebut, di usianya yang ke-29, ia langsung mencalonkan diri sebagai Bupati Ogan Ilir tahun 2021

"Kalau selama ini saya backgroundnya bisnis, tapi kalau soal partai saya sudah tahu sejak SD, karena

agi bapak saya politisi senior di Sumsel," kata Panca kepada wartawan.

Meski masih terbilang muda, Panca sudah mengenal politik. Seperti di tahun 2009 lalu, Panca sudah membantu melakukan sosialisasi melalui media sosial untuk mendukung karir sang ayah di politik.

Begitupun saat ayahnya maju di Pilgub Sumsel 2018 sebagai wakil gubernur, Panca juga ikut di balik layar membantu melalui media sosial.

Meski seorang politikus, Mawardi tidak memaksa anak-anaknya mengikuti jejak dirinya. Namun lantaran sejak kecil anak-anaknya sudah diajak mengenal politik, akhirnya beberapa di antara

lima anak Mawardi Yahya, terjun ke politik. Termasuk Panca. Makanya ia mengaku mencalonkan diri sebagai bupati bukan atas desakan orang tuanya. Melainkan keinginannya sendiri.

"Saya sih keinginan sendiri, saya berpikir kapan lagi kalau bukan sekarang, apalagi politik itu momentum. Kalau bukan sekarang kapan lagi," katanya.

Walau harus diakui pria kelahiran 19 Desember 1991 ini, bisa terpilih sebagai Bupati Ogan Ilir lantaran kebesaran nama sang ayah. Tetapi hal ini justru menjadi beban



kali terpilih sebagai Ketua DPRD Ogan Ilir. Otomatis masyarakat Ogan Ilir sudah seperti 'keluarga' bagi Mawardi Yahya.

Nah, makanya ditinggalkan Mawardi yang menjadi Wakil Gubernur Sumsel mendampingi Herman Deru periode 2018-2023, anak-anaknya terpilih menggantikan posisinya sebagai Bupati Ogan Ilir.

keluarga saya kurang lebih 20 tahunan, dirumah ini bergelut di dunia politik, apa-



berat bagi Panca maupun sang kakak Ahmad Wazir Noviadi.

“Memang kami berdua tidak terlepas dari nama Mawardi Yahya, sadar itu menjadi beban dan cambuk bagi kami untuk membuktikan-nya. Meskipun kadang kata orang ada bin Mawardi kita jadi gampang. Tapi justru malah sebaliknya, beban yang kami pikul berdua lebih berat,” sahutnya.

Sehingga tidak dipungkiri, akan ada peran dan support orang tuanya selama perjalanan politik Panca ke depan dan itu dijadikan cambuk olehnya untuk berbuat lebih baik lagi.

Meski masih terbilang muda, namun Panca selalu melakukan dengan serius apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Terbukti selama memimpin Ogan Ilir bersama Wabup Ardani sejak 26 Februari 2021, belum ada konflik berarti yang terjadi di Ogan Ilir.

Nah, pada Pilkada Serentak 2024 ini, Panca Wijaya Akbar dengan yakin jika dipercaya masyarakat Ogan Ilir, akan melanjutkan kembali pembangunan kabupaten hasil pemekaran Ogan Komering Ilir (OKI) tersebut. Ia juga akan kembali menjangkau suara milenial yang jumlahnya mendominasi di Pilkada kali ini.



Dekat dengan Warga

Panca Wijaya Akbar juga dikenal dekat dengan warganya. Ia juga gemar menghadiri acara-acara masyarakat di Ogan Ilir. Seperti pada Sabtu, 25 Mei 2024, Panca berkesempatan menghadiri acara wisuda akbar Rumah Tahfidz Al-Ikhlas Desa Tanjung Batu Seberang Kecamatan Tanjung Batu.

Tak lupa ia menyampaikan pesan bagi masyarakat, bahwa

generasi muda Islam juga harus memiliki kapasitas, intelektual, dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni,” lanjutnya.

Dan ia menganggap kalau generasi muda Islam di Kabupaten Ogan Ilir harus memiliki semua skill itu dimulai dari tingkat dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi.

“Insyaallah, ke depan Kabupaten Ogan Ilir akan memiliki para penghafal Al-Quran yang bisa menyejukkan dan membawa keberkahan,” harapnya.

• IRY



BIODATA

Nama : Panca Wijaya Akbar
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 19 Desember 1991
Istri : Mikhailia Tikha Alamsjah
Ayah : Mawardi Yahya
Ibu : Fauziah

PENDIDIKAN

- SD Kartika II.3 Palembang (1997-2000)
- SD Negeri 1 Kayuagung (2000-2003)
- SMP Negeri 1 Palembang (2003-2006)
- SMA Negeri 1 Palembang (2006-2009)
- S-1 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (2009-2015)

ORGANISASI

- Wakawarda Bidang Pembangunan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan (2019-2022)
- Ketua Bidang Hukum KONI Provinsi Sumatera Selatan (2019-2024)

KARIER

- Direktur Utama PT Limbersa (2015-2020)
- Manajer Operasional PT Sumsel Energi Gemilang (2019-2020)
- Bupati Ogan Ilir Terpilih (2021-sekarang)

Ratna Machmud

PEREMPUAN BUPATI PERTAMA, TEGAS BAWA PERUBAHAN BESAR

Menjadi bupati perempuan pertama di Kabupaten Musi Rawas, Ratna Machmud dikenal sebagai wanita yang tegas dengan membawa perubahan besar untuk kemajuan Musi Rawas menjadi lebih baik.

Ratna Machmud didampingi Wakil Bupati Suwarti untuk memimpin Musi Rawas periode 2021-2026. Keduanya dilantik pada 26 Februari 2021 di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan.

Keduanya berhasil mendapatkan posisi bupati dan wakil bupati usai mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada serentak 2020.

Mereka diusung Partai Golkar, PAN, dan Gerindra. Ratna Machmud-Suwarti

memperoleh 51,8 persen suara. Keduanya juga menorehkan sejarah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati perempuan pertama yang memimpin wilayah di Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera.

Dalam Pilkada Kabupaten Musi Rawas 9 Desember 2020 lalu, Hj Ratna Machmud bersama Hj Suwarti berhasil mengalahkan H Hendra Gunawan dan H Mulyana.

Ratna Machmud lahir di Lubuklinggau pada 8 Agustus 1964. Lubuklinggau semula merupakan bagian dari Musi Rawas, namun menjadi kota yang berdiri sendiri pada 2001.

Lahir di keluarga berkecukupan, tak membuat Ratna menjadi pribadi yang sombong.

Bungsu dari 12 bersaudara ini dikenal periang baik dilingkungan keluarga, rekan kerja hingga masyarakat luas.

Ratna dikenal dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos membuatnya tampil sebagai pribadi apa adanya.

Ia dikenal cekatan dalam segala hal, selalu berbicara dengan hangat pada siapa saja yang menyapanya.

Ternyata prinsip ramah ini sudah ditanamkan kedua orang tuanya H Machmud Amin dan Hj Ambiyah Mantab sejak kecil dengan pola mendidik disiplin dan pantang menyerah.

Ayahnya Machmud Amin merupakan tokoh



asli dan berpengaruh di Bumi Silampari dan turut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Musi Rawas tempo dulu.

Ratna mengenyam pendidikan di kota kelahirannya hingga SMP, sebelum pindah ke Jakarta untuk bersekolah di SMA Labschool pada 1981.

Setamat SMA, ia melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Sipil Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dan lulus tahun 1991.

Sebelum akhirnya menjadi Bupati Musi Rawas, Ratna berkarier di Departemen Pekerjaan Umum (PU). Ia mengawali pekerjaannya sebagai PNS pada 1993 dengan menjadi Staf Dit Air Bersih Ditjen Cipta Karya Departemen PU.

Setelah itu, kariernya terus meningkat hingga menjadi Bagpro Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Provinsi Sumsel Ditjen Perumahan dan Permukiman Dept Kimpraswil pada 2003-2004. Ratna ditunjuk menjadi Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Sumsel Ditjen Cipta Karya Dept PU pada 2007.

Selanjutnya, dia diangkat sebagai Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel pada 2009. Terakhir, ia didapuk sebagai Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau periode 2016-2020.

Berasal dari daerah yang dipimpinnya, Ratna bertekad memajukan Kabupaten Musi Rawas. Selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, pem-

angunan infrastruktur juga menjadi fokus Ratna, dengan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Atas komitmennya dalam melakukan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, di Kabupaten Musi Rawas, Ratna Machmud menerima Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia Kategori Percepatan Infrastruktur.

Penghargaan dari sebuah grup media di Tanah Air itu diserahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ratna sudah berpengalaman dalam

hidupkan kembali sektor perekonomian masyarakat mulai dari pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga pariwisata.

Bahkan, belum lama ini Musi Rawas dikunjungi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) setelah 20 tahun tidak pernah dikunjungi Presiden RI. Terakhir, Musi Rawas dikunjungi Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004.

Kabupaten Musi Rawas meraih penghargaan Abipraya Prasasya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Peraturan



menata kawasan perkotaan dan perdesaan, bahkan hal itu sudah ia lakukan sejak puluhan tahun lalu

Ratna pun berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang merata di setiap pedesaan dan bertekad mengabdikan diri pada masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Untuk sektor pertanian Ratna meng-

Kepala Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pemkab Musi Rawas meraih penghargaan karena telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud pada acara Puncak Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2024, di Auditorium Siwabessy Gedung Prof Sujudi Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (05/06/2024). • IRY

BIODATA

Nama : Ir Hj Ratna Machmud., M.M
Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 8 Agustus 1964
Suami : Riza Novianto Gustam
Ayah : H Machmud Amin
Ibu : Hj Ambiyah Mantab

PENDIDIKAN

- SD Xaverius Lubuklinggau (1973-1978)
- SMP Xaverius Lubuklinggau (1979-1981)

- SMA Labschool Jakarta (1981-1984)
- S-1 Teknik Sipil Institut Sains dan Teknologi Nasional (1984-1991)

ORGANISASI

- Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumatera Selatan (2021-sekarang)

KARIER

- Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau
- Bupati Musi Rawas (2021-sekarang)

Fitrianti Agustinda

WANITA PENUH ASPIRASI, FOKUS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI PALEMBANG

Politikus partai NasDem Fitrianti Agustinda atau akrab disapa Finda merupakan mantan Wawako dua periode 2016-2018, 2018-2023. Dia juga menjadi perempuan pertama di Palembang mencalonkan diri sebagai calon wali kota di Pilwakot Palembang 2024.

Finda menjadi Wawako Palembang mendampingi Harnojoyo dua periode 2016-2018, 2018-2023, awal karirnya Fitrianti Agustinda dilantik sebagai Wakil Walikota Palembang sisa masa jabatan tahun 2013-2018 menggantikan Wawako Palembang sebelumnya Harnojoyo yang naik menjadi Wako Palembang di Graha Bina Praja, Palembang, Sumatera Selatan, dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada Rabu 31 Agustus 2016.

Wanita lulusan fakultas Hukum itu sepanjang sejarah merupakan Wawako Perempuan pertama di Palembang.

Bahkan wanita berhijab kelahiran 5 Agustus 1976 ini, selama menjadi Wawako Palembang dua periode sangat aktif melakukan kerja di luar kantor. Dia menjalankan kerjanya dengan melakukan kunjungan bahkan di hari weekend-nya hari sabtu dan minggu.

Finda setiap hari rajin berkunjung ke rumaharganya untuk melihat kondisi kesehatan dan ekonomi warga Palembang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Finda fokus kepada kesehatan karena sakit itu harus mengeluarkan kocek yang besar dinilai warga miskin tidak akan bisa sehat. Dia tidak mau warganya yang miskin mengalami kondisi itu dan mensosialisasikan berobat gratis.

Berobat gratis menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau KIS banyak tidak diketahui oleh warga dan indikasi pembuatannya juga cenderung dibuat ribet oleh kelurahan dan kecamatan.

Finda turun kejalan agar pihak kelurahan dan kecamatan mengeluarkan KIS tanpa mempersulit apa lagi harus meminta uang kepada warga. Setiap kali Finda datang juga membawa Tim Kesehatan dari Puskesmas di setiap wilayah yang dikunjunginya.

Finda juga membawakan sembako dan uang agar warga miskin saat harus

bertindak. Finda pun menjadi salah satu pejabat daerah di Palembang mengayomi masyarakat tanpa membedakan status. Sebelum terpilih menjadi Wawako Palembang, aktif sebagai Anggota DPRD kota.

Sedari kecil ia menetap di Palembang, merupakan anak dari Hj Ainun sekaligus adik kandung Almarhum Romi Herton, sosok politikus PDIP dan pernah menjabat Wako Palembang periode sebelumnya.

Fitrianti Agustinda menempuh pendidikan awal di SD Negeri 100 Palembang.



mendapatkan perawatan bisa tenang bisa makan dan memiliki uang pegangan. Amplop yang diberikan Finda itu sendiri kepada warga miskin setiap hari ditemuinya itu dari uang pribadinya.

Dikenal tegas dan pemberani, istri dari Dedi Sipriyanto itu juga konsisten dalam

bang tahun 1982-1988 dan melanjutkan di SMP Negeri 13 Palembang tahun 1988-1991. Setelah tamat SMP, ia pun menempuh sekolah tingkat atas di SMA Negeri 2 Palembang tahun 1991 sampai 1994.

Pasca lulus dari SMA Negeri 2, adik Al-

marhum Romi Herton itu belajar di Universitas Muhammadiyah Palembang dan memilih fakultas hukum sebagai modal studi yang ia pelajari. Meski tak meraih predikat mahasiswi lulus tercepat, Finda menuntaskan waktu kuliah dengan nilai baik di tahun 1999.

Finda pernah bekerja sebagai Karyawan PT Telkomsel selang dua tahun dirinya lulus kuliah. Fitri meniti karier di sana mulai tahun 2001 hingga 2004. Setelah tak lagi bekerja di sana, ia sempat menjadi Manager SPBU selama 10 tahun sampai tahun 2014.

Sebelum menjadi Wawako Palembang, ia dipercaya menjadi pengurus PDIP dan menjadi anggota DPRD kota selama dua tahun. Namun di tengah aktivitas Fitri menjadi anggota DPRD, ia juga dipercaya sebagai Dewan Pendidikan dan Ketua Umum PDBI.

Finda berhasil mendapatkan penghargaan di acara Festival "Gapura Cinta Negeri" tahun 2019 dalam rangka menyambut HUT Ke-74 RI. Ia menjadi pelopor penerima program dari prestasi Gapura Terbaik Kategori Umum.

Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai wanita penuh aspirasi dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Palembang, karena sosoknya yang rela memperjuangkan aspirasi dan hak perempuan.

Tahun 2018 pasangan Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda berhasil men-

jadi pemenang dari Pilkada Wako dan Wawako Palembang. Mereka menang dengan perolehan suara sebesar 351.240 atau diangka 47,46 persen.

Kemenangan pasangan tersebut turut didukung Partai Demokrat, PAN, PDIP, PKB dan PBB. Pasca menang Pemilu 2018, mereka dilantik 18 September yang dilaksanakan di PSCC Palembang.

Tekad Kuat Maju Wako Demi Warga Palembang

Mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda setelah masa jabatannya be-

Wako di Pilwakot 2024 karena menilai warganya masih membutuhkan dirinya, terlebih lagi warga miskin dan kaum perempuan di Palembang.

Namun sayangnya sampai sekarang Finda belum memiliki pasangan yang cocok untuk menjadi pendampingnya sebagai Wawako di Pilwakot 2024.

Kendati belum menemukan pasangan Finda tetap mengembalikan formulir ke Golkar untuk mendapatkan dukungan sebagai wujud tekadnya serius untuk bertarung di Pilwakot 2024.

Dia di pasangan dengan Ketua DPC



rakhir di tahun 2023 banyak sibuk mengurus partai sebagai Ketua DPD NasDem Palembang. Finda bertekad akan maju menjadi calon Wako perempuan pertama di Palembang

Pilwakot 2024.

Tekad kuat Finda untuk maju menjadi

Gerindra Palembang Prima Salam, bahkan ada poster baliho bertuliskan Firma singkatan dari Fitri-Prima sebagai Wako dan Wawako.

Dia merespon itu hanya keinginan dari warganya dan dia hanya mengaminkan saja karena kepastian untuk calon pendampingnya masih bersifat dinamis. Lantaran dia sendiri masih berkomunikasi dengan sejumlah parpol lain untuk siap mengandeng dan mencari pasangan untuk mengusungnya. ●

BIODATA

Nama : Fitrianti Agustinda
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 5 Agustus 1976.
Agama : Islam
Suami : Dedi Sipriyanto
Anak : Dua

PENDIDIKAN

SD Negeri 100 Palembang (1982-1988)
SMP Negeri 13 Palembang (1988-1991)
SMA Negeri 2 Palembang (1991-1994)
S-1 Universitas Muhammadiyah Palembang (1994-1999)

ORGANISASI

Ketua PMI Kota Palembang (2014-2019, 2019-sekarang)
Ketua Kwarcab Pramuka Kota Palembang
Ketua Harian Pengajian Raudhatunnisa Kota Palembang
Ketua Dewan Pendidikan Kota Palembang
Ketua Yayasan Jantung Sehat Kota Palembang
Ketua Pengurus Daerah Kempo Sumatera Selatan
Ketua Umum PDBI Kota Palembang

KARIER

Karyawan PT Telkomsel (2001-2004)
Manager SPBU 24.301.108 (2004-2014)

Holda LOYALITAS DENGAN PARTAI, BERJUANG UNTUK RAKYAT

Dikenal sebagai wanita yang santun, cerdas dan merakyat, Ir Hj Holda berhasil menjabat sebagai anggota DPRD Sumsel tiga periode dengan slogan Ekonomi Hijau untuk Sumsel Sejahtera.

Sepak terjang putri kelahiran Bumi Silampari, 4 Agustus 1969 ini sudah tidak bisa diragukan lagi, baik di kanca dunia politik dan organisasi.

Diketahui Holda sendiri telah ber-naung di Partai Demoktat sejak awal partai tersebut ada di Sumsel.

Holda kini duduk sebagai

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel. Selama menjajal parlemen dia dikenal tegas dan rajin tetap bersahaja.

Sosok Holda dikenal masyarakatnya sangat familiar. Selain itu karena mempunyai sifat dermawan dan sangat dicintai warganya. Bahkan dia dapat menerima kritik, saran tentu semua itu bersifat membangun dan memperjuangkan rakyat.

Diketahui pengalaman Holda di dunia politik tidak bisa diragukan, wanita lulusan pasca sarjana UNSRI ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi DPRD Partai Demokrat Sumsel 2019-2024.

Holda pernah menempuh pendidikan di SDN 92 Palembang dan melanjutkan SMPN 12 Palembang hingga menjadi lulusan SPMAYayasan IBA Palembang dan melanjutkan S1 sebagai Sarjana Pertanian Universitas IBA.

Terbaru, usai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung pasangan Herman Deru - Cik Ujang (HDCU) maju di Pilkada Sum-

sel, Ir
Hol-
da
MSI





menyatakan mundur dari kontestasi.

Sebelumnya, Holda mendeklarasikan diri untuk maju sebagai Cagub Sumsel 2024 berpasangan dengan Meli Mustika yang merupakan kader PDIP.

Holda mengungkapkan bahwa dirinya mencalonkan diri dalam bursa pencalonan kandidat gubernur di Pilkada Provinsi Sumsel untuk meningkatkan elektabilitas dan polaritas.

Holda menegaskan, dirinya tegak lurus dengan putusan partai, yang telah merekomendasikan Herman Deru- Cik Ujang (HDCU) untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024.





Dikenal sebagai wanita yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai, Holda pun menyatakan siap memenangkan pasangan HDCU.

"Terhadap keputusan partai Demokrat semalam untuk rekomendasi diberikan kepada HDCU. Saya ucapkan selamat atas rekomendasi yang disampaikan dan diberikan, kepada ketua DPD Demokrat Sumsel Cik Ujang menjadi Cawagub mendampingi Herman Deru, di Pilkada Sumsel," kata Holda.

Ditambahkan Holda, meski bukan namanya yang dapat rekomendasi Partai Demokrat, namun keputusan itu harus dihormati dan patuhi setiap kader



Keputusan ini bagi saya tetap wajib kita laksanakan, sebab saya merasa telah dilahirkan dan dibesarkan partai Demokrat, dimana saya duduk tiga periode DPRD Sumsel.

Partai Demokrat.

"Keputusan ini bagi saya tetap wajib kita laksanakan, sebab saya merasa telah dilahirkan dan dibesarkan partai Demokrat, dimana saya duduk tiga periode DPRD Sumsel.

"Dan sekarang menjabat bendahara DPD Demokrat Sumsel. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada DPP dan DPD atas kesempatan bagi saya meningkatkan elektabilitas dan popularitas selama ini," ungkapnya.

Diungkapkan Holda, dengan begitu secara otomatis bisa dikatakan, kesempatan dirinya bersama kader PDIP Meli Mustika, untuk berpasangan di Pilgub



SumSel, bubar jalan.

“Untuk Meli dari PDIP komit awal adalah kesepakatan berdua, untuk masing-masing meningkatkan elektabilitas dan popularitas serta bertanggung jawab partai masing-masing.

Dengan putusan DPP Demokrat ke HDCU saya tegak lurus, dan tidak mungkin Meli maju sendiri dan bisa disimpulkan,” jelasnya. •



BIODATA

Nama : Ir. Holda MSi
 Tempat, Tanggal Lahir : Musi Rawas, 4 Agustus 1969
 Agama : Islam
 Jabatan : Ketua Komisi IV DPRD Prov Sumsel
 Ketua PDRI Prov Sumsel
 Bendahara DPD Partai Demokrat Prov Sumsel
 Suami : Herman Rusul SE, MSi
 Anak : Muhammad Brillyant Alvayedo SH, MH

PENDIDIKAN

- SD Negeri 92 Palembang lulus pada tahun 1983
- SMP Negeri 12 Palembang lulus pada tahun 1986
- SPMAYayasan IBA di Palembang lulus pada tahun 1989
- Sarjana Pertanian Universitas IBA lulus pada tahun 1994
- Pasca Sarjana UNSRI lulus pada tahun 2000

PENGALAMAN DI PARTAI DEMOKRAT

- Wakil Ketua Fraksi DPRD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024
- Sekretaris Fraksi DPRD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019
- Sekretaris Fraksi DPRD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan 2009-2014
- Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024
- Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019
- Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan 2009-2014

PENGALAMAN ORGANISASI

- Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Sumsel 2019-2024
- Bendahara DPD Partai Demokrat Prov. Sumatera Selatan tahun 2021-2026
- Ketua Srikandi Demokrat Kabupaten Empat Lawang 2022-2027
- Wakil Ketua III DPD Partai Demokrat Prov. Sumatera Selatan tahun 2016-2021
- Ketua Dewan Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Prov. Sumatera Selatan 2006 s/d Sekarang
- Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Demokrat Prov. Sumatera Selatan tahun 2005-2010
- Anggota Biro Ekonomi DPD Partai Demokrat Prov. Sumatera Selatan tahun 2000-2005
- Deklarator Gerakan Perempuan Demokrat Prov. Sumatera Selatan tahun 2003

PENGALAMAN KERJA LAINNYA

- Karyawan CV Thamrin Brother tahun 1995
- Sekretaris LPPM Universitas IBA tahun 1995-1999
- Ketua Jurusan Agribisnis tahun 2002 s.d. 2005
- Dosen Universitas IBA tahun 2000
- Direktur CV Billy Onyx 1989
- Sekretaris Yayasan Cahaya Seputih 1989
- Sekretaris Koperasi Serba Usaha Petik Sekoja tahun 2000
- Konsultan Business Development Service Sukses Bersama propinsi Sumatera Selatan 1989
- Komisaris PT Vidi Putra Kalimantan Timur 2002

Cik Ujang DAPAT RESTU AHY, MANTAP DAMPINGI HERMAN DERU UNTUK SUMSEL 1

Nama Mantan Bupati Kabupaten Lahat Cik Ujang semakin populer saja di kalangan masyarakat Sumsel, usai dirinya dipinang untuk mendampingi petahana Herman Deru pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel mendatang.

Tentu pilihan tertuju kepada pria kelahiran Lebak Budi, Merapi Barat, Lahat Sumsel 2 Mei 1968 ini bukan tanpa ala-

san, jika melihat track record Cik Ujang sendiri tentu nya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Bagaimana tidak, saat menjabat se-

bagai Bupati Lahat, suami Lidyawati ini bisa dikatakan salah satu Bupati sukses di Sumsel menjalankan program-program yang dicanangkan.

Bahkan tidak bisa dipungkiri, peran Partai Demokrat memuluskan pencalonan dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur Sumsel mendampingi Herman Deru tentunya sangat besar dan memberikan jalan mulus untuk menuju dan menjadi orang nomor dua di Sumsel

Semenjak dilantik sebagai Bupati Lahat, ayah tiga anak ini menjalankan program dengan kerja nyata, terbukti banyaknya prestasi yang diukir dari mulai menjabat hingga akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati (Wabup) Lahat Haryanto.

Banyak program kerja yang telah dicanangkan dan direalisasikan oleh Cik Ujang yang sudah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Lahat. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, perikanan, bibit, pupuk serta beragam program kerakyatan lainnya.

Sejak awal tahun 2019, tidak lama pasca dilantik, masyarakat Kabupaten Lahat sudah merasakan jalannya program sekolah dan berobat gratis. Bahkan dari sisi kesehatan, Cik Ujang berhasil menerima penghargaan Universal Health Coverage dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu karena dirinya dianggap sudah mewujudkan komitmen dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia, berkat program berobat gratis, masyarakat Kabupaten Lahat bisa dirujuk ke Rumah Sakit di Palembang, sudah banyak masyarakat merasakan



program ini.

Untuk disektor pendidikan, selain program sekolah gratis, pada tahun 2022 yang lalu, Cik Ujang kembali ke-
luarkan program terbaru untuk pelajar, dengan mengulirkan bantuan seragam sekolah gratis, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang SMP.

Pada tahun 2023, di sektor pendidikan Cik Ujang kembali mengeluarkan program pro rakyat yaitu melalui program satu desa satu sarjana, tujuannya tentu sangat mulia, karena berharap putra-putri yang berasal dari kalangan warga yang tidak mampu, bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi agar bisa bersaing dan merubah taraf hidup yang lebih baik lagi melalui program pendidikan tersebut.

Sedangkan khusus di bidang infrastruktur, Cik Ujang juga memiliki strategi jitu untuk bisa menyentuh wilayah yang puluhan tahun tidak tersentuh, dengan membangun infrastruktur jalan penghubung dari desa ke kota.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Lahat menyebut, jalan di Kabupaten Lahat di tahun 2023 dipastikan 87,5 persen mulus dan dirinya menyadari, memang masih ada jalan Kabupaten yang membutuhkan perbaikan, Cik Ujang mengatakan memang uang kita tidak banyak, dan pembangunannya dilakukan secara bertahap.

Disisi lain Cik Ujang mengakui, pada tahun 2020 hingga 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Lahat sempat melonjak, seiring efek dari Pandemi

Covid-19, yang terjadi diakhir tahun 2019, namun pada tahun 2022 Pemkab Lahat berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan tersebut.

Di tahun 2021 penduduk miskin di Kabupaten Lahat sebanyak 68 ribu jiwa atau mencapai 16,46 persen, tahun 2022 turun jadi 65 ribu jiwa sebesar 15,61 persen, dan penurunan angka kemiskinan ini, merupakan yang tertinggi dalam kurun enam tahun terakhir.



Penurunan angka kemiskinan terjadi karena Pemkab Lahat mampu menekan inflasi di masyarakat, salah satunya adalah dengan cara menjalankan sejumlah program kerakyatan yang diperuntukan dan benar menyentuh langsung ke masyarakat yang membutuhkan.

Diakhir masa kepemimpinannya, Cik

Ujang mengatakan, dirinya akan terus berupaya memberikan hal terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lahat, baik dari sisi kesejahteraan hingga pembangunan infrastruktur yang baik untuk masyarakat.

"Sebetulnya tim dan masyarakat Kabupaten Lahat yang menginginkan saya dua periode dan melanjutkan pembangunan Lahat untuk 5 tahun ke depan, karena tuntutan karir dari partai

kenapa tidak ada orang Lahat yang jadi Wakil Gubernur Sumsel itu yang membuat semangat,"ungkapnya.

Jalan mulus Bupati Lahat yang merupakan kader Partai Demokrat, akhirnya dipercayai sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel menggantikan kepemimpinan Ketua partai Demokrat sebelumnya Ishak Mekki. •

BIODATA

Nama : Cik Ujang
Tempat Tanggal Lahir : Lebak Budi, Merapi Barat, Lahat 2 Mei 1968
Istri : Lidyawati
Ayah : H Menawi
Ibu : Hj Ciknap
Anak : 3
• Khanza Uly Anggraini
• M. Gathan Raka Al Tsaqif
• Aurel Bara Ghania

PENDIDIKAN

- SD Negeri 12 Ulak Pandan Lahat (1977–1983)
- SMP N 5 Lahat (1983–1986)

- SMA N 2 Lahat (1986–1989)
- S-1 Universitas Sjakhyakirti Palembang (2009–2013)

PEKERJAAN

- Komisaris PT Ayik Batu Gung (2009–2018)
- Komisaris CV Ayik Batu Gung (2009–2018)
- Anggota DPRD Kabupaten Lahat (2009–2014)
- Anggota DPRD Kabupaten Lahat (2014–2018)
- Bupati Lahat (2018–2023)

PARTAI POLITIK

- Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat (2017–2022)
- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan (2021–2026)

Nandriani Octarina

PERCAYA DIRI MAJU CAWAWAKO PALEMBANG, IBU KITA MENATA IBU KOTA

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang 2024 semakin menyita perhatian, banyak sosok-sosok baru yang kini muncul ke publik. Salah satunya adalah Nandriani Octarina.

Nama Nandriani semakin heboh dengan banyaknya baliho dan poster dirinya dengan slogan “Ibu Kita Menata Ibu Kota”, lengkap dengan foto dirinya tersenyum lebar. Tak tanggung-tanggung, poster tersebut memenuhi hampir di semua pelosok Kota Palembang.



bang.

Munculnya sosok wanita kelahiran 20 Oktober 1995 ini membuat masyarakat penasaran, dirinya mengaku siap maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Calon Wakil Wali Kota (Cawawako) Palembang 2024.

Lulusan S1 Psikolog Unsri ini juga gencar

melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak pihak, bahkan Nandriani juga sudah mendaftarkan diri ke berbagai Partai Politik (Parpol).

Keseriusan Nandriani juga terbukti dengan mendapat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju dalam Pilkada Palembang 2024.

Meski sudah Percaya Diri (PeDe) maju sebagai Cawawako Palembang 2024, Nandriani mengaku belum memastikan dengan siapa dirinya akan berpasangan, meskipun sudah ada beberapa nama yang mendekati.

Meski demikian, mantan Ketua

DPD Perkumpulan Perempuan Wirasaha Indonesia (Perwira) ini meminta doa dari masyarakat agar mendapat pasangan yang tepat.

“Siapa pun yang menjadi pasangan kami adalah yang terbaik. Kami hanya meminta doa agar diberikan yang terbaik,” kata Nandriani.

Selain itu, Nandriani juga menyebutkan bahwa ia terus melakukan komunikasi dan lobi politik dengan kandidat calon wali kota maupun partai politik.

“Politik itu dinamis, kita ikuti saja prosesnya, Pilkada juga masih lama,” ujarnya.

Ditanya mengapa ia lebih memilih menjadi wakil wali kota daripada wali kota, ia menjelaskan bahwa keputusannya didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya karena usianya yang masih muda sehingga perlu banyak belajar.

“Saya masih muda dan ingin mengabdikan masa muda saya untuk membangun





gun Palembang. Mengapa hanya wakil wali kota? Karena kita masih muda, perlu banyak belajar dari para senior,” jelasnya.

Sejumlah program prioritas akan Nandriani selesaikan jika terpilih sebagai wakil wali kota Palembang periode 2024-2029.

Program-program tersebut meliputi penataan kawasan kumuh, penanganan kemacetan, pengendalian banjir, dan pengentasan kemiskinan.

“Visi dan misi kami akan diselaraskan dengan visi misi calon walikota kami,” singkatnya.

Nandriani berharap mendapatkan



dukungan dari partai-partai yang ia ikuti seperti Nasdem, Demokrat, maupun PDIP, serta menyatakan kesiapan-

nya mengikuti mekanisme yang ada di partai.

Pada dasarnya, ia menyatakan siap bekerja untuk kemajuan Palembang. Ia mengakui bahwa sebelumnya banyak partai yang mendorongnya untuk ikut dalam pemilihan legislatif beberapa waktu lalu. Namun, karena kesibukan urusan bisnis, ia belum bisa menanggapi tawaran tersebut.

“Saya bisa bekerja sama dengan pihak mana pun. Jadi, tergantung pada partai politik yang akan mengusung dan mendukung nanti. Menurut kami, semua calon yang ada saat ini memiliki potensi untuk menang,” tutupnya. •

BIODATA

Nama : Nandriani Octarina, S.Psi., CHA
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Oktober 1995
Status : Single
Jabatan : Direktur PT Anugrah Muda Berkarya

PENDIDIKAN

- SD Islam Al Falah Jambi
- SMPN 7 Jambi
- SMAN 1 Jambi
- S1 Psikolog Unsri
- Karohs Internasional School Of Handwriting Analys

ORGANISASI

- Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira)
- Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Sumsel

- Ketua Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD)
- Ketua IKA Psikolog FK Unsri
- Anggota DPD Golkar SS biro bidang Kesehatan Lingkungan Hidup

PENGHARGAAN

- Departemen pendidikan nasional Penulis karya ilmiah terbaik tingkat remaja se provinsi Jambi 2008
- Yayasan Puteri Indonesia Mustika Ratu (YPIMR) 2015 designer muda berbakat puteri Indonesia
- YPIMR 2017 Designer Top 10 Finalis Puteri Indonesia
- Lintas politika Indonesia 2019 Duta Demokrasi Milenial
- Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia 2019 Young Entrepreneur Under 30

RA Anita Noeringhati PERJUANGKAN HAK PEREMPUAN, SINGA BETINA PARLEMEN BUMI SRIWIJAYA

**Hj RA Anita Noeringhati
menjabat sebagai Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Sumatera
Selatan (Sumsel) sejak 2019
yang dikenal sebagai Singa
Betina Parlemen Bumi
Sriwijaya.**

Perempuan tegas yang lahir dan besar di Klaten dan Yogyakarta Jawa Tengah ini, sebelum masuk ke parlemen menjadi anggota DPRD Sumsel pada tahun 2009 adalah seorang Advokat yang cukup dikenal oleh masyarakat kota Palembang.

Perempuan kelahiran 28 Juli 1963 ini dijuluki sebagai Singa Betina Parlemen, menceritakan perjalanan kiprah dan peran RA Anita mulai dari Advokat hingga menjabat sebagai ketua DPRD Sumsel.

Anita merupakan istri Sigit Wibowo, mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, selalu memberikan penjelasan bah-

wa politik itu bukan hanya dunia milik kaum laki-laki, namun perempuan juga mampu duduk di kursi parlemen DPRD Sumsel.

Anita merupakan anggota DPRD Sumsel dari Partai Golkar, dikenal karena memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hal kesetaraan dan kemandirian.

Ibu Aryuda Perdana Kusuma dan Ardhia Putri





Kusuma merupakan sosok yang tegas.

RA Anita Noeringhati berharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi perempuan. Ia ingin membuktikan bahwa kaum hawa memiliki potensi yang besar dalam dunia politik dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Perempuan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, bahkan melebihi ekspektasi.

Anita Noeringhati resmi menandatangani gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang setelah dikukuhkan oleh Rektor Prof. Dr. Gunarto SH MHum dalam sidang senat terbuka di Auditorium Unissula Semarang, September 2023.

Anita berhasil menempuh studi doctoral tepat waktu, selama lima semester. Ia mampu meyakinkan penguji dan mempertahankan disertasinya yang berjudul "Rekonstruksi Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Perda Anggaran (Studi Analisis Hukum Berbasis Keadilan APBD Sumatera Selatan)".

Karya ini semakin menasbihkan ia sebagai ahli di bidang hukum yang sudah ia tekuni sejak menjadi advokat dari tahun 1993.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, wanita berhijab ini sempat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) untuk perwakilan Sumsel menuju Senayan, namun nasib belum berpihak dan dirinya gagal.

Berkat kerja keras dan kerja nyata yang ditunjukkan oleh dirinya selama ini berbuah manis, dirinya dipercaya oleh masyarakat dan partai untuk mendampingi mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, bertarung

pada Pilkada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 sebagai Wakil Gubernur Sumsel.

Dipilihnya Anita untuk mendampingi Mawardi Yahya sebagai Cawagub Sumsel banyak menyita perhatian masyarakat Sumsel, karena sebelumnya, Mawardi Yahya telah mendeklarasikan diri maju di Pilgub Sumsel 2024 yang akan datang berpasangan dengan mantan Wali Kota Palembang Harjojo.





Kandasnya pencalonan Har-nojoyo sebagai Cawagub Sumsel mendampingi Ma-wardi Yahya menimbulkan pertanyaan, hingga akhirnya muncul nama Anita Noeringhati sebagai pengganti.

Perjalanan politik Anita Noeringhati yang dilantik kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada 24 September 2019 bersama 74 orang anggota lainnya.

Pelantikan tersebut merupakan pelantikan ketiga yang dijalani Anita,

setelah sebelumnya juga dilantik pada 24 September 2014 untuk periode 2014-2019 dan pada 24 September 2009 untuk periode 2009-2014.

Anita saat ini menjalani periode ketiganya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia terpilih melalui Partai Golongan Karya. Pada Pemilu 2019.

Dimana pada Pileg 2019 yang lalu dirinya berhasil meraup 16 ribu lebih suara sah di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1.

Pelantikan yang ke ketiga kalinya ini menjadi terasa lebih istimewa ketika ia ditunjuk oleh partai Golkar untuk menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pada periode kedua sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anita dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan oleh partainya.

Pada periode 2014-2019, Anita Noeringhati dipercaya oleh Partai Golkar

untuk menjabat Ketua Komisi IV yang membidangi terkait pembangunan.

Anita menjabat sejak 27 April 2017 hingga akhir masa jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia merupakan wanita pertama yang menduduki posisi tersebut.

Penunjukkan dirinya sebagai Ketua Komisi IV menjadi terasa lebih istimewa karena ia bukan satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Ketua Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Karena Dua komisi lainnya juga dijabat oleh anggota perempuan, yaitu Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi I-Bidang Pemerintahan dan Holda dari Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi III-Bidang Keuangan, ini yang mencerminkan adanya peran perempuan serta wujud kesetaraan gender di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pada periode 2019-2024, Anita Noeringhati dipercaya oleh Partai Golkar untuk menduduki jabatan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Tidak hanya itu, Anita menjadi Ketua DPRD Provinsi perempuan satu-satunya di wilayah Sumatera, sebelumnya Anita dipercaya menjadi Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Selatan hingga akhirnya dilantik sebagai pimpinan definitif bersama 3 wakil ketua lainnya pada 23 Oktober 2019 dalam Rapat Paripurna Ke-III DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Ia memimpin DPRD Provinsi Sumatera Selatan didampingi oleh Giri Ramanda Kiemas dari PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua I, Kartika Sandra

Desi dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II, dan Muchendi Mahzareki dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua III.

Ibu dari Dua orang anak ini juga aktif di Media Sosial, bahkan dirinya kerap

munikasi langsung dan menerima aduan langsung dari masyarakat, ini yang membuat asyarakat senang dengan ada media sosial seperti ini, terlihat dari beberapa komentar-komentar



membagikan aktivitasnya di media sosial pribadinya di Instagram (@ra_ani-ta63) dan Tiktok (@ra__media).

Di sosial media inilah ia kerap berko-

positif yang dilontarkan, bahkan sosial medianya pun menjadi rujukan media mengambil kutipan dan sumber berita.

• IRY

BIODATA

Nama : Hj R A Anita Noeringhati
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, Jawa Tengah, 28 Juli 1963
Partai Politik : Golkar
Suami : Ir Sigit Wibowo
Anak : 2

- Aryuda Perdana Kusuma
- Ardhia Putri Kusuma

KARIER

- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

- Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

PENGHARGAAN

- Anugerah Perempuan Indonesia" atau API Award VIII – 2022 kategori Pemimpin Legislatif
- Penghargaan PCNU Kota Palembang
- Penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

Adhi Herlambang TARGETKAN SUMSEL TERANG BENDERANG 100 PERSEN

Tidak semua orang pada akhirnya bisa mewujudkan cita-cita sejak masa kecil, namun pada kenyataannya hal yang tidak dimimpikan malah membawa kesuksesan.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (PLN UID S2JB) Adhi Herlambang mengatakan, saat kecil bercita-cita ingin sekali menjadi dosen bahkan sampai besar keinginan itu masih tetap ada.

"Anehnya saya kenapa bisa kerja di perusahaan sekarang malah jadi GM PLN,"kata pria kelahiran Cirebon 11 Maret 1978 ini.

Adhi Herlambang menceritakan perjalanan hidupnya saat kecil sangat suka sekali belajar fisika dan biologi. Bahkan saat dewasa kuliah di Universitas Indonesia (UI) pun cita-citanya ingin menjadi dosen tetap ada.

"Saat kuliah saya sibuk di organisasi dan banyak keluar-keluar. Untuk jadi dosen itu diprioritaskan harus jadi asisten dosen dan aktif di laboratorium. Karena tidak bisa itulah membuat saya setelah tamat tahun 2001 memutuskan untuk memilih kerja di perusahaan,"ucapnya.

Setelah tamat tahun 2001, Adhi Herlambang tidak langsung bekerja di PLN dia awalnya bekerja di perusahaan Oil Company America hingga tahun 2002 di Indonesia. Selanjutnya dia bekerja di Nokia Corporation sempat ditugaskan di Singapura dan Aceh.

"Awal karir sama seperti yang lain staff atau karyawan biasa penempatan pertama di Kalimantan. Setelah itu naik menjadi supervisor, manajer dan seterusnya,"tuturnya.

Diakuiinya kendati tidak menjadi dosen Adhi Herlambang meletakkan hobi tekun membaca buku dengan cara menempuh pendidikan S2. Luar biasanya dia menjalankan pendidikan dengan mendapatkan tiga gelar sekaligus.

"S2 saya ada tiga gelar. Saya menempuh pendidikan S2 di Magister Manajemen pada tahun 2008 dan lulus tahun 2010 di Universitas Lambung Mangkurat. Lalu saya ambil dua gelar sekaligus Magister Strategic Corporat dan Magister Power System Engineering pada tahun 2011 di Universitas Indonesia,"jelasnya.

Adhi lebih suka traveling ke alam bebas seperti gunung dan lautan, diving kegiatan menyelam di bawah air dan olahraga renang.

Namun sayang pada t n y a pekerjaan,

Adhi tidak sempat lagi untuk menyalurkan hobi dan olahraga renangnya.

Dia mengaku setiap hari hanya tidur sekitar 4 atau 5 jam saja.

"Saya dulu rutin renang tetapi sekarang sudah susah tidur saja malam. Saya tidur biasa jam 2 subuh bangun tidur hanya 4-5 jam saja,"ceplosnya.

Dari kes-
e m u a



itu Adhi Herlambang selalu menjalan-
kannya dengan bahagia menjadi kunci
utama kesehariannya tetap terlihat
segar dan tetap sehat. Dia selalu mem-
bawa semua beban dan tanggung
jawab di kehidupan dengan bahagia.

"Moto saya hidup ini harus enjoy,
mau stress mau tidak masalah harus
dihadapi. Jadi enjoy aja kerjakan den-
gan baik karena apa yang sudah di-
takdirkan kepada kita terbaik diberikan
Allah jadi harus enjoy saja. Mau apapun
terpenting kita kerja baik kerja ikhlas
mau dinilai baik ya sukur ga yang tidak
apa,"ucapnya lagi

Targetkan Sumsel Terang Benderang 100 Persen

Adhi Herlambang menyebutkan Su-
matera Selatan (Sumsel) belum sepe-
nuhnya diterangi PLN. Lantaran masih
ada beberapa desa secara mandiri
menggunakan genset.

Data dari PLN UID S2JB di Sumsel
sebanyak 99,5 persen wilayah yang
sudah diterangi PLN. Selanjutnya 0,5
persen masih gelap ada 24 desa yang
belum di listriki PLN dan mengguna-
kan genset.

"24 desa itu OKI karena tidak ada
akses darat susah untuk PLN menarik
jaringannya. Daerah itu 15 desa dae-
rah pesisir dan 9 desa harus melewati
wilayah hutan suaka margasatwa.
Tetapi kami sudah melakukan MoU
dengan Bupati untuk meminta izin
penambahan jaringan,"kata dia

Namun Adhi Herlambang memberi-
kan target tahun 2025 Sumsel bisa 100
persen di listriki PLN. Sementara itu
wilayah Bengkulu sudah 100 persen
dan Jambi hanya tinggal 3 desa lagi.



"PR kami tinggal Sumsel karena
harus punya strategi khusus dan inves-
tasi yang cukup besar. Dulu untuk listrik
desa itu ada anggaran PLN dari pemer-
intah tetapi di tahun 2024 anggaran itu
belum dikucurkan pemerintah. Tetapi
kami akan gunakan anggaran APLN,
saya tetap optimis berharap di tahun
2025 Sumsel bisa 100 persen dialiri lis-
trik PLN,"tuturnya

Adhi Herlambang menyebutkan di
wilayah Sumsel pihaknya memiliki dua
kendala terbesar dalam memberikan
aliran listrik. Diakuinya untuk kendala di
Sumsel pemukimannya sangat terse-

bar sehingga aliran sehingga daerah
ujung terjadi job tegangan membuat
lampu listrik redup. Hal itu membuat
pihaknya harus membuat jaringan baru
agar aliran listrik di rumah warga tidak
lagi terganggu dan redup.

"Kendala kedua Sumsel ini jaringan
kami banyak melewati perkebunan
dan pepohonan. Terlebih lagi jarin-
gan kami 85 persen kawat terbuka
rentan terhadap gangguan pohon.
Makanya kami selalu bertemu Bupati
untuk bisa di support agar bisa sama-
sama membersihkan jaringan kita dari
pohon,"pungkasnya ●

BIODATA

Cirebon, 11 Maret 1978

1 Istri dan 4 anak (3 laki-laki & 1 Perempuan)

Moto : Enjoy Life, Happy Work, Best Performance

PENDIDIKAN

S1 Universitas Indonesia – Teknik Listrik

S2 Universitas Lambung Mangkurat – Magister Manajemen

S2 Universitas Indonesia – Magister Strategic Corporat

S2 Universitas Indonesia – Magister Power System
Engineering

KARIR

1. Mei 2013 – Jun 2014 : Pegawai Tugas Belajar
2. Jul 2014 – Des 2014 : Assistant Analyst IPP di Kantor Pusat
3. dst
4. Des 2017 – Okt 2019 : Manager UP2D Sumbar
5. Nov 2019 – 31 Okt 2021 : Manager UP2D Sumut
6. Nov 2021 – Okt 2022 : Senior Manager Perencanaan PLN UIW S2JB
7. Nov 2022 – Jan 2024 : Vice President Energi Primer di Kantor Pusat
8. Feb 2024 – sekarang : General Manager

SUMUT MENCARI PENDAMPING BOBBY NASUTION

Konstelasi politik menjelang pemilihan gubernur Sumatera Utara pada November 2024 kini terkesan lebih sederhana. Partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dalam Pilpres 2024 lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah sepakat memberikan dukungan pada Bobby Afif Nasution, menantu Presiden Joko Widodo.

Selain Partai Gerindra di mana Bobby kini menjadi kadernya, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat secara terbuka juga telah menyampaikan dukungan pada Bobby.

Jumlah kursi keempat partai ini di DPRD Sumut sudah melebihi syarat minimal untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni 20 dari 100 kursi di Lapangan Benteng.

Dari hasil Pemilu 2024 lalu, Gerindra kini berada di posisi ketiga dengan 13 kursi. Sementara Partai Golkar yang kini berada di posisi pertama di DPRD Sumut memiliki 22 kursi. Lalu PAN memiliki 6 kursi dan Partai Demokrat dengan 5 kursi.

Dukungan untuk Bobby juga diberikan dua partai lain di luar KIM, yakni Partai Nasdem yang memiliki 12 kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki 4 kursi. Dalam Pilpres 2024 lalu kedua partai ini memilih pasangan Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Dari koalisi pendukung Amin, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum secara terbuka menyampaikan dukungan untuk Bobby

Nasution. Di DPRD Sumut, PKS kini memiliki 10 kursi. Ramai dibicarakan PKS pada akhirnya juga ikut mendukung Bobby.

Bila situasi ini



terjadi, maka PDI Perjuangan yang berada di posisi kedua di DPRD Sumut dengan 21 kursi akan berdiri sendiri mendukung calon gubernur mereka. Dalam Pilpres 2024 lalu, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD.

Masih ada dua partai lain di DPRD Sumut, yakni Hanura (5 kursi) dan Perindo (1 kursi) yang belum memberikan dukungan pada figur tertentu. Dalam Pilpres 2024 lalu kedua partai ini berdiri satu barisan bersama PDI Perjuangan.

Belakangan, di kalangan masyarakat politik Sumut beredar informasi yang mengatakan bahwa Hanura dan Perindo pun pada akhirnya nanti akan "pindah server" mendukung Bobby Nasution.

Selain berpeluang berdiri sendiri di arena Pilgubsu 2024, sampai hari ini PDIP belum juga memastikan siapa calon gubernur Sumut yang akan mereka pilih. Setidaknya ada dua nama yang kerap disebut akan menjadi calon gubernur Sumut dari kubu banteng, yakni mantan Gubsu sebelumnya Edy Rahmayadi dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Langkah Bobby Belum Mulus

Walau tampak berpeluang besar memenangkan Pilgubsu 2024, bukan berarti langkah Bobby dipastikan mulus.

"Ada sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan Bobby dan partai-partai pendukungnya. Termasuk di dalamnya persoalan-persoalan bawaan dari kepemimpinan Bobby di Medan," ujar pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Faisal Mahrawa.

Dia mengatakan, Bobby membutuhkan komunikator politik dengan reputasi baik dan diterima banyak kalangan, terutama partai-partai politik.

Menurut hemat Faisal, pendamping ideal untuk Bobby adalah figur yang tidak begitu politis dengan latar belakang aktivis prodemokrasi dan akademisi, serta memiliki jaringan nasional dan internasional yang luas.

"Putra Sumut seperti ini masih ada. Masalahnya, apakah partai-partai pendukung Bobby bersedia memberi ruang bagi kehadiran tokoh seperti ini," ujar Faisal yang juga pendiri Sekolah

Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI).

Menyadari kebutuhan pendamping yang pas untuk Bobby Nasution, Partai Demokrat bergerak cepat. Akhir Mei lalu, Selasa (28/5/2024), Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengundang salah seorang putra Sumut, Teguh Santosa, ke kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Teguh yang lahir dan besar di Medan sudah lebih dari dua dekade berkarier

tas Bung Karno (UBK) Jakarta.

Dia dikenal memiliki pengalaman dan jaringan internasional yang luas, berbicara di banyak forum internasional termasuk di markas PBB di New York. Di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Teguh duduk sebagai Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri dan Investasi. Sementara di PP Muhammadiyah, Teguh merupakan salah seorang anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) serta Wakil Ketua



di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Andi Arief menanyakan kesiapan Teguh apabila ditugaskan menjadi pasangan Bobby Nasution dalam Pilgubsu 2024.

Teguh selama ini dikenal sebagai tokoh pers nasional dan pemilik jaringan media nasional, serta Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Selain sebagai tokoh pers, Teguh juga seorang akademisi dan masih aktif mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta serta pernah menjadi Wakil Rektor Universi-

Dewan Pakar Majelis Pustaka dan Informasi (MPI).

Dalam pertemuan di Kantor DPP Partai Demokrat itu Andi Arief didampingi Sekretaris DPP Partai Demokrat Abdullah Rasyid, Deputy Litbang DPP Partai Demokrat Syahril Nasution, dan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution.

Usai pertemuan, kepada media Andi Arief mengatakan bahwa Partai Demokrat telah bulat menugaskan Teguh Santosa menjadi bakal calon

• INFO PROFIL

wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobby Nasution.

Dalam penugasan Teguh diminta untuk melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan lintas partai, termasuk dengan Bobby Nasution sendiri.

"Kami menugaskan Teguh Santosa maju sebagai wakil gubernur mendampingi kandidat gubernur Sumatera Utara, Pak Bobby Nasution dalam Pilgubsu 2024. Saya berharap Pak Bobby mempertimbangkan Teguh dengan garansi keluarga besar Partai Demokrat. Bahwa beliau memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menjadi wakil Pak Bobby," ujar Andi Arief.

Andi Arief mengatakan dirinya telah cukup lama mengenal Teguh Santosa, baik sebagai aktivis, wartawan, maupun akademisi. Di mata Andi Arief, Teguh adalah individu yang berin-

Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2024), Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, dirinya yakin Teguh dapat mengemban tugas dengan baik. AHY mengatakan dirinya mengenal Teguh sebagai tokoh pers dan akademisi yang memiliki integritas dan jam terbang tinggi.

"Saya berterima kasih kepada Mas Teguh atas kesediaan menerima penugasan sebagai calon wagub Sumut. Saya mengenal Mas Teguh sejak lama, baik sebagai akademisi maupun pimpinan media massa," ujar AHY.

"Semoga pasangan ini (Bobby-Teguh) bisa jadi, dan membawa manfaat besar bagi masyarakat Sumatera Utara," ujarnya lagi.

Bursa Cawagub Sumut



tegritas dan selalu berusaha menggali persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Komitmen tersebut, kata Andi, sangat dibutuhkan untuk membangun Sumatera Utara ke arah yang lebih baik.

"Teguh asli anak Medan, Sumatera Utara. Walau aktif di Jakarta, tapi kami tahu dia memiliki perhatian cukup besar pada tanah kelahirannya dan memiliki sumbangsih kepada tanah kelahirannya," ujar Andi Arief lagi.

Segera setelah memberikan penugasan itu, Andi Arief memberikan laporan pada Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng dan Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Dalam pertemuan terpisah dengan Teguh, di sebuah restoran di kawasan

Teguh bukan satu-satunya nama yang beredar di bursa calon wakil gubernur Sumatera Utara untuk mendampingi Bobby Nasution. Nama yang paling santer beredar adalah Musa Rajekshah, Ketua DPD Partai Golkar di Sumatera Utara yang juga mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara di periode sebelumnya.

Tadinya nama Ijek beredar di bursa calon Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil Partai Golkar. Namun karena partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran ingin tetap satu irama di Sumatera Utara dengan mendukung Bobby Nasution, nama Ijek pun menghilang dari bursa calon gubernur.

Bagaimana dengan posisi wakil gubernur untuk Bobby? Peluang Ijek untuk posisi ini sangat besar. Informasi

yang diperoleh redaksi menyebutkan, bila harus memilih antara menjadi wakil gubernur Sumatera Utara, posisi yang pernah didudukinya, atau mempertahankan kemenangannya dalam Pemilu 2024 lalu, Ijek memilih untuk melanjutkan kariernya di gedung DPR RI. Banyak yang menilai, peluang Ijek menjadi unsur pimpinan Senayan terbuka luas.

Sejauh ini Partai Golkar belum menyerahkan nama lain yang akan dipasangkan dengan Bobby Nasution. Kabar yang beredar menyebutkan, kubu Golkar Sumatera Utara sempat mengajukan dua nama, namun reaksi Bobby terhadap kedua nama itu kurang memuaskan.

"Mungkin Bobby kurang begitu nyaman bila wakilnya berasal dari partai yang punya kursi lebih banyak dari Gerindra," ujar pengamat politik USU Faisal Mahrawa.

Nama lain yang beredar di bursa pendamping Bobby adalah Darma Wijaya Harahap alias Wiwik yang merupakan petahana Bupati Serdangbedagai. Namun Wiwik disebut banyak kalangan masih ragu-ragu dan cenderung tidak mau menjadi wakil gubernur. Pertama, dia adalah Ketua DPC PDI Perjuangan di Serdangbedagai. PDIP disebutkan tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas dan keras bila Wiwik bergabung dengan barisan KIM. Bila Wiwik memaksakan, dia akan melaju seperti gerbong kosong tanpa penumpang, alias tanpa dukungan akar rumput PDIP.

Hal lain yang diperkirakan menjadi penyebab Wiwik ragu-ragu adalah posisi strategis Serdangbedagai dalam lanskap pembangunan Sumatera Utara. Misalnya, selain Bandara Internasional Kualanamu, Serdangbedagai juga tuan rumah pelabuhan internasional Sei Rampah. Dua pintu masuk antar-bangsa ini saja membuat nilai ekonomi Serdangbedagai menjadi semakin tinggi, belum lagi berbagai proyek infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan Medan dengan kota-kota dan kawasan lain di pesisir timur Sumatera Utara hingga ke Provinsi Riau.

Dengan mempertimbangkan hal ini, Wiwik diperkirakan lebih memilih bertahan di posisi Bupati Serdangbedagai

untuk periode kedua. Bagaimanapun juga jabatan bupati lebih memiliki arti eksekusi kebijakan dibandingkan jabatan wakil gubernur.

Dalam survei yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 31 Mei lalu, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mensurvei sejumlah nama bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara. Mereka adalah Ketua Ormas Pujakesuma Adi Saputra, Sekda Provinsi Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho, mantan Bupati Deli Serdang dan caleg terpilih dari PKB, Ashari Tambunan, mantan presenter dan anggota PDIP Charles Bonar Sirait, Bupati Serdang-bedagai Darma Wijaya Harahap, Wakil Ketua DPRD Sumut dari Partai Nasdem Rahmansyah Sibarani, dan mantan Wakil Rektor UBK dan dosen UIN Jakarta, Teguh Santosa yang didukung Partai Demokrat.

Untuk tingkat pengenalan publik terhadap bakal cawagubsu, Charles Bonar Sirait berada di posisi pertama dengan 58,6%, diikuti Ashari Tambunan (54,3%), Arief Sudarto Trinugroho (51,7%), Darma Wijaya Harahap (50,2%), Rahmansyah Sibarani (49,7%), Teguh Santosa (48,2%) dan Adi Saputra (44,3%).

Sementara untuk tingkat penerimaan publik terhadap bakal cawagubsu Charles Bonar Sirait masih memimpin dengan 60,7%. Lalu berturut-turut Ashari Tambunan (52,7%), Teguh Santosa (50,8%), Darma Wijaya Harahap (50,1%), Arief Sudarto Trinugroho (49,7%), Rahmansyah Sibarani (48,7%), dan Adi Saputra (29,7%).

Selanjutnya, untuk top of mind bakal cawagubsu, nama Teguh Santosa berada di posisi teratas dengan nilai 23,6%. Charles Bonar Sirait membayangi dengan 16,2%, diikuti Darma Wijaya Harahap (14,6%), Ashari Tambunan (13,8%), dan Arief Sudarto Trinugroho (9,6%).

Dan untuk tingkat elektabilitas bakal cawagubsu dengan simulasi pertanyaan tertutup, Teguh Santosa kembali memimpin dengan 27,6%, diikuti Charles Bonar Sirait (26,8%), Ashari Tambunan (16,7%), Darma Wijaya Harahap (8,8%), dan Arief Sudarto Trinugroho (7,9%). Adapun sebesar 12,2% responden tidak memilih.

Di Balik Top of Mind

Melihat hasil survei LKPI yang memperlihatkan bahwa Bobby Nasution dan Teguh Santosa sebagai top of mind calon gubernur dan calon wakil gubernur, Ketua Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) Amir Hamdani Nasution mengatakan, hal itu adalah

Bobby," kata Amir, Rabu (12/6/2024).

Amir juga mengatakan, duet Bobby dan Teguh merepresentasikan kekuatan pemilih di pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

"Dan yang terpenting Teguh Santosa yang juga merupakan mantan Wakil Rektor UBK dengan pengalaman dan



ekspresi dari keinginan masyarakat mendapatkan sosok anak muda sebagai pemimpin di Sumatera Utara.

Amir Hamdani mengatakan, nama Teguh menjadi teratas dalam hal top of mind dan elektabilitas karena latar belakang sebagai aktivis, wartawan, dan akademis yang dimilikinya cukup menjanjikan.

"Teguh akan mendongkrak elektabilitas calon gubernur yang menjadi pasangannya. Saya kira yang lebih tepat untuk didampingi Teguh adalah

jaringan luasnya akan mampu mengelaborasi sepak peranannya sebagai wakil Bobby Nasution yang layak dan pas," demikian dikatakan Amir.

Pandangan Amir ini dibenarkan Sekretaris DPP Partai Demokrat Abdullah Rasyid yang sudah lama mengamati sepak terjang Teguh Santosa di dunia profesional dan gerakan sosial.

"Ini pasangan yang saling melengkapi. Bobby punya kemampuan dan sudah teruji mengurus serta membangun daerah. Sementara Teguh teruji

• INFO PROFIL

membangun jaringan skala nasional dan internasional,” kata Rasyid sambil menekankan Partai Demokrat menilai Bobby dan Teguh adalah pasangan ideal untuk membangun Sumut lebih hebat lagi.

Kedekatan dengan Prabowo dan Lintas Partai

Selain mengantongi dukungan dari Partai Demokrat, Teguh Santosa juga dinilai berpeluang mendampingi jago Partai Gerindra Bobby Nasution dalam Pilgubsu 2024 karena memiliki “kedekatan khusus” dengan Prabowo Subianto.

Dalam catatan pengamat politik USU, Faisal Mahrawa, Teguh pernah masuk dalam daftar calon menteri Prabowo saat Pilpres 2019. Nama Teguh ikut diumumkan Prabowo bersama nama-

percayaan Rachma dan sering mendapatkan penugasan dari Rachma untuk sejumlah isu politik nasional dan global.

Selain memiliki kedekatan khusus dengan Prabowo Subianto, Teguh juga dinilai dekat dengan tokoh lain di tubuh Koalisi Indonesia Maju (KIM) termasuk Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Karena mengantongi kedekatan dan hubungan baik dengan figur-figur kunci KIM itulah kalangan akar rumput Partai Demokrat dan PAN menginginkan Teguh Santosa menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara yang diusung KIM.

Menurut Abdullah Rasyid, pihaknya telah bertemu dengan DPW PAN Sumatera Utara yang menerima pendaftaran Teguh Santosa sebagai calon wagubsu. Seperti halnya Partai

dampingi Bobby Nasution.

“Perpaduan kedua tokoh ini akan saling melengkapi dan memperkuat. Bobby dan Teguh adalah sosok yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi pembangunan Sumatera Utara,” kata Rasyid lagi.

Di sisi lain, Rasyid juga berharap, Partai Golkar juga bersedia memberikan dukungan kepada Teguh.

“Teguh sebagai praktisi pers, pengelola media nasional memiliki hubungan yang baik dengan banyak tokoh politik papan atas di Indonesia, termasuk dengan elit di Partai Golkar saat ini terutama Ketua Umum Airlangga Hartarto. Kami percaya, pada saatnya nanti semangat kebersamaan Koalisi Indonesia Maju akan tiba pada satu nama yang sama untuk sosok wakil gubernur Sumatera Utara. Melihat latar belakang dan kiprahnya selama ini, peluang Teguh Santosa sangat terbuka lebar. Dia tokoh visioner yang dapat diterima semua kalangan,” demikian Abdullah Rasyid.

Adapun Koordinator Tim Pilkada DPW PAN Sumut, Amirullah Hidayat, Sabtu (8/6/2024) menilai Bobby dan Teguh merupakan kombinasi yang saling melengkapi dan diyakini bisa membangun Sumut lebih baik lagi.

“Menurut penilaian kami, Teguh Santosa yang pas dan layak mendampingi Bobby Afif Nasution memimpin Sumatera Utara,” ujar Amirullah Hidayat.

Amirullah sendiri telah mengenal Teguh sejak lama sebagai aktivis, akademisi dan wartawan. Menurutnya, Teguh memiliki kemampuan membangun jaringan nasional dan internasional.

“Bagi kami pasangan Bobby dan Teguh akan mampu membawa pembangunan Sumut lebih baik lagi. Tim Pilkada DPW PAN Sumut sudah berkoordinasi dengan Teguh, beliau bersedia mendampingi Bobby Nasution sebagai Wakil Gubernur Sumut,” tutup Amirullah.

Dukungan Pemuda dan Mahasiswa

Dukungan untuk Teguh menjadi pendamping Bobby Nasution juga mengalir dari kelompok pemuda dan mahasiswa, termasuk dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).



nama lain di Surabaya beberapa hari sebelum pemungutan suara Pilpres 2019.

Bahkan sebelum itu, Teguh juga ikut andil mempertemukan Prabowo dengan almh. Rachmawati Soekarnoputri menjelang Pilpres 2014.

“Jadi, pikiran-pikiran politik dan kebangsaan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sejalan dengan pelajaran yang didapatkan Teguh dari mentornya almh. Mbak Rachma,” ujar Faisal lagi.

Rachmawati yang merupakan putri Proklamator Bung Karno dan pendiri UBK merupakan salah seorang unsur pimpinan Partai Gerindra dari 2014 sampai meninggal dunia tahun 2021.

Menurut Faisal, dapat dikatakan Teguh merupakan salah seorang ke-

Demokrat, sebut Rasyid, DPW PAN Sumatera Utara juga memiliki catatan yang sangat positif mengenai Teguh Santosa sebagai salah seorang perantau asal Sumatera Utara.

“Kiprah Teguh di panggung nasional dan internasional selama ini tidak luput dari pengamatan masyarakat Sumatera Utara. Platform digital membuat kiprahnya dapat diketahui dengan mudah oleh sahabat dan kerabatnya di kampung halaman. Walau beraktivitas di Jakarta, namun jaringan pertemanannya di Sumatera Utara cukup luas,” ujar Rasyid.

Rasyid juga mengatakan, dirinya dapat memahami bila DPW PAN memiliki pandangan yang sama dengan Demokrat untuk mendukung Teguh duduk sebagai wakil gubernur men-

“Bang Teguh memang layak di-
sung Partai Demokrat mendampingi
Bang Bobby Nasution. Bagus dong,”
ujar Ketua Badan Koordinasi (Badko)
HMI Jabodetabeka-Banten Fadli Ru-
makefin dalam keterangan Rabu
malam (29/5/2024).

“Pengalaman dan jaringan perte-
manannya luas,” ujar Fadli yang men-
gelan Teguh sejak dirinya masih
menuntut ilmu di UBK.

Menurut Fadli, Teguh memiliki
perhatian yang besar pada gen-
erasi muda. Saat masih aktif di
UBK, Teguh ikut membina pers
mahasiswa. Selain itu, ia juga ser-
ing menjadi pembicara di kegia-
tan-kegiatan mahasiswa.

“Bang Teguh juga sering saya
undang untuk mengisi materi di
berbagai training wajib di HMI
(Himpunan Mahasiswa Islam),
baik itu Intermediate Training
atau LK II, maupun Advance
Training atau LK III. Pandangan-
pandangannya terhadap per-
jalanan bangsa ini, termasuk
pembangunan daerah, sangat
luas,” lanjut Fadli.

Maka dari itu, ia menilai
Teguh dapat memainkan per-
anan penting dalam pemban-
gungan Sumatera Utara.

“Secara pribadi, saya cukup
mengenal Bang Teguh. Beliau
adalah orang yang memiliki pe-
mikiran terbuka dan visioner,
berbasis historis, dan empiris.
Sekarang tinggal bagaimana
komunikasi dan jahitan poli-
tik yang harus dirajut sebagai
upaya dan ikhtiar politik menuju
Pilkada Sumut,” demikian Fadli.

Komunitas Mahasiswa Su-
matera Utara (KMSU) di Jakarta
dan Sekitarnya juga mendukung ke-
hadiran Teguh di bursa Pilgubsu 2024.
Teguh merupakan Dewan Pembina di
organisasi itu.

“Kami tahu, Bang Teguh memiliki
kontribusi pada pembangunan SDM
khususnya mahasiswa di Sumatera
Utara. Beliau sering menghadiri forum-
forum diskusi dan menjadi pembicara
kuliah umum seperti di USU (Universi-
tas Sumatera Utara). Bila berada di pu-
sat pemerintahan, kontribusinya akan

lebih terasa lagi,” masih kata Sukma.

Sukma mengatakan, kepedulian
Teguh pada komunitas mahasiswa
asal Sumut di Jakarta menjadi motivasi
bagi anggota KMSU untuk menuntut
ilmu sebaik mungkin dan membangun
kampung halaman.

“Bang Teguh sudah lama member-
samai KMSU. Beliau selalu terbuka
untuk diajak berdiskusi mengenai be-

khususnya mahasiswa di Sumatera
Utara. Beliau sering menghadiri forum-
forum diskusi dan menjadi pembicara
kuliah umum seperti di USU (Universi-
tas Sumatera Utara). Bila berada di pu-
sat pemerintahan, kontribusinya akan
lebih terasa lagi,” masih kata Sukma.

Di sisi lain, Sukma juga terkesan den-
gan salah satu hal yang memotivasi
Teguh sehingga ingin turun gunung.

“Yang paling utama, saya hirau
pada pembangunan di kampung
halaman kita. Kalau kita lihat da-
ta-data terakhir secara nasional,
termasuk yang baru dirilis oleh
BPS tentang Indeks Pembangu-
nan Manusia (IPM) di Indonesia.
Indeks dari kota-kota di Sumatera
Utara tidak ada yang masuk 15 be-
sar. Itu berbanding lurus dengan
situasi yang kita lihat di lapangan.
Saya merasa sudah menjadi ke-
wajiban saya untuk memperkuat
pemerintahan di Sumatera Utara,
membantu teman-teman yang se-
lama ini menjalankan roda pemer-
intahan agar hasilnya lebih baik,”
sambung Teguh yang merupakan
alumni SMAN 1 Medan.

Gerakan Pemuda Mahasiswa
Sumatera Utara (GPMSU) Se-
Jabodetabek juga memberikan
dukungan serupa. Ketua Umum
GPMSU Harun Ar Rasyid percaya
dengan kapasitas yang didukung
pengalaman panjangnya sebagai
aktivis, wartawan, dan akademisi,
Teguh dapat membantu memper-
cepat pembangunan Sumatera
Utara sehingga lebih substansial
lagi.

Dalam pelantikan GPMSU di
Pusdiklat Kementerian Agama
RI di Tangerang Selatan, Sabtu
(8/6/2024), Teguh diundang untuk
memberikan kuliah umum bertema
“Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam
Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

“Penjelasan Bang Teguh sangat baik
dan spesifik sehingga dapat mempen-
garuhi audiens. Kalimat yang diucap-
kan dapat dipahami dan mudah dic-
erna. Pengalamannya yang luas cukup
menginspirasi dan menumbuhkan ke-
mauan agar kami berusaha lebih baik
lagi, khususnya di era perkembangan
teknologi digital saat ini,” ujar Harun. •

“Bersama Kita Nyalakan Sumatera Utara”



“Untuk Tanah Lahir Kita
Yang Lebih Baik”

TEGUH SANTOSA

Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara
2024 - 2029

ragam persoalan, baik isu kebangsaan,
isu kedaerahan, juga politik global,”
ujar Sukma.

Menurut Sukma sudah waktunya
Teguh yang menyelesaikan pendidi-
kan di Universitas Padjadjaran (Unpad)
Bandung dan University of Hawaii at
Manoa (UHM), Amerika Serikat, “pu-
lang kampung” membangun tanah
kelahiran.

“Kami tahu, Bang Teguh memiliki
kontribusi pada pembangunan SDM



DUKUNGAN MELIMPAH KHOFIFAH-EMIL

Kian banyak partai politik mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Belakangan, ada yang mengungkit laporan lama terhadap Khofifah ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Senyum mengembang setiap kali pasangan Khofifah-Emil menyambangi para ketua umum partai politik. Kedatangan pasangan itu lazim beroleh rekomendasi resmi pencalonan yang harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.

Tanda tangan ketua umum dan sekjen itu merupakan salah satu syarat sahnya dukungan partai politik untuk maju di pemilihan kepala daerah, entah gubernur, bupati, maupun wali kota. Begitulah ketika pasangan Khofifah-Emil datang ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) pada Senin, 3 Juni 2024.

Alhasil, PAN menyatakan dukungan resmi untuk pasangan

yang sebelumnya menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024. Di acara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan langsung SK Rekomendasi DPP PAN untuk pasangan Khofifah-Emil.

"Kita tahu sepak terjang dan kiprah pengabdian seorang Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau mengabdikan seluruh hidupnya selama ini untuk bangsa dan negara. Jadi semoga memang ini yang terbaik, PAN memutuskan untuk kembali mengusung Ibu Khofifah dan Pak Emil untuk Pilgub Jatim 2024, semoga semua diberikan kelancaran," ungkap Zulhas, nama ringkas Ketua Umum PAN.

Pada Pilgub Jatim 2018, sambungnya, PAN sudah mengusung Khofifah dan Emil. Malah Zulhas mengaku ikut turun langsung berkampanye mendampingi Khofifah-Emil. Dia bersyukur kemenangan saat itu bisa diraih dan selama lima tahun kepemimpinan Khofifah-Emil banyak prestasi yang telah diraih dan membuat Jawa Timur semakin maju dan sejahtera.

Zulhas juga mengungkapkan, dari berbagai masukan menjelang Pilgub Jatim 2024, sebagian besar masyarakat Jawa Timur menginginkan Khofifah-Emil melanjutkan kepemimpinannya.

"Kita doakan



bersama supaya warga Jatim bisa kembali punya gubernur Ibu Khofifah dan wakil gubernur Pak Emil Dardak," ucap Zulhas.

Sebelumnya, pada pertengahan Mei 2024, Partai Golkar mengusung secara resmi pasangan Khofifah-Emil. "Tadi dalam pertemuan silaturahmi sekaligus dari badan pemenangan dari kemenangan Pemilu Partai Golkar, kami sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung Khofifah dan Emil sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2024.

Airlangga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, termasuk keinginan partainya agar Khofifah-Emil melanjutkan kembali kepemimpinan di Jatim. "Kami juga ingin melanjutkan karena dalam Pilpres kemarin Jawa Timur hasilnya baik, dan juga Khofifah dan Emil di Pilkada yang lalu juga pertama kali diberikan penugasan oleh Partai Golkar," ujarnya.

Ia mengemukakan pula, partainya konsisten untuk mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim. Selain itu, sambungnya, dukungan ini sudah dikomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Partai Golkar merupakan anggota KIM untuk mengusung Presiden-Wakil Presiden terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Partai lain yang tergabung dalam KIM meliputi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kami sudah komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya punya calon yang sama. Jadi, kalau kami lihat di Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju ini punya 52 persen (kursi dan suara di DPRD Jawa Timur). Jadi cukup, tetapi kalau yang lain (partai nonkoalisi) mau ikut, boleh," ujarnya.

Airlangga mengatakan bahwa tujuan partainya mengusung Khofifah-Emil karena tidak ingin kemajuan Jatim tidak dilanjutkan kembali oleh mereka. "Kami tidak ingin pasangan yang sangat bekerja sama baik memajukan Jawa Timur, menurunkan kemiskinan ekstrem, penanganan

COVID-19 yang baik, jadi proven leadership (contoh kepemimpinan) untuk di Jawa Timur, (sehingga) akan terus kami usung," jelasnya.

Nah, dengan hitung-hitungan KIM mencakup 52 persen suara dan akan Airlangga untuk partai lain untuk mendukung, kemungkinan pasangan Khofifah-Emil tanpa pasangan lawan menjadi terbuka. Istilahnya, melawan kotak kosong.

Toh Airlangga mengatakan partain-

"Ada kemungkinan Khofifah-Emil akan melawan kotak kosong. Pasangan ini tampaknya akan melenggang untuk periode kedua," kata Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, pada Rabu, 8 Mei 2024.

Ritonga juga berpendapat, sekiranya ada pasangan pesaing Khofifah-Emil, dukungan pemilih mayoritas akan memilih kembali Gubernur dan Wagub yang bolehlah dibilang pe-



ya masih belum membahas kemungkinan lawan Khofifah-Emil dalam kontestasi Pilkada Jatim, termasuk kotak kosong. "Kalau kotak kosong belum kami bahas," jelasnya.

Namun, pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul Jakarta sudah jauh hari melihat kemungkinan pasangan Khofifah-Emil berhadapan dengan kotak kosong di Pilgub Jatim 2024.

tahana di Jawa Timur itu. "Jika pun Tri Rismaharini (Menteri Sosial) dan Muhaimin Iskandar (Cawapres Pilpres 2024) maju, dua sosok ini belum cukup kuat menantang pasangan Khofifah-Emil," ujar Ritonga.

Hitung-hitungannya, sambung Ritonga, Khofifah-Emil adalah pasangan lengkap yang mencerminkan karakteristik masyarakat Jawa Timur. Karena itu, tukasnya, sejauh ini belum

ada lawan sepadan untuk menandingi Khofifah-Emil untuk Pilkada 2024.

"Jadi, kalau ada yang maju bersaing dengan pasangan Khofifah-Emil, mereka bisa jadi hanya penggembira. Termasuk tentunya Risma dan Cak Imin," tandas Ritonga.

Khofifah sendiri sudah menegaskan akan maju di Pilkada 2024 dan kembali berpasangan dengan Emil Dardak. Perempuan politisi yang pernah menjadi Menteri Sosial itu pun

paikan surat penugasan untuk maju di Pilgub Jatim 2024. "Sudah dari Desember (2023). Empat partai: Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Desember lalu sudah memberi surat penugasan," ungkap Khofifah.

Tambahan dukungan pun datang dari partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Jawa Timur. Seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

"Ini sebuah kehormatan buat kami

Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih 2024-2029," kata dia.

Sedangkan Khofifah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota DPP PSI maupun Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Timur yang telah menyampaikan dukungannya. "Insya Allah semua ada dalam posisi bisa saling bersinergi, saling membangun efektivitas koordinasi, dan kami kembali menyampaikan terima kasih atas kepercayaan DPP PSI,"



memastikan tidak akan bergabung sebagai menteri pada pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Oh enggak (menteri). Saya dari awal menyatakan insya Allah akan fokus di Jawa Timur saja, untuk periode ini saya akan mengikuti kontestasi Pilgub Jatim," ujar Khofifah usai mengikuti acara Halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Minggu, 28 April 2024.

Terlebih lagi, tukas Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU, sudah beberapa partai politik menyam-

di Jawa Timur. Karena Jawa Timur adalah salah satu daerah yang krusial buat PSI," kata Kaesang dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PSI, Selasa, 4 Juni 2024.

Kaesang mengatakan, kader PSI yang diperintah maju di Pilkada Jatim 2024, seperti di Surabaya, Malang, dan Madiun, akan ikut mendukung Khofifah-Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. "Saya berharap Ibu Khofifah dan Bapak Emil dapat bersinergi untuk program pemerintahan pusat yang ditransisikan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden

ucap Khofifah.

Emil juga berterima kasih atas dukungan PSI. Menurut dia semangat muda di dalam PSI masih terjaga. "Yang membahagiakan adalah akan ada sinergi muda di Indrapura (kantor DPRD Jatim). PSI 'pecah telur' dengan menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi Jatim. Insya Allah akan jadi sebuah sinergi yang sangat baik," ujarnya.

Jadi, pasangan Khofifah-Emil sudah melampaui syarat dukungan 20 persen suara DPRD atau sekitar 24 kursi dari total 120 kursi DPRD Jatim sesuai hasil Pi-

leg 2024. Pasangan ini sudah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra (21 kursi), Partai Golkar (15 kursi), Partai Amanat Nasional atau PAN (5 kursi), dan Partai Demokrat (11 kursi).

Jika ditotal, sejauh ini Khofifah telah mendapatkan dukungan 52 kursi atau sekitar 43,3 persen suara DPRD. Kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 27 kursi (22,25 persen suara DPRD), tidak ada partai lain yang bisa mengusung pasangannya sendiri.

PKB sendiri belum menentukan siapa yang akan diusung di Pilgub Jatim 2024. Mengingat panasnya hubungan Khofifah dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sejak Pilpres 2024 lalu, kecil kemungkinan bagi PKB untuk masuk gerbong pendukung Khofifah.

Apalagi, PKB memiliki privilege untuk memajukan jagoannya sendiri. Muhaimin bahkan sempat mengungkapkan, dirinya sengaja tak mengumumkan terlebih dahulu siapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung partainya.

"Siapa dia, orangnya masih rahasia. Nanti kalau bocor ketahuan Khofifah, bahaya," kata Muhaimin usai menerima kunjungan Plt Ketua Umum PPP Mardiono di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 29 April 2024.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan partainya tengah menjaring nama-nama bacagub untuk melawan Khofifah. Salah satu nama yang masuk penjarangan, yakni mantan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar.

"Kiai Marzuki jadi salah satu opsi yang kami dorong, termasuk ada nama yang sama-sama perempuan, sehingga nanti kira-kira bisa berkompetisi dengan Mbak Khofifah," kata Huda, Jumat, 17 Mei 2024.

Di tengah proses politik itu, pada Selasa 4 Juni 2024 ujuk-ujuk Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) melapor ulang kasus Khofifah saat menjadi Menteri Sosial (2014-2018) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang disampaikan ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK itu berkaitan dengan pengerjaan proyek di Kementerian Sosial (Ke-

mensos) yang diduga menyebabkan kerugian negara saat Khofifah masih menjabat sebagai Mensos.

"Yang kami laporkan, pertama, menteri (saat itu) Khofifah Indar Parawansa, kedua, PPK-nya dan KPA-nya, mereka bertiga, kata Ketua FKMS Sutikno di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Ia mengaku telah memasukkan laporan serupa ke KPK sejak enam ta-

dan validasi pendataan orang miskin dengan mengadakan musyawarah di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Namun, rata-rata fiktif.

"Itu kan orang datang, orang datang ada biaya makan, ada apa, itu rata-rata gak ada. Targetnya kan 15 juta keluarga miskin yang mau diverifikasi itu, ternyata mereka hanya memakai datanya BPS dianggap sudah diverifikasi. Fakta lapangan gak ada. Nanti



hun lalu. Namun, lanjut Sutikno, laporan itu tak ditindaklanjuti.

"Dulu, waktu enam tahun lalu kita laporkan itu kita hitung kerugiannya Rp 58 miliar, sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," ujarnya.

Sutikno menjelaskan, di Kementerian Sosial ada program verifikasi

ada fiktif yang Rp98 miliar itu," ujarnya.

Sedangkan Khofifah mengaku baru mendengar pelaporan itu. "Ya, kita lihat saja posisinya. Saya juga baru dengar ini," ucap Khofifah kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Selasa, 4 Juni 2024.

Masih perlu waktu tunggu: Apakah Khofifah melawan kotak kosong atau melawan pesaing sungguhan. Bahkan malah sekalian harus menghadapi KPK? •

SEMARAK GARUT BERSAMA PUTRI KARLINA

Putri Karlina menjadi salah satu bakal calon Bupati Garut, Jawa Barat. Kepastiannya menunggu penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum.

Menurut pengakuannya sendiri, keinginan menjadi Bupati Garut sudah muncul sejak lama. “Kalau keinginan menjadi Bupati itu sudah dari SMA kali,” ucap Putri Karlina dalam tayangan video Challenge Politic Talent yang tayang sejak awal Mei 2024.

Terlahir di Garut pada 1993, Putri adalah seorang wiraswasta (entrepreneur) berlatar belakang pendidikan di bidang kesehatan setelah lulus pendidikan Strata 1 dari Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ia menekuni pendidikan bidang bisnis dan meraih gelar Magister dari Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Jadi, dengan titelnya nama lengkap Putri adalah drg Luthfanisa Putri Karlina MBA.

Nah, menurut dia, untuk menjadi pemimpin semisal bupati, bukan hanya soal pengalaman yang diperlukan, melainkan seberapa dalam seseorang bisa memahami orang dan keadaan sekitar. Pemimpin, kata dia, bukanlah penguasa, melainkan kolaborator handal.

Oleh sebab itu, sambungnya, untuk menjadi pemimpin harus bisa memahami lingkungannya dan bisa mengenal potensi yang dimiliki agar potensi tersebut menjadi kekuatan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan kepemimpinannya.

Mengenai keikutsertaannya di Pilkada Garut 2024, Putri langsung mengi-

yakan. “Kan billboard sudah naik,” kata Putri sambil tersenyum.

Bagaimana Putri melihat kabupaten kelahirannya? “Yang belum terekplor itu Garut selatan. Selatan itu keluhannya hampir sama yaitu akses, jadi mapping-nya kesana adalah gimana caranya kita mempelajari seberapa besar probabilitas kita mengatasi problem mereka. Itulah yang

menjadi bahan political marketing. Tapi harus dilaksanain,” ujarnya.

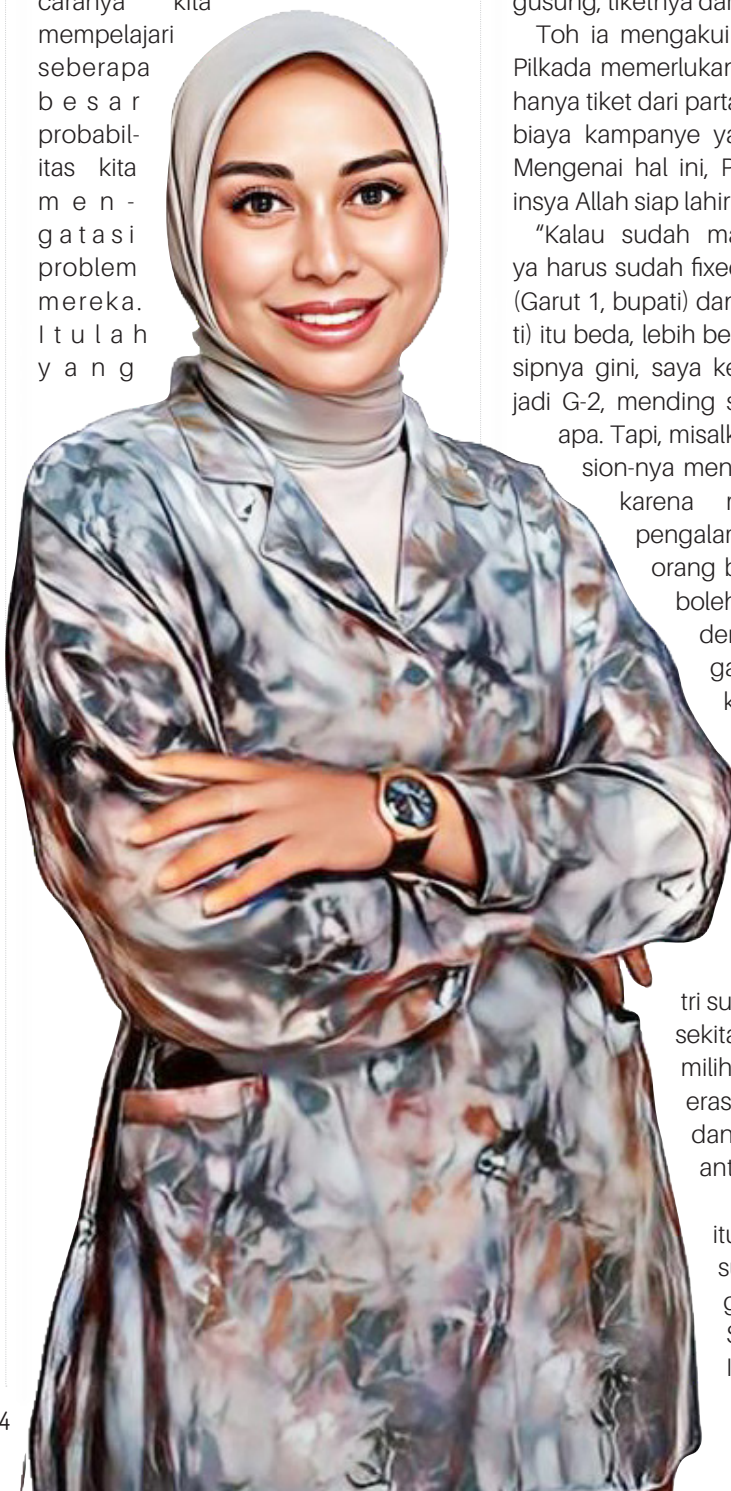
Tentang persiapannya mengikuti kontestasi, Putri mengaku sejak April sudah melakukannya. “Minggu ini masih melakukan sowan politik, harus tahu dulu nih partai mana yang mengusung, tiketnya dari mana,” kata dia.

Toh ia mengakui ikut serta dalam Pilkada memerlukan kesiapan bukan hanya tiket dari partai, melainkan juga biaya kampanye yang tidak sedikit. Mengenai hal ini, Putri menegaskan insya Allah siap lahir dan batin.

“Kalau sudah mau ikut, finansial ya harus sudah fixed, cost politik G-1 (Garut 1, bupati) dan G-2 (wakil bupati) itu beda, lebih besar G1. Tapi, prinsipnya gini, saya keluar banyak tapi jadi G-2, mending saya ga jadi apa-apa. Tapi, misalkan gini, saya passion-nya menjadi G-2 awalnya, karena menyadari usia, pengalaman. Toh banyak orang bilang kamu tidak boleh ngunci di G-2, dengan pertimbangan cost kami siap, kapabilitas pribadi siap, privilege (keistimewaan) ada,” tandasnya.

Privilege? Sebagai perempuan muda saja, privilege Putri sudah jelas lantaran sekitar 60 persen pemilih tergolong Generasi milenial (Gen Y) dan Gen Z yang lahir antara 1980-2012.

Namun, lebih dari itu, Putri ternyata sulung dari pasangan Irjen Karyoto SIK MH dan Linna Iskandar Karyoto.





Irjen Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya sejak Maret 1993 setelah sebelumnya bertugas sebagai Deputy Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nah, menurut Tata Ansorie, praktisi media lokal yang menjabat Pemimpin Umum Harian Garut News, Putri sudah terdaftar sebagai bakal calon di beberapa partai. Antara lain, Nasdem, Partai Golkar, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Mengutip hasil survei Poltracking Indonesia, Tata menyebutkan tingkat elektabilitas (keterpilihan) Putri masih rendah. "Suara untuk Putri masih berkutat di perkotaan saja, di pelosok daerah belum begitu terdengar," ujarnya.

Menurut survei Poltracking yang menghimpun data pada 19-24 April 2024, Abdusy Syakur Amin berada di urutan pertama elektabilitas sebesar 13.7 persen. Di posisi kedua, Nadiaman mengumpulkan 8.5 persen suara, disusul oleh Ade Najmullah di peringkat ketiga dengan 7.0 persen suara. Posisi keempat ditempati oleh Uu Saepudin dengan perolehan 5.2 persen, sementara Luthfianisa Putri Karlina berada di urutan kelima den-

gan 3.6 persen. Dudung menutup daftar enam besar dengan 3.1 persen suara.

Toh survei itu mengungkapkan bahwa 59 persen responden memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu mengenai pilihan mereka. Angka yang signifikan ini menimbulkan spekulasi bahwa terdapat sosok figur kuat yang belum teridentifikasi secara jelas oleh

penetapan pasangan calon pun akan lebih memperkuat posisi dan elektabilitasnya.

"Pilkada ini tampak sekali semua partai menunggu keputusan dari atas (top-down), tidak diberikan sepenuhnya berakselerasi dari bawah. Dari mulai koalisi partai hingga siapa bacalonnya, sepertinya mereka terkendalikan oleh pimpinan partai di atasnya," kata



publik.

Nah, dengan 59 persen pemilih belum menentukan pilihannya, akan lebih baik Putri berupaya meningkatkan elektabilitasnya. Selain itu, memang

Tata Ansorie.

Jadi, memang harus pasti dulu penetapan pasangan calon yang memerlukan restu partai-partai politik di tingkat pusat. Begitu pula untuk Putri. •

Pilgub Sumsel 2024

PERSAINGAN TANPA DRAMA

**Pemilihan Gubernur
(Pilgub) Sumatera Selatan
(Sumsel) 2024 diprediksi
hanya akan diikuti oleh
tiga pasangan calon (pa-
slon).**

Ketiga Paslon tersebut ada-
lah Herman Deru-Cik Ujang
(HDCU), Mawardi Yahya-
Anita Noeringhati (Matahati)
dan Heri Amalindo-Popo Ali.

Kendati sebelumnya ada lima Pa-
slon yang mencuat ke public, dua
Paslon lainnya itu, yakni Holda-Meli
Mustika (Home) dan Eddy Santana
Putra (ESP)-Andi Asmara.

Namun salah satu Paslon Home
menyatakan mundur dalam persain-
gan Pilkada Sumsel pasca Partai
Demokrat merekomendasikan Her-
man Deru-Cik Ujang.

kan rekomendasi kepada Herman
Deru-Cik Ujang, maka saya akan
tegak lurus dengan keputusan Partai
Demokrat yang telah membesarkan
dan melahirkan saya (di politik),"kata
Holda.

Holda sendiri merupakan Benda-
hara DPD Partai Demokrat Sumsel,
sedangkan Cik Ujang menjabat Ket-
ua DPD Partai Demokrat Sumsel dan
maju sebagai bakal Cawagub berpa-
sangan dengan Herman Deru

Holda yang juga Ketua Komisi IV
DPRD Provinsi Sumsel ternyata sama
sekali tidak berkecil hati, ia bahkan



Otomatis pasangan srikandi Home
yang sudah deklarasi 19 Mei 2024
itu bubar sebelum pendaftaran ke
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sum-
sel dimulai. Holda menyebut akan
tegak lurus dengan keputusan Partai
Demokrat

"Terhadap keputusan Partai
Demokrat di Jakarta yang memberi-

mengucapkan selamat atas reko-
mendasi yang diberikan DPP Partai
Demokrat kepada Pasangan HDCU.

Holda menegaskan, dirinya sudah
jauh-jauh hari mengatakan bahwa
setelah rekomendasi DPP Partai
Demokrat diterbitkan maka diriny
akan tegak lurus dengan perintah
partai.

Begitulah loyalitas Holda kepada Partai Demokrat yang diakuinya bukan terbentuk begitu saja melainkan melalui perjalanan yang panjang.

"Saya dibesarkan dan dilahirkan Partai Demokrat, 3 periode menjadi Anggota DPRD Sumsel, dan saat sekarang menjadi Bendahara DPD Partai Demokrat Sumsel," kata Holda yang sebelum terjun ke dunia politik dikenal sebagai dosen di perguruan tinggi di Palembang.

Bukan basa-basi Holda menyampaikan ucapan selamat kepada Pasangan HDCU itu, sebab ia memberikan keterangan pers didampingi jajaran Pengurus DPD Partai Demokrat Sumsel di Kantor DPD Partai Demokrat Sumsel.

Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, tidak hanya Home tetapi akan ada pasangan lainnya tidak akan mendapatkan dukungan partai.

"Home sudah resmi mundur saya prediksi hanya ada tiga paslon akan bertarung di Pilgub Sumsel 2024,"kata dia.

Dia menyebutkan pasangan Eddy Santana Putra (ESP)-Andi Asmara diprediksinya juga akan bernasib sama, sulit mendapatkan dukungan partai. Artinya hanya tiga pasangan kandidat yang benar-benar siap berlaga di kompetisi Pilgub 2024 nanti.

"Saya menilai ESP hanya tes ombak saja dan tidak akan benar-benar melanjutkan berkompetisi,"jelasnya lagi.

Dilanjutkannya Home dan ESP setidaknya sudah melakukan investasi politik kedepannya bisa melanjutkan kompetisi mereka yang sebenarnya.

"Home dan ESP setidaknya sudah masuk radar politik. Mereka bisa melanjutkan di kompetisi berikutnya bukan sekarang,"pungkasnya.

Bagindo Togar juga memprediksi Pilgub Sumsel 2024 berjalan aman dan nyaman tanpa adanya drama apa lagi konflik.

"Masyarakat Sumsel silent majority yang tidak akan terpancing dengan drama dan sebagainya. Jadi Pilgub Sumsel diprediksikan berjalan lancar,"kata dia.

Diakuinya apabila kedepannya ada

elit politik membuat kerusuhan drama seperti playing victim tidak akan termakan oleh masyarakat Sumsel yang silent majority.

"Masyarakat Sumsel lebih tenang sekarang namun hanya saja elit politik nantinya malahan berusaha mencoba mematikan konflik. Tetapi itu tidak akan berdampak kepada silent majority,"ucapnya lagi.

Menurutnya Paslon yang terlihat sudah mematikan konflik hangat Her-

hanya membuat drama saja. Lebih baik saling kritik menggunakan data dari pada saling sindir,"tuturnya.

Dipaparkannya silent majority masyarakat Sumsel wujud dari kelompok yang tidak gampang terpancing. Lebih memilih untuk diam dan menganalisa tidak akan terpancing dengan konflik politik yang akan diciptakan nantinya.

"Masyarakat Sumsel sekarang sudah semakin cerdas tidak akan



man Deru Vs Mawardi Yahya. Kedua petahan mantan Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel itu sudah saling sindir.

"Keduanya saling sindir sebaiknya sudah dikurangi saja. Karena tidak akan berefek juga kepada masyarakat

terpancing. Apabila ada intimidasi dari elit politik mereka tidak akan berdampak. Misalnya dikasih uang sekarang mereka tidak akan mau tanpa melihat dampak besar apa yang bisa diberikan kepada Sumsel,"pungkasnya. •



SATPOL PP DAN LINMAS UNTUK PEMILU DAMAI

Salah satu tantangan Pilkada serentak 2024 adalah penyelenggaraannya yang aman dan damai. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan jajaran Linmas (Perlindungan Masyarakat) akan lebih terasa.

Apa yang dikemukakan oleh Suhajar Diantoro mungkin belum terpikirkan oleh banyak kalangan. Karena Pilkada 2024 berlangsung serentak, maka pergerakan petugas keamanan, katakanlah polisi, cenderung terbatas di wilayah tugas masing-masing.

Jadi, kata Suhajar yang beberapa bulan lalu purna tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kemendagri, akan sulit mengarahkan petugas kepolisian di satu wilayah ke wilayah lain yang mengalami gangguan keamanan terkait Pilkada. Jika petugas kepolisian berpindah, maka akan terjadi kevakuman (kekosongan) yang menyebabkan wilayah yang ditinggalkan justru menjadi

rawan keamanan.

Suhajar yang sejak Maret 2024 menjadi Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini mengakui, situasi keamanan menjadi perhatian khusus lantaran eskalasi konflik umumnya lebih tinggi pada Pilkada. Sebelumnya, ketika pilkada belum seluruhnya serentak, kepolisian masih dapat mengirim perantuan personel untuk wilayah-wilayah yang potensi konfliknya lebih tinggi.

"Misalnya di kabupaten ini ada Pilkada, maka Polres di kabupaten lain akan membantu stand by kalau dibutuhkan. Sekarang enggak, maka semua polisi akan ada di tempatnya masing-masing, maka (yang dikirim untuk perantuan)

Brimob atau yang lain ya,” ucap Suhajar ketika berbicara dalam diskusi bertajuk “Pilkada Damai 2024: Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif” yang dihelat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu, 5 Juni 2024.

Nah, pada titik inilah maka peran Satpol PP dan jajaran Linmas menjadi krusial, genting. Secara positif, jika Satpol PP dan jajaran Linmas efektif menunjang keamanan Pilkada, maka Pemilu Aman dan Damai akan lebih mungkin terselesaikan.

Sebagai catatan, jajaran Linmas di masa lalu dikenal sebagai Hansip (Pertahanan Sipil). Baik Satpol PP maupun jajaran Linmas berada dalam naungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, sebagian secara struktural dan sebagian lagi fungsional.



Ini adalah pemilihan umum terbesar di muka bumi dalam sejarah. Jadi, kalau mau pecah rekor, pecah rekor sekalian

Suhajar mengatakan, pada dasarnya pengamanan Pilkada serentak 2024 masih dipegang oleh kepolisian. Sedangkan jutaan personel Linmas dan Satpol PP siap untuk perbantuan keamanan. “Jadi satu polisi akan membawahi beberapa Satlinmas,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemendagri, total ada 1.224.990 anggota satlinmas yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Namun, sekitar separuhnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, utamanya kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) serta Jawa Barat.

Sementara itu, jumlah anggota satpol PP yang saat ini tercatat mencapai 105.872 personel, dengan 29.895 di antaranya berstatus PNS. Namun demikian, ia optimistis bahwa situasi keamanan pada Pilkada Serentak 2024

tetap kondusif.

Pengalaman pada Pemilu 2024 yang digelar serentak untuk tingkat nasional dianggap menjadi bekal penting. “Di mana daerah rawan baru di sana barangkali penanganannya lebih tinggi intensitasnya. Kalau bantuan di lapangan, pengamanan di TPS, Satlinmas kita ada 1,2 juta orang, bisa diback-up oleh satpol PP 105 ribu orang,” ucap Suhajar.

mau pecah rekor, pecah rekor sekalian,” ungkap Suhajar. Termasuk pecah rekor tingkat keamanan yang terjaga tentunya.

Toh Mantan Sekjen Kemendagri ini optimistis Indonesia dapat melangsungkan pilkada serentak ini dengan baik. Ia menyinggung pelaksanaan pilkada serentak yang mulai digelar secara parsial sejak 2015, disusul Pilkada 2018. Pilkada



Meski begitu Pilkada 2024 memang agak berbeda dari sisi kerawanan keamanan karena sifat lokalitasnya, tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sementara, sebaran Satpol PP dan jajaran Linmas tidak merata antardaerah. Sedangkan pemungutan suara bakal digelar pada hari yang sama untuk 37 dari 38 provinsi tanpa DI Yogyakarta, 415 dari 416 kabupaten tanpa Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, dan 93 dari 98 kota tanpa menyertakan lima kota administratif di DKI Jakarta.

“Ini adalah pemilihan umum terbesar di muka bumi dalam sejarah. Jadi, kalau

2020 bahkan juga digelar serentak untuk sejumlah wilayah meskipun berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Namun, pengerahan Satpol PP maupun jajaran Linmas, apalagi jika memerlukan tambahan tenaga, tentu menambah biaya. Mengenai hal ini, Suhajar menegaskan, pembiayaan Pilkada Serentak 2024 sudah direncanakan jauh-jauh hari dan saat ini relatif sudah beres.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan anggaran pilkada serentak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024. Perkembangan hingga awal Juni, hampir seluruh pemerintah

daerah telah menekan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu/Panwaslu masing-masing.

Dari segi pengamanan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pengamanan dengan anggaran Rp 1,27 triliun untuk TNI dan Polri. Sebagai catatan, realisasinya masih rendah.

Boleh jadi, realisasi anggaran pengamanan ini masih menunggu tahapan Pilkada yang akan melibatkan dukungan massa sehingga aktivitas pengamanan

(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. SE yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia tersebut, salah satunya menekankan agar kepala daerah dapat membangun koordinasi lintas pihak dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.

Koordinasi dilakukan kepala daerah

damai,” tegas Mendagri dalam SE tertanggal 13 Mei 2024 tersebut.

Selain itu, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah agar memastikan realisasi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana hibah. Hal ini sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024, sekaligus SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ



pun akan lebih aktif. Misalnya, sebelum Hari H pemungutan suara, KPU masing-masing daerah akan menetapkan pasangan calon kepala daerah di setiap wilayah pada 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 nantinya bakal berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri

bersama forum pimpinan daerah; pemangku kepentingan terkait; aparat keamanan TNI, Polri, dan unsur lainnya; tokoh agama; tokoh adat; serta tokoh masyarakat lainnya. Upaya ini dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsi.

“Sehingga Pilkada Serentak Tahun 2024 terlaksana dengan aman dan

tanggal 29 September 2023 terkait ihwal yang sama.

Tak hanya itu, dalam SE tersebut Mendagri juga menekankan pentingnya kepala daerah meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan dalam mendukung Pilkada 2024. Hal ini melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi yang bertujuan mencerdaskan pemilih

serta meningkatkan partisipasi memilih. "Serta mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024," lanjutnya.

Adapun kerja sama tersebut dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Juga asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi lain, yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.

Terakhir, kepala daerah diminta melaporkan pelaksanaan SE tersebut se-



cara berjenjang kepada Mendagri melalui Sekretariat Jenderal paling lama Juni 2024.

Sedangkan dari sisi pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja, menyoroti tingkat kerawanan yang lebih tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Pilkada 2024) dibandingkan Pemilu 2024. Hal ini disebabkan

oleh persaingan yang intens antar calon kepala daerah di seluruh Indonesia.

Bawaslu mengharapkan sinergi dengan TNI, Polri, dan kejaksaan selama proses Pilkada 2024. Bawaslu telah mengidentifikasi 1.952 kerawanan, namun jumlah tersebut dianggap masih berupa perkiraan, yang dapat lebih tinggi lagi potensinya di lapangan. Menanggapi banyaknya kerawanan ini, Bawaslu menekankan tentang pentingnya sinergi kerja sama dengan pihak lain.

Kajian Bawaslu mencatat provinsi-provinsi seperti Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, NTB, dan Jawa Timur menjadi lima provinsi yang paling aktif dalam

jawab.

Hal ini, menurut Panglima TNI, jika tidak diantisipasi secara dini dan bijaksana, dapat berdampak negatif dalam bentuk perpecahan secara sosial kemasyarakatan, yang apalagi kalau sampai berbagai potensi kerawanan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Papua memiliki tingkat kerawanan tinggi karena kelompok separatis bersenjata (KSB) terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan Pilkada guna mendelegitimasi NKRI, serta mencari perhatian dunia internasional. Aksi kelompok tersebut diidentifikasi terjadi di tujuh wilayah rawan sepanjang peri-



melakukan pencegahan. Diperkirakan masa kampanye Pilkada serentak 2024 merupakan periode yang memiliki kerawanan tinggi berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), terutama dalam konteks sosial politik dan penyelenggaraannya di setiap tahapan.

Selain Bawaslu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga melakukan pemetaan terhadap kerawanan Pilkada. Panglima TNI mengingatkan antisipasi dan penanganan terhadap potensi kerawanan Pilkada 2024 yang dapat terjadi dalam bentuk kerusuhan antarkelompok pendukung dan konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Kerawanan tersebut diperkirakan akan meningkat di 15 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti Aceh dan Papua. Di beberapa daerah, konflik emosional berbasis SARA juga dapat terjadi jika politik identitas dimanfaatkan eskalasi faktor-faktor pemicunya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab. Hal ini, menurut Panglima TNI, jika tidak diantisipasi secara dini dan bijaksana, dapat berdampak negatif dalam bentuk perpecahan secara sosial kemasyarakatan, yang apalagi kalau sampai berbagai potensi kerawanan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Selain kerawanan berupa benturan fisik, kerawanan dalam konteks politik uang juga diperkirakan akan meningkat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, memberi saran agar penyaluran bantuan sosial diberhentikan saat Pilkada serentak nasional 2024. Alasannya, menghindari politisasi dari petahana atau kerabat dan menciptakan pilkada yang adil. Saran ini merupakan hasil analisis survei KPK yang menyatakan 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang.

Apapun, upaya menghadapi dan mengatasi kerawanan keamanan Pilkada 2024 di lapangan tetap akan memerlukan penunjang dari Satpol PP dan jajaran Linmas. Pemerataan sebaran dan anggarannya agar menjadi perhatian. •



HADI TJAHJANTO GARDA TERDEPAN BERANTAS JUDI ONLINE

Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto. Pembentukan Satgas Judi online tersebut tertuang dalam Keppres 21/2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

Dikutip dari berkas salinan Keppres tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan pembentukan Satgas karena kegiatan perjudian bersifat ilegal dan mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat berujung tindakan kriminal. Selain itu, kegiatan perjudian daring juga dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.

Presiden Jokowi melibatkan peran lintas kementerian/lembaga dalam mewujudkan percepatan pemberantasan perjudian online di Indonesia.

Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas, didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.

Satgas Pemberantasan Perjudian

Online juga diperkuat 26 anggota Bidang Pencegahan yang diemban oleh pejabat berwenang lintas kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan; Kejaksaan Agung; hingga TNI-Polri.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan judi, baik online maupun offline. Dia mengingatkan bahwa judi bukan hanya mempertaruhkan uang, namun juga masa depan diri sendiri, keluarga, dan anak.

"Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah. Tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga dan masa depan anak-anak kita," kata Jokowi, Rabu, 12 Juni 2024.

Tak hanya itu, kata dia, judi juga menimbulkan dampak negatif. Mulai dari, kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya angka kejahatan dan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.

"Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung, ditabung atau dijadikan mu- dah usaha," tuturnya.

Di sisi lain, Jokowi menegaskan keseriusan pemerintah memberantas dan memerangi praktik judi online di Indonesia. Jokowi mengungkapkan, hingga kini sudah lebih 2,1 juta situs judi online yang berhasil ditutup.

Dia meminta semua masyarakat dan tokoh agama saling mengawasi dan melaporkan apabila ada indikasi tindakan judi online di masyarakat. Pasalnya, judi online bersifat transnasional, lintas negara, lintas batas dan lintas otorisasi.

"Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri, pertahanan masyarakat kita sendiri dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing," kata Jokowi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menjelaskan, Satgas Judi Online yang terbentuk akan mempunyai dua tugas utama, yakni di bidang penindakan dan pencegahan.

"Untuk penindakan, tentu sasaran-nya terkait dengan akun-akun atau situs-situs judi online," kata Hadi di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Satgas tersebut akan terdiri atas lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka. Selain itu, satgas tersebut juga akan dilengkapi dengan lembaga keuangan yang bertugas melacak aliran dana dari rekening yang aktif menampung uang judi online.

Dengan pelacakan tersebut, satgas akan mudah menemukan sumber yang mengendalikan situs judi online tersebut. Setelah itu, seluruh situs judi online yang aktif juga akan diblokir oleh pemerintah.

Dari sisi pencegahan, lanjut Hadi, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan maksimal kepada masyarakat tentang bahaya judi online.

"Tidak hanya itu, perkembangan apa yang akan dilakukan satgas nanti itu juga akan kami laporkan kepada masyarakat sudah sampai sejauh mana," kata Hadi.

Hadi sendiri menyebut Indonesia sudah memasuki fase darurat judi on-

line. Menurutnya, sebanyak 80 persen pemain judi online di Indonesia berasal dari masyarakat tingkat menengah ke bawah.

Hadi mengatakan, mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah itu melakukan deposit untuk bermain judi online dengan nilai Rp100-200 ribu. Ia turut prihatin atas banyaknya korban yang terjerat judi online itu.

"Kami mohon doanya untuk bisa memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya," kata dia.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 2,3 juta pemain judi online merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun total perputaran uang dari judi online pada 2023 mencapai Rp327 triliun. Sebanyak 63 persen berasal dari akumulasi perputaran dana transaksi sejak 2017, yang totalnya mencapai Rp517 triliun. Sementara, pada tiga

situs-situs yang terdaftar di Google.

Hadi juga mengatakan, pihaknya telah memblokir setidaknya 5 ribu rekening berkaitan dengan judi online. Sayangnya, upaya itu tidak membuat judi online hilang.

Setelah diblokir, Hadi memastikan pihaknya akan menelusuri aliran dana dari rekening tersebut untuk mengungkap siapa pelaku utama dari praktek judi online itu.

Selain memblokir rekening, Hadi juga bekerja sama sama dengan jajaran Kemenkominfo dalam memblokir situs judi online yang paling banyak digandrungi masyarakat.

Hadi menambahkan, Kemenko Polhukam juga akan bekerja sama dengan Interpol dan Kementerian Luar Negeri untuk melacak sumber operasional situs judi online.

"Perlunya kita bekerja dengan Interpol dan Kemenlu untuk bisa memfasilitasi



bulan pertama 2024, angka perputaran uang untuk judi online telah mencapai Rp100 triliun.

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk membunuhanguskan judi online. Misalnya pada 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup sekitar 937.103 situs web, aplikasi, dan protokol internet yang terafiliasi judi online. Selain itu, sepanjang November tahun lalu hingga Mei 2024, tercatat 20.241 kata kunci telah diblokir peredaran di

agar server-server yang ada di luar sana bisa tidak mengakomodasi kepentingan judi online dari Indonesia," terangnya.

Dengan bekerja sama dengan Interpol, Satgas Judi Online yang terbentuk nanti akan memiliki daya jangkauan yang luas dalam menelusuri pihak yang mengoperasikan situs judi online.

Hadi menjelaskan, penelusuran itu nantinya dilakukan dengan cara mencari tahu aliran dana dari rekening yang sering dilakukan untuk menampung uang judi online. ●

NUSANTARA AIRPORT SAMBUT KEMERDEKAAN DI IKN

Kementerian Perhubungan menargetkan Bandara Nusantara Airport bisa digunakan untuk menerima tamu-tamu VIP dan negara pada Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Memang perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus yang menjadi leading sector-nya adalah Kepala Sekretariat Presiden. Kami ditugaskan secara khusus untuk persiapan bandara IKN yang sekarang namanya sudah ditetapkan menjadi Nusantara Airport," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Minggu, 16 Juni 2024.

Menurut dia, tugas Kemenhub ada-

Inti Pusat (KIPP) IKN kira-kira hanya 20 menit.

"Kami akan menggunakan bandara tersebut, bapak Presiden RI sudah menyampaikan pula tentu selain menteri, kami akan mengundang seluruh duta besar negara-negara sahabat yang akan terbang dari Jakarta ke IKN," katanya.

Progres pembangunan Nusantara Airport di IKN saat ini sekitar 50 persen. Pembangunan tersebut menghadapi suatu tantangan yakni hujan yang berlebihan.

"Sejak dua hari yang lalu kita melakukan pengondisian cuaca dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC), dan kemarin saya mendapatkan laporan sudah bagus, sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan lebih baik," kata Budi.

Budi mengungkapkan pembangunan Bandara IKN sampai saat ini masih

nal 7.350 meter persegi dan luas area bandara 347 hektare. Konsep desain terminal bandara ini akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan dan berorientasi ramah lingkungan.

Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380.

Budi juga menyatakan siap mengajukan pendaftaran Nusantara Airport secara internasional kepada International Civil Aviation Organization (ICAO). ICAO merupakan badan PBB yang membantu 193 negara untuk menjalin kerja sama dan berbagi wilayah udara demi manfaat bersama.

"Saya baru dapat nama bandara pada pekan kemarin dari Bapak Presiden. Nanti itu justru menjadi dasar kami untuk mendaftarkan Bandara Nusantara Airport secara internasional seperti Soekarno-Hatta dengan kode CGK atau Bandara Kualanamu dengan kode KMO," kata Budi.

Nantinya Bandara Nusantara Airport di IKN akan memiliki kode nama bandara seperti halnya bandara-bandara lainnya di Indonesia.

"Jadi nanti akan ada nama kode untuk Bandara Nusantara Airport, misalnya NAP atau lainnya, nanti kita lihat kode-kode yang belum digunakan tempat yang lain," kata Budi.

Sertifikasi untuk Nusantara Airport ke ICAO ditargetkan dapat selesai dalam waktu sebulan.

"Kita akan segera menetapkan nama Bandara Nusantara Airport, dan setelah itu dengan dasar tersebut kita mendaftarkan secara internasional," ujar Budi.

Dia berharap sebelum HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di IKN, sertifikasi Bandara Nusantara Airport sudah bisa selesai. Bandara tersebut juga berpotensi bisa menjadi bandara komersial.



lah menyelesaikan Nusantara Airport pada Agustus, sehingga para tamu VIP dan negara yang datang ke IKN menggunakan pesawat bisa langsung mendarat di bandara tersebut.

Budi mengungkapkan, waktu tempuh dari Nusantara Airport ke Kawasan

sesuai rencana dan dikerjakan dengan baik. Menhub optimistis dengan progres pembangunan Bandara IKN yang berjalan dengan baik dan sesuai rencana maka dapat diujicobakan pada Juli 2024.

Bandara IKN mempunyai luas termi-

Selain itu, Budi juga memastikan penerbangan ke IKN dan bandara-bandara di sekitarnya ditambah dalam rangka HUT Kemerdekaan RI di Nusantara.

"Pasti, jadi kita memang sudah mengoordinasikan dengan beberapa pihak yang ada di Indonesia apakah Garuda Indonesia, Citilink, Lion Group, AirAsia untuk melakukan penambahan (penerbangan)," ujar Budi.

Penambahan penerbangan ke IKN tersebut penting, mengingat kegiatan relatif masif dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI. "Terutama berkaitan dengan kegiatan sejak 1 Agustus di mana kegiatan di IKN relatif masif," kata Budi.

Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, mengatakan, perayaan HUT Ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024 merupakan upacara selamat datang. Pelaksanaan upacara tersebut akan dilakukan secara hybrid di dua tempat yakni IKN di Kalimantan Timur serta di Jakarta.

Untuk di IKN akan ada Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan di Jakarta digelar bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Kendaraan Listrik Tamu VIP

Di sisi lain, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan tamu-tamu VIP untuk HUT ke-79 RI di IKN harus menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Kita nanti akan lakukan simulasi apakah setiap duta besar negara-negara sahabat diberikan satu mobil listrik atau apakah menggunakan bus listrik ini merupakan domain dari Kementerian Sekretariat Negara," ujar Budi.

Budi mengaku belum mengetahui hal tersebut karena itu merupakan domain Setneg. Namun, dia memastikan angkutan darat di IKN terbagi menjadi beberapa fungsi.

"Pertama adalah fungsi dari luar, terutama dari Balikpapan ke IKN, kita memiliki fasilitas ride and park dan dari situ kita keliling dengan menggunakan bus atau mobil yang disediakan

atau dimiliki oleh para operator swasta untuk menuju tempat-tempat akhir," katanya.

IKN sendiri menyediakan bus-bus listrik yang memiliki rute mengelilingi tempat-tempat yang strategis.

"Tetapi juga untuk operator swasta ada Blue Bird, Gojek dan lainnya di

rute Park & ride sampai Botanical Garden total kebutuhan armada 7 bus medium; dan rute Park & ride 1 sampai Park & ride 2 dengan total kebutuhan 21 armada.

Sementara itu, Otorita IKN juga berencana bekerja sama dengan Blue Bird untuk melayani rute di dalam IKN



mana mereka akan mengisi ruang-ruang komersil yang digunakan secara individu," kata Budi.

Terkait layanan bus listrik, Kemenhub telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan mengusulkan 3 rute trayek.

Ketiga trayek tersebut yakni rute Park & Ride sampai Masjid Raya dengan total kebutuhan 13 bus medium;

atau KIPP tahap 1, dalam hal ini terkait pengadaan bus listrik dan rencana operasionalnya.

Kemudian, untuk 2025 telah diusulkan anggaran Buy the Service (BTS) untuk melayani rute IKN. Terkait rencana rute akan menyesuaikan dengan persil tanah yang sudah terbangun, sedangkan jumlah kebutuhan armadanya masih menunggu kajian dan review dari tim OIKN. ●

DIGITALISASI KESEHATAN LEWAT TEKNOLOGI AI

Kementerian Kesehatan meyakini perkembangan teknologi AI Generatif atau kecerdasan buatan di bidang kesehatan akan membawa perubahan signifikan bagi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia.

"Saya percaya bahwa saat ini teknologi terus berkembang, yang pada akhirnya juga akan mengubah humanity," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa, 4 Juni 2024.

Menkes mengatakan penggunaan teknologi AI pada bidang kesehatan setidaknya akan memberikan dukungan kesehatan yang lebih akurat. Hal itu mengingat bahwa dalam tubuh manusia terdapat lebih dari 30 juta gen, 87 miliar neuron yang mayoritas berada di otak, 300 triliun sel, dan 37 triliun mikrobioma yang saling terhubung dan mempengaruhi kesehatan manusia.

"Bisa dibayangkan kalau kita menggunakan metode empirik seperti pada umumnya untuk mempelajari ini semua, maka akan ya

teknologi AI harus digunakan secara maksimal, lebih dari bermain catur atau bahkan bahasa program ChatGPT, untuk mengetahui bagaimana sistem tubuh bekerja secara ilmiah," ujar Budi.

Melalui analisis menyeluruh dari kecerdasan buatan tersebut, kata Menkes, hasilnya dapat digunakan untuk membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat kepada seluruh pasien.

Dia menilai peran lain dari teknologi AI yaitu mengubah cara kerja kedokteran dan membantu dokter dalam mendeteksi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dengan lebih mudah, cepat, dan presisi.

"Sebelumnya dokter deteksi penyakit jantung menggunakan stetoskop, mendengarkan detak jantungnya, lalu didiagnosis menderita jantung.

Menurut saya ini tidak ilmiah bagaimana, mungkin dokter tahu kalau itu penyakit jantung hanya dari suaranya," kata Menkes.

Kemudian, teknologi berkembang dengan adanya elektrokardiografi untuk mengetahui pergerakan grafiknya. Kemudian berkembang lagi dengan kemunculan

teknologi CT Scan yang bisa mendeteksi penyakit jantung dengan melakukan scan pada dada.

Selain itu, yang terbaru ada pemeriksaan gen untuk mengetahui mutasi gen dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit jantung. "Yang ingin saya katakan adalah (teknologi AI) ini akan mengubah sektor kesehatan secara besar-besaran," kata Budi.

Meski demikian, Budi menjelaskan pemanfaatan AI di bidang kesehatan sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah menggunakan teknologi WhatsApp (WA) untuk menyediakan layanan telemedicine saat pandemi COVID-19 dan menyediakan layanan internet untuk puskesmas di daerah terpencil menggunakan teknologi Starlink.

"Ke depan saya berharap Google bisa membantu pemerintah untuk menyediakan layanan geotagging sehingga bisa membantu memetakan penyakit di daerah. Dengan begitu saya percaya teknologi AI akan mengubah sektor kesehatan secara besar-besaran," ujar Menkes.

Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam, mengungkapkan, Google berkomitmen penuh membantu Pemerintah Indonesia memaksimalkan digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia.

"Mulai bulan lalu,

Google berkolaborasi dengan Kemenkes untuk menerapkan AI dalam pelayanan kesehatan seperti kemungkinan penerapan generatif AI dalam platform SatuSehat," ucapnya.

Dukungan tersebut sejalan dengan

cetak biru Pemerintah Indonesia untuk transformasi digital dan inisiatif visi Indonesia digital tahun 2045.

Sebelumnya, Staf ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi Kesehatan, Setiaji, mengatakan, penggunaan AI akan mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien saat berobat baik secara fisik di rumah sakit maupun secara daring.

"Digitalisasi kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan medis di masa depan," kata Setiaji dalam acara Sysmex Indonesia CEO Forum 2024 di Jakarta bulan lalu.

la mengatakan, pemanfaatan AI bisa

AI untuk chatbot assistant yang mampu menjawab pertanyaan dan kebutuhan pengguna, dapat membantu dalam pencarian tenaga medis dan informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Ketepatan diagnosis dari AI juga dibutuhkan agar pasien mendapatkan kejelasan mengenai penyakitnya dan dokter akan dengan mudah memberikan perawatan sesuai dengan informasi yang didapat dari aplikasi tersebut. Selain itu, integrasi dari riwayat rekam medis pasien juga bisa ditingkatkan dengan AI agar dokter bisa mendapatkan informasi yang jelas sebelum bertemu pasien.

dari tahap pengumpulan data, proses memasukkan data, analisis hingga saat dimanfaatkan.

"Di Satu Sehat pasien bisa memberikan wewenang akses informasi kesehatannya untuk bisa dilihat sepenuhnya, dilihat setengah atau ditutup sepenuhnya, boleh apa nggak di download," katanya.

la berharap dengan kontribusi berbagai pihak dan perusahaan yang mendukung teknologi kesehatan dapat terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Retantyo Wardoyo, meny-



Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam.

sangat berguna untuk kemudahan dokter mendiagnosa pasien dan juga meningkatkan angka kesembuhan karena lebih cepat diobati.

Saat ini, analisis AI telah bisa mendeteksi 124 penyakit kanker paru-paru dengan menggunakan x-ray. Perpaduan antara teknologi AI dan x-ray mampu menghasilkan pencitraan yang lebih akurat dan cepat.

AI juga akan dimanfaatkan pada aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan, di mana nantinya pasien pengguna aplikasi bisa memanfaatkan fitur chat untuk mendeteksi penyakit yang diderita dengan akurat bahkan sebelum bertemu dokter. Dengan menggunakan

"Coba bayangkan kalau dokter tahu penyakitnya apa begitu pasien datang, bukan hanya bisa di faskes kotanya saja tapi seluruh faskes Indonesia, kalau bisa dideteksi lebih awal akan sangat bagus sekali," katanya.

Menerapkan AI dalam bidang kesehatan memang memiliki banyak tantangan, mulai dari kekhawatiran pengguna terhadap keamanan data hingga integrasi dari konvensional ke digital yang masih belum banyak masyarakat pahami.

Untuk itu secara Undang-Undang, Kemenkes sudah berupaya memberikan rasa aman kepada pengguna dengan prinsip perlindungan data pribadi mulai

takan AI dapat menjadi solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kualitas layanan kesehatan.

"Penerapan AI telah berkembang sangat pesat dan telah merevolusi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan," ujar Retantyo di Yogyakarta, Kamis, 30 Mei 2024.

Lewat analisis yang menyeluruh, AI dapat memberikan dukungan kesehatan mental yang personal dan terfokus. "Hal ini termasuk pengenalan pola perilaku dan perubahan mood sehingga memungkinkan intervensi yang lebih tepat dan akurat," ujar Guru Besar UGM Bidang Algoritma dan Komputasi ini. •



MENYAPA MASYARAKAT LEWAT KEARIFAN LOKAL

Ada banyak kegiatan budaya dan kearifan lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk keanekaragaman masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai momen ini dimanfaatkan maksimal Penjabat Bupati Muba, Sandi Fahlepi menyapa warga dari berbagai pelosok wilayah.

Salah satunya dengan menghadiri langsung Festival Tirta Mulyo Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang. Digelarnya acara ini sebagai bentuk apresiasi terhadap desa wisata. Dimana festival yang digelar ini, sebelumnya diselenggarakan di Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Jirak Jaya yang sebagian besar warga eks transmigrasi.

Acara yang berlangsung pada Sabtu (8/6/2024) di Lapangan Sepakbola Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang itu dihadiri langsung Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi bersama istri Hj Triana

Sandi. Bahkan mereka berduet bersama dengan artis ibukota Gita Youbi menyanyikan sebuah lagu Cucak Rowo. Duet maut ini membuat ribuan warga Kecamatan Keluang ikut bernyanyi terbawa suasana yang begitu asyik dan menghibur.

Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi mengatakan, terima kasih kepada masyarakat di Kecamatan Keluang khususnya yang berada di Desa Tegal Mulyo yang sangat antusias untuk menikmati hiburan rakyat ini.

"Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan bisa memberikan

hiburan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sandi juga mengaku, dirinya sangat mengapresiasi masyarakat yang memadati Lapangan Sepakbola Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang.

"Saya sangat senang sekali jika dalam event-event seperti ini kita semua mampu menjaga diri untuk tertib dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.

Selain hadir di berbagai kegiatan budaya, Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi juga rajin menyambangi warga sebagai upaya menyerap aspirasi dari

masyarakat secara langsung dengan mengadakan Safari Jumat. Orang nomor satu di Bumi Serasan ini, memanfaatkan Safari Jumat sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

"Safari Jumat ini rutin diselenggarakan setiap desa untuk mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Muba dengan masyarakat, disamping meninjau secara langsung kondisi infrastruktur dan menyerap aspirasi sebagai masukan dalam mengambil kebijakan," tutur Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi.

Dia mengatakan, kegiatan ini juga bagian dari melestarikan syiar agama Islam, untuk menjadikan bagian penting dalam nilai-nilai Islam, sehingga dapat tersampaikan dengan baik dan benar menuju masyarakat Madani yang religius, Qur'ani dan berakhlakul karimah.

"Alhamdulillah di momen ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Mari terus tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kita, agar anak-anak kita kelak terlahir sebagai generasi yang berakhlak mulia dalam syiar Islam. Mari kita jaga hubungan baik agar zona konflik tidak tercipta di Kabupaten Muba," ujarnya.

Ditambahkan Pj Bupati Muba, dengan silaturahmi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat akan terbangun pengetahuan dan pemahaman secara baik dan benar berbagai kebijakan pembangunan. Sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari pembangunan ikut aktif dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

Untuk itu dia berharap agar sinergitas masyarakat dengan pemerintah tetap terus dilakukan dengan baik. Dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah, untuk pembangunan secara merata di Muba akan sangat dibutuhkan. Pemkab Muba akan berusaha memberikan pelayanan masyarakat sebaik mungkin dan mendengarkan keluhan masyarakat.

Hadir di Tengah Masyarakat

Pj Bupati Sandi Fahlepi juga turun langsung di berbagai kegiatan dan program Pemkab Muba yang melibatkan

masyarakat seperti Operasi Pasar guna menekan dan mengendalikan laju inflasi di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Muba.

Sandi Fahlepi mengatakan, pelaksanaan kegiatan operasi pasar kali ini disamping untuk menjaga pengendalian inflasi daerah juga untuk menjaga stabili-

terkendali melalui OPD terkait dengan melaksanakan operasi pasar beras yang bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel.

"Kepada masyarakat Kecamatan Sungai Lilin kami harapkan kiranya kegiatan operasi pasar ini dapat dimanfaatkan



tas harga barang kebutuhan pokok dan menjamin keamanan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pemkab Muba akan terus berkomitmen untuk mengupayakan agar kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap tersedia cukup dengan harga yang

dengan sebaik-baiknya dan dapat meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama beras. Saya juga berharap masyarakat dapat berinovasi dengan memanfaatkan halaman rumah untuk di tanam cabe dan lainnya," ujarnya. •



Presiden RI, Joko Widodo

BULOG AMANKAN BERAS KAMBOJA PERTAMINA EKSPANSI KE BRASIL

Presiden Joko Widodo mendorong badan usaha milik negara melakukan ekspansi bisnis di luar negeri demi menjaga kebutuhan dalam negeri di berbagai bidang.

Saat menghadiri HUT ke-52 HIPMI di Hotel Fairmont Jakarta, Senin, 10 Juni 2024, Jokowi menyetujui usulan agar Perum Bulog dapat menyuntikkan dana ke produsen beras di Kamboja dan mendukung PT Pertamina untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan gula dan etanol asal Brasil.

Usulan agar Perum Bulog dapat menyuntikkan dana ke produsen beras di Kamboja diyakini dapat memberikan kepastian stok cadangan beras negara.

"Proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi yang aman," kata Jokowi.

Menurutnya, aksi korporasi yang dilakukan oleh Bulog nantinya akan

mengurangi tren pembelian atau impor beras domestik secara bertahap. "Dari pada beli ya lebih bagus investasi," ujar Jokowi.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku mendapat instruksi dari Jokowi untuk menjalankan proses akuisisi perusahaan beras asal Kamboja. Perum Bulog kini masih melakukan uji tuntas atau due diligence dengan mempelajari data perusahaan tersebut.

"Bulog akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja dan presiden sudah perintahkan saya untuk tindak lanjut," kata Luhut.

Dia menambahkan, proses pembangunan ke depan harus mengantisipasi efek tren global saat ini seperti perubahan iklim, peningkatan demografi



Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

dan kondisi geopolitik. Menurut Luhut, pembangunan ke depan juga harus mengantisipasi efek tren global saat ini.

"Kalau kita lihat, ketahanan pangan saat ini menjadi sangat penting," ujar Luhut.

Sebelumnya, Jokowi melangsungkan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa, 5 Maret 2024. Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, serta menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini.

Selain itu, Jokowi dan Hun Manet juga membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Jokowi mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah impor beras.

Menurut Jokowi implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong

khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras. Kamboja sebelumnya telah mengirimkan 3.500 ton beras ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, pada 2 November tahun lalu.

Jumlah beras yang telah dikirim Kamboja setara 1,4 persen dari rencana Jokowi untuk mengimpor 250.000 ton beras dari Kamboja. Keinginan tersebut terucap saat Jokowi melaksanakan pertemuan bilateral dengan Hun Manet di Istana Negara, Jakarta, 4 September 2023. Dalam pertemuan



VP Corcom Pertamina, Fadjar Djoko Santoso

tersebut, Jokowi juga menyinggung soal rencana pemerintah untuk membeli beras seberat 250.000 ton dari Kamboja.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan praktik kepemilikan perusahaan pangan di luar negeri merupakan hal yang umum ditemui di berbagai negara.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan sejumlah negara seperti Cina dan Malaysia telah lebih dulu menjalankan praktik kepemilikan perusahaan pangan di luar negeri. Langkah ini diyakini dapat memberikan kepastian stok cadangan beras bagi negara.

"Malaysia punya lahan pertanian di Australia. Biasanya beberapa negara tidak memungkinkan produksi di negaranya," kata Arief di Istana Merdeka

diproduksi di satu negara atau wilayah diimpor ke negara atau wilayah lain. Tujuan impor adalah untuk konsumsi atau penjualan.

Arief memberi contoh kegiatan transaksi pangan di Singapura sebagai negara kota dengan lahan yang terbatas dan tidak memiliki basis pertanian besar. Meski begitu, Singapura dikenal sebagai pusat logistik dan distribusi penting di Asia Tenggara.

Menurut Arief, banyak perusahaan multinasional menggunakan Singapura sebagai basis operasi regional untuk distribusi produk pangan dan pertanian ke negara-negara di sekitarnya.

"Kalau konsepnya traders sebagai perdagangan dunia kenapa tidak? Banyak kok negara lain punya home base di Singapura, kemudian trading

jangkauan geografis, tetapi juga tentang mewujudkan keunggulan kompetitif rantai pasok beras, sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan salah satu visi transformasi kami, untuk menjadi pemimpin rantai pasok pangan terpercaya," kata Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, Jumat, 14 Juni 2024.

Menurutnya, investasi pangan ke Kamboja merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjawab tantangan ketahanan pangan.

"Kami siap melaksanakan penguasaan tersebut, termasuk melakukan komunikasi dengan beberapa pelaku usaha beras di sana. Kerja sama perdagangan beras yang baik dan telah



Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi

Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024.

Kendati demikian, Arief mengakui langkah akuisisi perusahaan beras merupakan langkah alternatif apabila produksi beras dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Dia melanjutkan, beberapa negara dunia saat ini menerapkan sistem bisnis yang melibatkan lintas batas negara atau crossborder. Fenomena ini merujuk pada praktik di mana produk pangan dan komoditas pertanian

jual beli. Jadi, misalnya trading di luar negeri, maka menanam di manapun bisa saja, bebas," ujar Arief.

Perum Bulog sendiri mengatakan akan melakukan kerja sama ekonomi dan investasi pangan dengan Kamboja. Upaya ini ditempuh dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menerapkan keunggulan kompetitif rantai pasok beras.

"Penugasan pemerintah untuk melakukan investasi pangan ke Kamboja bukan hanya tentang memperluas

terjalin dengan Kamboja selama ini, diharapkan dapat meningkat sejalan dengan rencana kerjasama ekonomi dan investasi pangan Perum Bulog di sana," katanya.

Pakar Pangan Indonesia, Tito Pranolo, mengungkapkan, keberadaan Kamboja sebagai produsen beras yang semakin diperhitungkan di Asia Tenggara pada 2023 (menurut peringkat SeaSia.co).

Negara ini memiliki tanah yang subur untuk menanam beras karena secara

geografis terletak di pinggir Sungai Mekong dan anak-anak sungainya menyediakan sumber air yang melimpah untuk irigasi. Hal ini tentunya sesuai untuk tanaman padi yang membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Karakteristik kesuburan tanahnya juga menyerupai tanah di pulau Jawa.

"Beberapa negara memang sudah mulai menaruh minat untuk melakukan investasi pangan di Kamboja. Contohnya negara Qatar yang sempat mengalami masalah ketahanan pangan, menunjukkan minat untuk melakukan investasi agro di Kamboja. Lahan yang murah serta daerah pertanian yang subur, membuat Kamboja memiliki potensi besar pada industri pertanian," ujarnya.

Ekspansi Pertamina

Presiden Jokowi mendorong PT Pertamina memperluas operasi bisnis perusahaan dengan melakukan ekspansi ke kegiatan bisnis masa depan yang berorientasi pada praktik ekonomi berkelanjutan. Pernyataan Jokowi sekaligus menegaskan arahan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kepada Pertamina untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan gula dan etanol asal Brasil.

"Saya kira Pertamina perlu ekspansi ke-

uar, itu adalah hal biasa untuk keuntungan perusahaan dan juga untuk melihat bisnis dan ekonomi masa depan," kata Jokowi.

Jokowi meyakini Pertamina sudah melakukan perhitungan dan kajian ekspansi bisnis untuk mendatangkan kemanfaatan secara optimal kepada negara.

"Saya kira proses yang dilakukan oleh Pertamina sekarang itu menuju ke sana. Saya yakin semuanya sudah dikalkulasi," ujar Jokowi.

Adapun Luhut mengatakan Pertamina kini masih melakukan uji tuntas atau due diligence dengan mempelajari data perusahaan tersebut. Luhut tak mengatakan secara jelas identitas perusahaan gula dan etanol Brasil yang akan diakuisisi oleh Pertamina. Namun, ia menjelaskan, lewat akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina akan meningkatkan kualitas bensin domestik secara bertahap melalui campuran bioetanol.

Menurut Luhut, apabila wacana itu terwujud, Pertamina mampu menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar menjadi 50-60 ppm dari kondisi saat ini di level 500 ppm dalam jangka waktu 3 tahun.

"Sehingga nanti Pertamina memiliki sumber energi dan sumber gula dari Brasil yang akan membuat ketahanan energi kita bagus," ujar Luhut.

Jokowi juga telah berupaya untuk menebalkan cadangan pasokan bioetanol di dalam negeri. Hal itu diambil guna mendukung langkah Pertamina untuk merilis BBM campuran

puran Pertamax beroktan 92 dengan bahan bakar nabati bioetanol dalam waktu dekat.

Dukungan tersebut diwujudkan dalam pengesahan Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati atau Biofuel yang ditetapkan pada 16 Juni 2023.

Untuk mempercepat swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai biofuel, kepala negara menetapkan sejumlah peta jalan strategi. Jokowi juga mendorong peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare. Target ini dimaksimalkan melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.

Perpres tersebut juga mengamanatkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan. Adapun peta jalan meliputi rencana jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kiloliter (kl) paling lambat pada 2030.

Di sisi lain, Brasil telah sukses memanfaatkan tanaman tebu menjadi bioetanol untuk campuran BBM. Dengan luas lahan tebu 9,5 juta hektare, saat ini, Negeri Samba mampu memproduksi bahan bakar nabati (BBN) bioetanol dengan komposisi bauran 27 persen tetes tebu dan 33 persen bensin atau E27.

Sementara itu, PT Pertamina masih melakukan kajian terhadap proses akuisisi pabrik gula dan etanol di Brasil. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperluas bisnis perusahaan.

"Saat ini masih dalam tahap kajian secara komprehensif untuk mendapatkan hasil terbaik," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Selasa, 11 Juni 2024.

Perusahaan, kata Fadjar, akan menjalankan amanah pemerintah dalam hal menjaga ketahanan energi nasional. "Khususnya di era transisi energi untuk mencari sumber energi baru terbarukan," ujarnya. •



VP Corcom Pertamina,
Fadjar Djoko Santoso

DARI ISTANA NEGARA KE PERCEPATAN IKN

Heboh berita Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakilnya lengser datang dari Istana. Presiden Jokowi malah langsung terbang berkunjung ke IKN.

Pengumuman itu seperti datang tiba-tiba. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin pagi, 3 Juni 2024.

Lewat tengah hari, Presiden Jokowi terbang ke Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk berkunjung ke lokasi IKN yang semula merupakan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Masih sempat pula Jokowi mengunggah video perjala-

ony masih menjadi berita heboh di berbagai media dalam jaringan (daring) meski Jokowi sudah mendarat di Balikpapan. Malah, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus seperti memblejeti penyebab Bambang dan Dhony lengser dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Sitorus mengemukakan telah beroleh informasi lengsernya Bambang dan Dhony bukan mundur, melainkan dimundurkan. Ia menjelaskan, keduanya harus lengser lantaran tak mampu memenuhi target-target pengembangan IKN.

"Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan," kata Sitorus, Senin, 3 Juni 2024

Ia pun membeberkan sejumlah target yang meleset itu. Sitorus mengemukakan, masalah pertanahan atau status lahan yang tidak kunjung selesai dan menimbulkan banyak masalah atau konflik sepertinya menjadi alasan keduanya dinilai tak layak mengisi posisi tersebut.

"Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya. Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso," ujarnya.

Selain itu, kata Sitorus, terlalu banyak larangan dalam pembangunan IKN membuat pekerjaan konstruksi lambat. "Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan," ujarnya.

Menurut dia, berbagai kendala tadi menyulitkan proses konstruksi. "Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur, akhirnya jadi lamban karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan," sambungnya.

"Syarat 'green construction company' bikin para kontraktor juga kela-



nannya itu di media sosial Instagram.

"Siang hari ini saya meluncur ke Balikpapan akan ke IKN Nusantara. Ini kita akan melihat progres perkembangan pembangunan, yang kedua juga akan melakukan peletakan batu pertama groundbreaking ke beberapa institusi pendidikan," kata Jokowi yang ketika mendarat disambut oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Jokowi mengungkapkan agenda acara lainnya di IKN. "Dan juga melihat persiapan untuk upacara 17 Agustus yang akan datang," sambungnya.

Toh lengsernya Bambang dan Dh-

bakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan. Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya,” ungkap Sitorus yang terpilih duduk di parlemen dari Kalimantan Utara itu.

Apa yang dikemukakan oleh Deddy Sitorus masuk akal. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljo yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Otoritas IKN setelah Bambang mundur menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberinya mandat untuk mempercepat realisasi program pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui penyelesaian persoalan status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus IKN.

Pak Bas menambahkan, percepatan program pembangunan IKN fokus pada urban design yang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Toh menurut dia, pelaksanaan program tersebut terganjal persoalan status tanah untuk kepentingan investasi di IKN.

Untuk mengatasi itu, kata Pak Bas, Presiden Jokowi mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Investor, sambungnya, memerlukan kepastian hukum atas status tanah di IKN untuk menjamin investasi mereka.

“Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual atau disewa? Kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi,” ujarnya.

Selain itu, keduanya diberi tugas untuk mempersiapkan embrio skema Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN, seiring dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. “Karena nanti begitu Perpres (Peraturan Presiden) ditandatangani Bapak Presiden tentang IKN maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut. IKN tidak serta merta menjadi Pemdasus karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN,” ujarnya.

Pemdasus, tambahnya, akan disiapkan tersendiri. Menurut Pak Bas,

yang akan berperan adalah satuan tugas bersama Kementerian Dalam Negeri.

Lantas, apakah kunjungan Presiden ke IKN Senin siang yang berlanjut dengan acara Selasa, 4 Juni 2024 itu karena lengsernya Bambang dan Dhony menjadi kendala penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun

(PAN) di kantor partainya, Senin, 3 Juni 2024. Ia pun menyatakan siap hadir di IKN mendampingi Presiden Jokowi di acara peninjauan Selasa, 4 Juni 2024.

Lebih jauh lagi, Zulhas menyatakan lengsernya Bambang dan Dhony bukan hal baru baginya. “Yang saya dengar ini memang sudah beberapa



(HUT) ke-79 Proklamasi RI yang terjadwal berlangsung di IKN?

Pak Bas menyangkalnya. “Enggak (terkait dengan 17 Agustus). Itu beda lagi,” kata dia.

Sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengemukakan, urusan 17-an di IKN tak berubah dan pengembangan wilayahnya pun berlanjut. “Jalanlah, sudah jalan kok, sudah jadi (IKN-nya),” kata Zulhas, nama ringkas Mendag yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional

waktu lalu, saya punya salah satu eselon II di Kemendag (Kementerian Perdagangan) kan sekarang menjadi direktur investasi dan pengembangan di IKN. Nah, jadi saya sudah tahu berita ini. Jadi bukan barang baru sebetulnya, mungkin soal-soal percepatan begitu ya,” ungkapnya.

Ya, kembali lagi ke perencanaan dan jadwal tahapannya kalau begitu. Selanjutnya Pak Bas dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang akan menjadi sorotan. ●

HUT RI DI IKN SUDAH MEPET ISTANA PRESIDEN BELUM 100 PERSEN

Pemerintah akan menggelar upacara 17 Agustus 2024 untuk pertama kalinya di IKN Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Istana Kepresidenan bisa digunakan untuk presiden menginap saat perayaan HUT Kemerdekaan RI di ibu kota baru meski belum 100 persen rampung.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mencatat perkembangan konstruksi Istana Kepresidenan kini 73 persen. Sementara itu, konstruksi Kantor Presiden telah mencapai 89,99 persen.

"Kami tetap targetkan konstruksi Kompleks Istana Kepresidenan selesai pada Oktober 2024. Namun, Kompleks Istana Kepresidenan akan kami operasikan secara fungsional kalau presiden mau tinggal di sana," kata Danis di kantornya, Jumat, 14 Juni 2024.

Ia menargetkan konstruksi kompleks Istana Kepresidenan mencapai 95 persen pada Agustus 2024. Jaringan listrik dan fungsi-fungsi mekanis di Kompleks Istana Kepresidenan sudah dapat berfungsi penuh pada saat itu.

Oleh karena itu, menurut Danis, presiden sudah dapat bermalam di lantai mezzanine Istana Kepresidenan pada Agustus 2024. Namun, ia menekankan

dirinya belum mengetahui lokasi presiden bermalam menuju 17 Agustus 2024.

Danis mencatat, 5 persen pekerjaan konstruksi yang belum selesai saat itu adalah penyelesaian beautifikasi dan pemasangan tanaman di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan.

Adapun pemasangan bilah sayap garuda yang menjadi bagian Istana Kepresidenan akan selesai dipasang pada rentang 23-27 Juni 2024. Total bilah sayap garuda yang dipasang di Istana Kepresidenan mencapai 4.650 unit.

Danis menyampaikan, Istana Kepresidenan dan Kantor Presiden telah didesain dengan konsep bangunan pintar dan bangunan hijau.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan konstruksi Istana Kepresidenan di IKN bertujuan untuk menghadirkan bangunan istana kepresidenan bernuansa peradaban asli nasional tanpa unsur kolonial. Jokowi mengata-



kan pendirian Istana Presiden di IKN dibangun dengan kerja dan produk bahan baku dalam negeri.

Jokowi mengatakan pendirian Istana Presiden di IKN dibangun dengan kerja dan produk bahan baku dalam negeri. Jokowi menceritakan, dirinya kerap mendapat sanjungan dari para pimpinan negara yang berkunjung ke sejumlah Istana Kepresidenan, seperti Istana Merdeka Jakarta, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Bogor hingga Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Namun, ia menyebut bangunan tersebut tidak bisa dibanggakan lantaran bukan buatan Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pendirian Istana Presiden di IKN sebagai momentum memunculkan gedung presiden yang bukan peninggalan kolonial. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda

"Inilah salah satu hal yang ingin dikerjakan sehingga kita punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Kepribadian dalam budaya," ujar Jokowi.

Danis juga memastikan utilitas seperti listrik, air, internet, dan gas di IKN Nusantara akan beroperasi penuh sebelum 17 Agustus 2024. Dengan demikian, seluruh bangunan di IKN dapat beroperasi secara fungsional.

Danis menjadwalkan uji coba pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Bersih di IKN pada akhir bulan ini. Kapasitas infrastruktur tersebut dirancang sebesar 300 liter per detik dari kapasitas penuhnya yang mencapai 2.500 liter per detik.

"Air bersih itu pertengahan Juli atau minggu ketiga Juli akan mengalir di IKN, lihat saja nanti," kata Danis.

Danis menjelaskan, sumber air dalam uji coba Instalasi Pengolahan Air Bersih akhir bulan ini adalah Intake Sungai Sepaku. Menurutnya, uji coba tersebut akan dilanjutkan dengan mengambil sumber air dari Bendungan Sepaku Semoi sebesar 300 liter per detik. Kapasitas air bersih di IKN pada tahap pertama mencapai 600 sampai 650 liter per detik. Oleh karena itu, Danis tidak mengkhawatirkan kondisi IKN saat musim kemarau selama Agustus 2024.

Selain air, Danis menyampaikan PT Pertamina sedang memasang jaringan gas di IKN. Danis mengaku tidak mengetahui kapasitas gas yang akan dialirkan di IKN, namun pemerintah mengetahui titik-titik jaringan gas tersebut dioperasikan.

Danis mengatakan, jaringan listrik dan kabel fiber optik sedang dipasang

udara adalah landasan pacu, taxiway, dan apron.

Danis mencatat, landasan pacu bandara VVIP dirancang memiliki panjang 3.000 meter. Dia mengakui seluruh landasan pacu tersebut tidak akan rampung pada Agustus 2024.

"Oleh karena itu, kami mencoba menyelesaikan panjang landasan pacu



di IKN. Menurutnya, jaringan internet di IKN juga akan diperkuat dengan stasiun pemancar atau BTS.

Sementara itu, pesawat kepresidenan atau Indonesia One dijadwalkan dapat mendarat di Bandara VVIP IKN Nusantara pada Agustus 2024. Perkembangan konstruksi bandara IKN kini telah mencapai 50 persen di sisi udara dan darat.

Danis menjelaskan, infrastruktur darat Bandara VVIP IKN adalah terminal bandara. Sementara itu, infrastruktur

hingga 2.200 meter pada Agustus 2024, sehingga pesawat narrow body bisa mendarat," kata Danis.

Indonesia One adalah pesawat besutan Boeing jenis B737-800 dengan kode registrasi A-001. Pesawat tersebut secara legal dimiliki Sekretariat Negara dan dioperasikan TNI Angkatan Udara. Total panjang landasan pacu yang dibutuhkan Indonesia One untuk mendarat dan terbang setidaknya 2.000 meter. Indonesia One telah beroperasi sejak April 2014. ●

GERPOL

Gunawan Effendi

Masih dalam masa transisi suksesi kepemimpinan nasional, beragam wacana dari elite politik berhembus deras. Banyak yang akan sulit merumuskan rangkaian wacana silih berganti itu. Namun, semuanya dapat dirangkum sebagai dinamika sistem politik Indonesia.

Secara sederhana, sistem politik, terdiri dari masukan (input), proses, dan keluaran (output). Tak peduli ideologinya, apakah demokrasi, tirani, otoritarian, komunis, atau apalah namanya, silakan sebut saja.

Nah, Indonesia sejak Reformasi 1998, sistem politik Indonesia menerapkan demokrasi. Sebagai konsekuensinya, sistem politik akan lebih bising (berisik) lantaran landasan demokrasi mutakhir kerap mengacu kepada salah satu slogan Revolusi Prancis. (1789-1799): *liberte, egalite, fraternite*. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Jadi, demokrasi secara ideal memberi kebebasan terutama berbicara dan menyatakan pendapat, berwacana, termasuk menggunakan media massa maupun sosial. Demokrasi pun mengharuskan kesetaraan terutama di depan hukum, termasuk soal gender. Namun, semuanya harus tetap berada dalam order (tatanan) yang rukun tanpa kebencian sebagaimana tercermin dalam *fraternite*, kita semua basudara sebagai satu bangsa.

Nah, demikianlah, sepanjang Mei-Juni 2024, banyak wacana berhembus di ruang publik kita yang berkaitan langsung dengan suksesi kepemimpinan nasional. Salah satu saja, misalnya, wacana rekonsiliasi nasional yang muncul di acara 'Tribute to Bang Akbar Tandjung' di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2024..

Di acara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo mengemukakan tantangan ke depan bangsa ini sangat berat, sehingga perlu kekompakan, kegotongroyongan dan saling memahami, saling mendukung satu sama lain antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden hari ini, Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya menjadi satu membangun bangsa dan negara ke depan. Bambang yang juga petinggi

Partai Golkar pun melibatkan Maruarar Sirait, untuk merealisasikan gagasan rekonsiliasi itu.

Toh tanggapan datang dari Sufmi Dasco Ahmad, politisi Gerindra yang menjabat Wakil Ketua DPR. Dasco mengaku heran ketika ada pihak yang baru menyuarakan rekonsiliasi dan menyebutnya sebagai pemain tikungan..

Menurut Dasco, menjadi lucu jika para pemain tikungan itu tidak paham rekonsiliasi nasional sudah berjalan dan sampai di tahap akhir. Malah ia menyebut para pemain tikungan ini mengasumsikan secara keliru seolah-olah terjadi darurat rekonsiliasi nasional.

Tak surut dengan tanggapan Dasco, Bamsoet, nama ringkas Bambang Soesatyo, kemudian megajukan wacana amendemen konstitusi. Kali ini malah melibatkan politisi Amien Rais yang juga pernah menjadi Ketua MPR.

Bamsoet mengemukakan gagasan amendemen UUD 1945 terkait dengan Pemilu 2024 yang disebutnya "sangat brutal, sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di

akal." Ia yakin para pemimpin partai politik akan terbuka dengan wacana amendemen UUD 1945, khususnya untuk mengubah tata cara pemilihan presiden. Salah satu amendemen yang bisa dilakukan, kata dia, adalah dengan mengembalikan wewenang memilih presiden kepada MPR. Toh ia mengakui tak mungkin amendemen ini diproses pada periode MPR kali ini karena masa tugasnya akan berakhir.

Sedangkan Pak Amien mengemukakan agar Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Oktober 2024 tidak cawe-cawe dalam arti ikut campur dalam pemerintahan Prabowo. Pernyataan Amien Rais ini segera mendapat tanggapan dari politisi Golkar Nusron Wahid sebagai upaya adu domba.

Toh semuanya berada dalam sistem politik demokratis. Wacana-wacana yang berkembang itu tetap merupakan input meskipun dengan cara manuver atau gerilya politik (gerpol). Bagaimana keluarannya, masih perlu gerpol yang akhirnya menjadi putusan yang mengikat. ●





KE MANA ANGGARAN 2025 MENGALIR

Salah satu cara memahami penyelenggaraan negara adalah melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun. Bagaimana dengan APBN 2025 yang dirancang dalam masa peralihan dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran?



Bukan kebetulan Budisatrio Djiwandono menegaskan tak akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu sempat dipasangkan dengan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, dalam

Mei 2024 malam.

Lebih dari itu, Budisatrio ternyata menjadi anggota Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan penyusunan APBN 2025 pada Jumat, 31 Mei 2024. Dengan perannya di Tim Sinkronisasi, tentu saja perannya dan fungsinya akan lebih luas cakupan-

Tommy Djiwandono, Budisatrio menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. Usai pertemuan, Bu Menkeu mengemukakan pertemuan tersebut merupakan salah satu langkah komunikasi untuk sinkronisasi masa transisi kepemimpinan Presiden yakni mengenai program pemerintahan baru



sebuah poster terkait dengan Pilkada Jakarta.

"Saya sudah menerima arahan dari Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo untuk terus melanjutkan perjuangan di parlemen," kata Budi lewat pesan singkat, Kamis, 30

nya. Setidaknya jika melihat angka APBN dibandingkan dengan nilai APBD Jakarta.

Begitulah, bersama sejumlah petinggi Partai Gerindra, antara lain Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Ahmad Muzani, dan Bendahara Partai Gerindra

dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menam-

pung berbagai aspirasi program-program baru,” Menkeu Ani.

Bu Menkeu juga menegaskan, penyusunan APBN 2025 tetap menjaga prinsip pada kehati-hatian dan kredibilitas dari berbagai stakeholder. Sedangkan penyusunan RAPBN 2025 tengah memasuki tahapan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan



Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang pada Juni 2024 akan dilakukan penyampaian tanggapan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi DPR RI.

Terlebih, pemerintahan berikutnya juga memiliki program-program baru yang pasti memerlukan pos atau alokasi

anggaran untuk bisa berjalan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Kami di Kementerian keuangan siap menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk menjalankan program secara berkelanjutan,” ujarnya.



Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting

Dengan begitu, ia mengakui bahwa proses penyusunan APBN begitu intens sehingga langkah komunikasi untuk melakukan sinkronisasi program pemerintahan baru penting untuk dilakukan. “Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi sebab urgensi dari siklus anggaran jadi prioritas yang sangat penting,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Sri Mulyani, pihaknya telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan baru, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Ini sudah diketahui bahwa presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan baik dan bisa terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” imbuhnya.

Menkeu pun menyatakan dengan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran sudah banyak melakukan komunikasi dan akan terus menjaga koordinasi yang dilakukan agar proses penyusunan anggaran pemerintahan di masa transisi berjalan baik. “Bahwa pak Tomi Djiwan-

dono akan incharge bertugas bidang ekonomi-keuangan, selama ini sudah banyak komunikasi namun hari ini diformalkan. Sehingga ini akan menjaga komunikasi yang sangat baik sehingga akan fokus kepada masalah masalah yang harus harus kami tangani bersama,” ungkapnya.

Sedangkan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, Tommy Djiwandono menegaskan, prinsip kehati-hatian saat melakukan sinkronisasi anggaran dengan pemerintahan diperlukan agar menjaga ruang fiskal. “Kami di Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi. Itu saya rasa hal yang penting bahwa message itu kita ingin sampaikan,” kata Tommy.

Ia mengungkapkan bahwa komunikasi Gugus Tugas Sinkronisasi dengan Kemenkeu sudah dilakukan selama dua bulan belakangan ini. Tommy pun

berterima kasih atas kerja sama dan keterbukaan dari Kemenkeu terhadap Gugus Tugas Sinkronisasi.

Sedangkan Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengatakan tim ini ditugaskan oleh Prabowo untuk melakukan sinkronisasi dengan sejumlah institusi pemerintah terkait. “Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada 20 Oktober,” ujar Muzani.

Muzani menjelaskan, tujuan adanya gugus tugas ini merupakan upaya efisiensi dari Prabowo-Gibran agar setelah dilantik bisa langsung menjalankan program-program mereka. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyebutkan, Prabowo berharap proses sinkronisasi ini bisa berjalan dengan baik.

“Beliau (Prabowo) berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan berjalan baik, karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi, sehingga komunikasi, koordinasi dan

sinkronisasi akan terjadi,” kata Muzani.

Alasannya, pemerintahan yang akan datang ingin cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye saat Pilpres 2024. Menurut Muzani, tim ini akan terus sowan ke sejumlah kementerian terkait demi melancarkan proses sinkronisasi pemerintahan yang baru hingga fase pelantikan tiba.

“Sisa waktu yang kini ada sampai waktu pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persia-

orang tersebut merupakan kader Partai Gerindra.

Prabowo pun buka suara mengapa tim yang diisi oleh orang berlatar belakang partai yang dipimpinnya itu. Menurut Presiden terpilih yang masih menjabat Menteri Pertahanan ini, pemilihan tim tersebut adalah urusan teknis termasuk latar belakangnya.

“(Itu urusan) Teknis, teknis, teknis aja,” kata Prabowo singkat ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.

Prabowo bilang tim tersebut bukanlah

si,” tandas Prabowo.

Apapun, usai pertemuan Tim Sinkronisasi dengan Menkeu, Pemerintah dan DPR RI melakukan maraton rapat untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasi, pada Senin, 10 Juni 2024, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat mengenai beberapa rincian asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan yang akan menjadi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi XI DPR. Sebelum pengambilan kesepakatan antara Komisi XI DPR dan pemerintah, rapat didahului dengan laporan Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan Ekonomi dan Transfer ke Daerah, Panja Penerimaan Negara, serta Panja Inflasi dan Nilai Tukar.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir membacakan kesimpulan hasil rapat kerja tersebut, meliputi asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan pada kisaran 5,1 persen – 5,5 persen, sementara inflasi dipatok berada pada kisaran 1,5 persen – 3,5 persen.

“Nilai tukar rupiah, awalnya pemerintah mengajukan pada rentang Rp 15.300-Rp 15.900 per dollar AS (Amerika Serikat). Namun, sesuai hasil pembahasan Panitia Kerja Komisi XI DPR, nilai tukar yang disepakati berada dalam kisaran Rp 15.300 – Rp 15.900 per dollar AS. Sedangkan untuk tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang akan dirilis pada tahun 2025, pemerintah bersama DPR menetapkan target di tingkat sebesar 6,9 persen – 7,2 persen,” urai Kahar.

Komisi XI DPR dan pemerintah juga menyetujui upaya pemerintah untuk menempuh berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar 12,14 persen – 12,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Pemerintah dan Bank Indonesia mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan dan program pengendalian inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan,” tegas Kahar.



pan-persiapan pada program-program itu,” kata Muzani.

Nah, dalam berbagai pemberitaan muncul istilah Tim Transisi. Padahal sudah jelas disebutkan oleh Menkeu Sri Mulyani sebagai Tim Sinkronisasi.

Tim Sinkronisasi ini diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Ahmad Muzani, Thomas Djiwandono yang bertugas di bidang ekonomi-keuangan, serta Budi Djiwandono, Sugiono, dan Prasetyo Hadi sebagai anggota. Enam

tim transisi, karena pemerintahannya mengusung tema keberlanjutan. Tim tersebut adalah tim asistensi dan sinkronisasi. Tim tersebut bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo sebagai presiden baru mulai Oktober 2024.

“Kita tidak mengatakan transisi. tidak ada tim transisi. yang ada tim asistensi dan ada juga kita bentuk tim sinkronisa-

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025 lainnya yakni target pembangunan yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR, diantaranya menetapkan tingkat pengangguran terbuka yang harus berada dalam kisaran 4,5 persen – 5,0 persen, tingkat kemiskinan 7,0 persen – 8,0 persen, dan gini rasio pada rentang 0,379 – 0,382.

“Hal yang menarik, awalnya pemerintah tidak mencantumkan angka terkait kemiskinan ekstrem, namun setelah pembahasan, akhirnya dimunculkan target nol persen sesuai yang ada pada APBN tahun 2024. Sementara itu, indikator pembangunan seperti nilai tukar petani (NTP) ditetapkan dalam kisaran

jahteraan masyarakat. Terima kasih atas seluruh masukan yang diberikan, semoga ini akan menjadi sebuah awalan yang baik dan kredibel bagi APBN 2025,” ujar Bu Menkeu.

Namun, poin yang juga penting adalah rancangan defisit APBN 2025. Sejak awal rencana APBN 2025 yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) muncul, pemerintah menargetkan defisit di rentang 2,45-2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Toh gagasan agar defisit APBN 2025 dirancang lebih kecil, hingga 1,5 persen,

Suharso, posisi defisit di bawah 2 persen tersebut akan cukup memberikan ruang kepada presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk melaksanakan program-programnya.

Suharso menyampaikan, saat ini belum semua program Prabowo masuk dan belum seluruhnya selaras dalam perencanaan. Untuk itu, perlu ruang bagi pemerintahan Prabowo agar lebih leluasa mengatur anggaran untuk mendanai programnya.

Usul Suharso adalah memangkas anggaran-anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menekan defisit di rentang 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB. “Kalau mau dilakukan mungkin



115-120 dan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 105-108. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka yang diajukan pemerintah, yaitu 113-115 untuk NTP dan 105-108 untuk NTN,” jelas Kahar.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Panja atas kerja kerasnya turut menjaga APBN secara baik. “Hal itu sangat berguna bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN 2025 kedepan, utamanya manfaat APBN untuk kese-

muncul saat pemerintah melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu, 5 Juni 2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa secara independen menyebutkan bahwa pemerintah dapat menekan defisit lebih rendah.

“Kami berharap Menteri Keuangan dan Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 persen-1,8 persen,” ujarnya. Menurut

kami bisa main persentase kepada K/L atau belanja yang lain yang sangat dimungkinkan (pemangkasan),” tuturnya.

Realisasi defisit anggaran 2023 tercatat mencapai Rp347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB. Sedangkan APBN 2024 mencanangkan defisit sekitar 2,8 persen. Pilihannya, penurunan defisit harus menekan pengeluaran (belanja APBN), dan atau mencari tambahan pendapatan (penerimaan APBN). Pilihan lain adalah menambah utang. Itulah yang memerlukan sinkronisasi. •



JATAH DAERAH DAN KEMUNGKINAN APBN PERUBAHAN

Gagasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ternyata mewarnai Rancangan APBN 2025. Sejumlah anggaran kementerian dan lembaga pun terancang turun dari tahun sebelumnya. Bagaimana transfer dana ke daerah?

Berbagai media memuat bagaimana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Laha-dalia berang menghadapi kenyataan anggaran kementeriannya akan susut pada 2025 dibandingkan dengan tahun ini. Ia pun meminta DPR memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, Bahlil tampak berapi-api menanggapi kemungkinan anggaran kementeriannya turun menjadi Rp681 miliar pada 2025. Padahal, pada 2024, angkanya tercatat Rp1,22 triliun

"Ini membuat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi ketua umum Hipmi, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini," ujarnya dengan gaya sindiran.

Karena itu ia meminta Komisi VI DPR memanggil Menteri Keuangan dan

Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Saya minta kepada pimpinan (Komisi VI DPR RI), tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini," ujarnya.

Selanjutnya Bahlil membuka kemungkinan merevisi target investasi 2025 jika anggaran tak dinaikkan. Bahlil menyebut rencana kerja pemerintah (RKP) dengan anggaran Rp681 miliar tak sesuai dengan target yang dibebankan kepada Kementerian Investasi/BKPM.

Menurut dia, RKP yang dibuat Kementerian Keuangan dan Bappenas jelas-jelas tidak sejalan dengan anggaran yang diberikan. Ia menegaskan apa yang dibuat kedua pejabat itu harus diketahui publik. "Jadi saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya, dari (target investasi 2025) Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya dan tim buat. Saya tidak mau menjadikan staf saya kambing hitam besok nanti," tuturnya.

"Kita ini mau mendorong pertumbu-

han ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementeriannya," tegas Bahlil.

Sebagai latar belakang, sejak awal penyusunan rencana APBN 2025 yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR pada 28 Mei dan 4 Juni 2024, pemerintah menargetkan defisit di rentang 2,45-2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit artinya kekurangan anggaran belanja akibat penerimaan negara yang tak mengimbangnya.

Nah, realisasi defisit anggaran 2023 tercatat mencapai Rp347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB. Sedangkan APBN 2024 mencanangkan defisit sekitar 2,8 persen dari PDB. Jadi, rancangan defisit pada APBN 2025 beda tipis dengan yang 2024

Namun, gagasan agar defisit APBN 2025 dirancang lebih kecil, hingga 1,5

persen, muncul saat pemerintah melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu, 5 Juni 2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa secara independen menyebutkan bahwa pemerintah dapat menekan defisit lebih rendah.

"Kami berharap Menteri Keuangan dan Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 persen-1,8 persen," ujarnya. Menurut Suharso, posisi defisit di bawah 2 persen tersebut akan cukup memberikan ruang kepada presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk melaksanakan program-programnya.

Suharso menyampaikan, saat ini belum semua program Prabowo masuk dan belum seluruhnya selaras dalam perencanaan. Untuk itu, perlu ruang bagi pemerintahan Prabowo agar lebih leluasa mengatur anggaran untuk mendanai programnya.

Usul Suharso adalah memangkas anggaran-anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menekan defisit di rentang 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB. "Kalau mau dilakukan mungkin kami bisa main persentase kepada K/L atau belanja yang lain yang sangat dimungkinkan (pemanngkasan)," ujarnya.

Alhasil, bukan hanya Kementerian Investasi/BKPM yang anggarannya kemungkinan terpankas. Selain kementerian yang dipimpin Bahlil, yang lain antaranya adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi.

Namun, kabar baiknya, rancangan APBN 2025 ternyata tak memangkas anggaran transfer ke daerah. Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran daerah ini seiring meningkatnya be-

lanja kementerian/lembaga (K/L) juga ikut melonjak. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi APBN.

"Desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan dana transfer daerah yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Ini terus terang untuk APBN menjadi tantangan karena transfer ke daerah makin besar, namun belanja K/L juga makin besar," kata Sri Mulyani, Senin, 11 Juni 2024.

Dari tahun ke tahun, lanjut Sri Mulyani memaparkan, transfer ke daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, alokasi anggaran transfer ke daerah mencapai Rp 785,7 triliun. Tahun 2022, angkanya naik menjadi Rp 816,2 triliun di tahun 2022, dan Rp 881,4 triliun pada tahun 2023.



Sementara untuk tahun 2025, Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran ke daerah sebesar Rp 890,6 triliun. Jumlah ini naik daripada tahun 2024 yang sebesar Rp 857,6 triliun.

Di sisi lain, belanja K/L mengalami kenaikan pada tahun 2025. Misalnya, untuk anggaran pendidikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025 sekitar Rp 708 triliun hingga Rp 741 triliun.

"Dalam hal ini ada tumpukan overlap antara belanja daerah dengan belanja pusat dari mulai infrastruktur sampai urusan sumber daya manusia. Beban-nya harus diserap APBN karena dia menjadi sumber sangat utama dari daerah untuk mendapatkan transfer-nya," ujarnya.

Berkaitan dengan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

menjelaskan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Ada sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam DAK tahun depan.

"Tentu saja DAK ini menjadi jenis transfer khusus yang memiliki efek stimulan terhadap pembangunan ekonomi," kata Suharso dalam acara Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025, Jumat, 14 Juni 2024.

Suharso mengatakan pemerintah daerah perlu memperhatikan empat aspek dalam pengajuan DAK ke pemerintah pusat di 2025. Pertama adalah menerapkan matching program. Dia mengatakan dalam hal ini pemerintah

akan melakukan pemaduan antara sumber pembangunan yang berasal dari DAK, pendanaan dari APBD dan APBN, maupun dari swasta.

"Kami lakukan blended finance untuk memaksimalkan output dan outcome yang bisa dinikmati masyarakat dan menjaga kondisi fiskal," katanya.

Kedua, kata dia, pengajuan DAK juga harus memenuhi konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Suharso mengatakan konsep ini perlu diterapkan agar DAK bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan daerah yang berbeda-beda.

Selain itu, Suharso mengatakan DAK juga perlu menerapkan konsep ketuntasan. Artinya, pemerintah ingin pemerintah daerah lebih fokus dan terarah dalam penentuan usulan program. "Menu yang akan disusun lebih tajam,

usulan kebijakan tak perlu terlalu banyak,” katanya.

Keempat, kata dia, adalah pendekatan asimetris, yaitu program-program dalam DAK harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Suharso menuntut daerah mampu mengidentifikasi kebutuhan daerahnya masing-masing dan tidak hanya ikut-ikutan program pmda tetangga.

Deputi Bidang Pembangunan Regional Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menambahkan ada sejumlah program prioritas dalam kebijakan DAK 2025. Untuk DAK Tematik, kata dia, pemerintah akan melakukan pengentasan permukiman kumuh terpadu, yang terdiri dari perbaikan fasilitas air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman.

Sementara itu untuk DAK Fisik akan diarahkan kepada pendidikan, termasuk perpustakaan; kesehatan; air minum; sanitasi; jalan; irigasi; dan perlindungan perempuan dan anak. Untuk DAK nonfisik mencakup sejumlah prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini meliputi bantuan operasional satuan pendidikan, dana bantuan operasional museum, hingga tunjangan guru dan ASN daerah.

Adapun untuk hibah akan diarahkan kepada pembangunan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit dan Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape. “Pembiayaan atau hibah luar negeri berkaitan dengan MRT dan bio carbon fund,” ujarnya.

Nah, dengan rancangan dan kisi-kisi postur APBN yang telah dikemukakan pihak pemerintah, Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung menanyakan kemungkinan APBN Perubahan (APBNP) di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Tamsil khawatir perubahan APBN hanya untuk memenuhi janji-janji politik Prabowo, seperti program makan siang gratis hingga melanjutkan program Presiden Jokowi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Apa didorong untuk adanya APBN Perubahan? Karena Bu Menteri pasti ingat 2004 itu APBN

Perubahan itu luar biasa perubahan yang kita lakukan. Jadi ini sekaligus buka rahasianya, apakah nanti kita akan melakukan perubahan lagi karena janji-janji politik presiden yang saya kira tidak bisa kita abaikan, ada makan siang gratis,” kata Tamsil saat rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab, mekanisme APBNP sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yang mana pemerintahan baru berwenang untuk melakukan perubahan atau tidak. Pihaknya pun terus menjalin komunikasi dengan tim Prabowo dalam menyusun APBN 2025. Dengan begitu, penyusunannya sesuai dengan program-program yang diusung presiden terpilih tersebut.

“Namun, kami di dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025, kita juga terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim yang disampaikan oleh pak Prabowo sehingga kita mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan tadi yang disampaikan janji-janji maupun berbagai program,” kata Sri Mulyani.

Bu Menteri menjelaskan

APBN harus tetap dijaga kesehatannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alhasil, APBN tetap menjadi sumber instrumen yang menjawab permasalahan pembangunan dalam negeri.

Dia menekankan APBN tidak bisa dijaga secara spontan dan jangka pendek. Untuk itu, pihaknya terus mencari jalan tengah untuk tetap menjaga keseimbangan berbagai program mendatang.

“Namun, di sisi lain jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri. Ini yang terjadi di banyak negara di mana krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak sustainable,” imbuhnya.

Dia pun memberi contoh negara yang terbukti tidak dapat menjaga APBN-nya, yakni Argentina. Pada abad ke-19, lanjut Sri Mulyani, kondisi ekonomi negara tersebut sangat maju hingga membuatnya menjadi negara kaya. Namun, karena APBN tidak dikelola dengan baik, negara tersebut terjebak dalam middle income trap.

“Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi dengan tentu karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga,” jelasnya.

Nah, proses penyusunan APBN 2025 masih terus berlanjut dan lazimnya akan disampaikan oleh Presiden pada pidato kenegaraan pada 16 Agustus. Soal APBN Perubahan, masih harus menunggu Prabowo menjadi kepala pemerintahan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. ●



info indonesia Network www.infoindonesia.id

INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan
 informasi
 di dunia maya
 melalui jaringan
 internet
 memberikan
 banyak
 referensi
INFO
 kepada
 masyarakat
 Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

www.infoindonesia.id
facebook @infoindonesia.id **twitter** @_infoindonesia
Instagram @info_indonesia.id **YouTube** : infoindonesiatv



INOVASI **UNTUK** NEGERI
nfo indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #44 JUNI 2024



PILKADA JAKARTA 2024

ANIES **VS**
RIDWAN
KAMIL